

Demokrasi dan Kudeta Militer

Coen Husain Pontoh Luky Djani Vedi R. Hadiz Andre Barahamin
Giles Ji Ungpakorn Ted Sprague Muhammad Ridha Iqra Anugrah
Sapto Waluyo Samir Amin

Prakata: Andre Barahamin

Kata Pengantar: Vedi R. Hadiz

INDO **PROGRESS**



Demokrasi dan Kudeta Militer

**Coen Husain Pontoh Luky Djani Vedi R. Hadiz Andre
Barahamin Giles Ji Ungpakorn Ted Sprague Muhammad
Ridha Iqra Anugrah Sapto Waluyo Samir Amin**

Prakata: Andre Barahamin

Kata Pengantar: Vedi R. Hadiz



Judul buku: *Demokrasi dan Kudeta Militer*

Pengarang: Coen Husain Pontoh, dkk.

Prakata: Andre Barahamin

Kata Pengantar: Vedi R. Hadiz

Desain sampul dan isi: Alit Ambara

Penerbit: Pustaka IndoPROGRESS, 2018

**Daftar Buku Saku terbitan
Pustaka IndoPROGRESS**

Membedah Tantangan Jokowi-JK

Editor dan Kata Pengantar: Coen Husain Pontoh

**Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara
(Catatan-catatan Investigasi)**

Louis Althusser

Kata Pengantar: Martin Suryajaya

Analisa Marx Atas Produksi Kapitalis

Gerard Dumenil dan Duncan Foley

Kata Pengantar: Mohamad Zaki Hussein

**Penghematan Melawan Demokrasi Fase Otoriter
Neoliberalisme?**

Greg Albo dan Carlo Fanelli

Kata Pengantar: Anto Sangadji

Islam Politik Sebuah Analisis Marxis

Deepa Kumar

Kata Pengantar: Coen Husain Pontoh

**Radikalisme Islam di Indonesia Menuju Suatu
Pemahaman Sosiologis**

Vedi R. Hadiz

Kata Pengantar: Airlangga Pribadi

**Tak Ada Penyiksaan Terhadap 6 Jenderal
Wawancara Dengan DR. Liaw Yan Siang**

Alfred D. Ticoalu

Kata Pengantar: Made Supriatma

Sejarah Teori Krisis Sebuah Pengantar Analisa Marxis

Anwar Shaikh

Kata Pengantar: Intan Suwandi

Sukarno, Marxisme, dan Bahaya Pemfosilan

Editor: Coen Husain Pontoh

Kata Pengantar: Bonnie Triyana

Marxisme dan Ketuhanan Yang Maha Esa

Editor: Coen Husain Pontoh

Kata Pengantar: Muhammad Al-Fayyadl

**Kapitalisme dan Penindasan Terhadap Perempuan:
Kembali ke Marx**

Martha A. Gimenez

Kata Pengantar: Ruth Indiah Rahayu

**Mengajarkan Modernitas:
PKI Sebagai Sebuah Lembaga Pendidikan**

Ruth T. McVey

Kata Pengantar: John Roosa

Marxisme dan Evolusi Manusia

Dede Mulyanto

Kata Pengantar: Sylvia Tiwon

**Sosialisme Abad Keduapuluh Satu:
Pengalaman Amerika Latin**

Martha Harnecker

Kata Pengantar: Coen Husain Pontoh

Daftar Isi:

Kata Pengantar *Vedi R. Hadiz* **1**

Prakata *Andre Barahamin* **5**

I. Studi Kasus Thailand **11**

Mengapa Demokrasi Melahirkan Kudeta? Coen Husain Pontoh **13**

Implikasi Politik Dari Reformasi Di Thailand Luky Djani **20**

"Kaus Merah": Mencari Penjelasan Coen Husain Pontoh **32**

Politik Dan Demokrasi Tetap Menjadi Mainan Elit Vedi T. Hadiz **37**

Distrik Thai: Potret Thailand Pasca Kudeta 22 Mei 2014* Andre Barahamin **43**

Junta Militer Penindas HAM di Thailand Giles Ji Ungpakorn **58**

II. Studi Kasus Mesir **69**

Benarkah Ada Kudeta Militer di Mesir? Ted Sprague **70**

Revolusi Sekarang dan Pertanyaan Rumitnya Muhammad Ridha **78**

Spontanitas Revolusioner dan Kesiapan Organisasi

dalam Revolusi Mesir Ted Sprague **86**

Kembali Menengok Revolusi Mesir dan Problematikanya Iqra Anugrah **102**

Masa Depan Demokrasi Mesir Coen Husain Pontoh **111**

Impase Politik Mesir: Kegamangan Kiri Romantik Sapto Waluyo **120**

Menakar Peran Gerakan Kiri Dalam Kejatuhan Mursi Coen Husain Pontoh **133**

Tidak Ada Chaos Dalam Masyarakat Mesir Samir Amin **141**

Biodata Penulis **150**

Kata Pengantar

Memahami Kudeta Militer Sebagai Fenomena Ekonomi Politik

Vedi R. Hadiz

MEMAHAMI fenomena kudeta militer melalui analisa struktural dan kes-
ejarian bukan perkara yang mudah. Padahal kudeta militer mewarnai
perkembangan sosial politik banyak negeri, terutama di Amerika Latin,
Asia dan Afrika. Di Thailand, sebagaimana dibahas dalam buku ini, kude-
ta militer sudah terjadi secara rutin dalam 80 tahun terakhir (tepatnya,
12 kali yang berhasil sejak 1932, selain tujuh yang gagal). Di Mesir, ne-
geri lain yang menjadi pokok perhatian para penulis, kudeta militer tahun
1952 – terhadap monarki yang didukung Inggris – oleh kelompok militer
yang kemudian dipimpin Nasser merupakan bagian mendasar narasi poli-
tik bangsa Mesir. Di Indonesia tentunya kita mengenal rentetan peristiwa
di pertengahan 1960-an yang melibatkan kudeta militer yang dipimpin
Jenderal Soeharto terhadap pemerintahan Soekarno. Namun, kita juga
sudah mulai terbiasa menempatkan kudeta tersebut dalam konteks yang
lebih luas, yaitu konflik sosial antara berbagai kekuatan di Indonesia yang
berujung penghancuran Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh suatu koa-
lisi politik yang dipimpin tentara. Konflik sosial itu adalah hasil berbagai
kontradiksi mendasar dalam perkembangan masyarakat dan Negara pas-
ca-kolonial yang meruncing dalam suasana Perang Dingin di Asia Tengg-
ra (yang sangat berdarah dan sebenarnya sama sekali tidak ‘dingin’).

Berbagai kudeta militer yang pernah berlangsung di Thailand, termasuk
terhadap pemerintah Thaksin (2006) dan Yingluck Shinawatra (2014), ser-
ta kudeta militer di Mesir pada tahun 1952 dan 2013 (terhadap pemerin-
tahan Ikhwanul Muslimin pimpinan Morsi) juga perlu dipahami dalam
konteks yang lebih luas. Analisa terhadap berbagai peristiwa ini, yang di-

serta pemahaman mendalam terhadap struktur sosial ekonomi, konstelasi kekuatan politik serta faktor kesejarahan, masih cukup langka. Apalagi yang tampil dalam Bahasa Indonesia.

Konflik sosial berkepanjangan di Thailand yang berujung pada kedua kudeta tersebut memang dibahas dalam kajian ekonomi politik atau sejarah sosial oleh sarjana macam Kevin Hewison atau Kasian Tejapira. Ada juga segelintir analisa serupa yang dapat ditemukan mengenai kudeta Mesir, walau pada umumnya menjadi bagian uraian lebih panjang mengenai hubungan antara militer dan Ikhwanul Muslimin sejak zaman Nasser. Namun jauh lebih banyak uraian mengenai peristiwa-peristiwa ini ibarat menyediakan jepretan foto sesaat atau *snapshot* tentang penggulingan suatu pemerintahan dibandingkan analisa sosial yang mendalam.

Bila ditinjau sebagai suatu karya kolektif, buku ini berusaha menyumbangkan perspektif yang lebih bernuansa ekonomi politik dan sadar sejarah sosial untuk memahami fenomena kudeta militer di Thailand dan Mesir. Tentunya, sebagai buku yang ditujukan untuk pembaca yang ber-Bahasa Indonesia, berbagai tulisan yang ditemukan di dalamnya juga berupaya untuk menyediakan dimensi persoalan yang bisa menjadi bahan refleksi untuk memahami kasus Indonesia. Apabila para pembaca menemukan cukup banyak bahan untuk mengadakan refleksi dan perbandingan, maka para editor buku ini sudah menyumbangkan sesuatu yang cukup berarti dalam kepastakaan ekonomi politik di negeri kita.

Dalam kasus Thailand, kita menjumpai sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kontradiksi proses pembangunan ekonomi serta perluasan otoritas Negara. Sesungguhnya peranan Raja Thailand dalam berbagai krisis politik, setidak-tidaknya sejak pergolakan-pergolakan tahun 1970-an, tidak bisa dimengerti di luar proses transformasi sosial dahsyat selama beberapa dasawarsa terakhir. Proses tersebut menyangkut perkembangan kelas kapitalis yang semakin besar tetapi memiliki variasi internal berarti, berbagai perubahan dalam peranan birokrasi Negara (termasuk aparat militer), meluasnya kelas menengah dan buruh perkotaan serta dislokasi sosial yang terjadi di wilayah-wilayah pedesaan. Bahkan memahami peranan Raja sebagai pemodal adalah sama pentingnya dengan memahami kemunculan Thaksin dalam konteks pergolakan hebat di antara fraksi-fraksi bor-

juasi setelah Krisis Ekonomi Asia 1997/98.

Dalam kasus Mesir, kudeta 2013 hanya untuk sebagian dapat dipandang sebagai sekadar babak terakhir dalam pergulatan antara Ikhwanul Muslimin dan aparat keamanan dan militer negeri itu. Konflik tersebut sesungguhnya telah meruncing dalam konteks yang relatif baru: berkembangnya fraksi modal yang lahir dalam lingkungan Ikhwanul Muslimin yang berupaya mengambil alih posisi dominan fraksi borjuasi yang berkembang lewat hubungan dekat dengan rezim Mubarak. Persengketaan juga terjadi dalam lingkungan domestik dan internasional yang berbeda daripada tahun 1950-an dan 1960-an – zaman Sayyid Qutb – akibat globalisasi neo-liberal, proses urbanisasi luar biasa, perluasan kesempatan pendidikan (sejak zaman Nasser) serta berkembangnya kaum miskin kota secara massal. Makna Islamisme pun sudah menjadi semakin jamak, apalagi berbagai transformasi internal dalam basis sosial Ikhwanul Muslimin telah berdampak pada watak politiknya.

Tentunya, kedua kasus di atas cukup berbeda dengan Indonesia dalam banyak hal. Tetapi terdapat banyak juga persamaan. Misalnya, kekuatan Kiri mengalami penyingkiran (dengan derajat kekerasan yang berbeda) dari panggung politik di Thailand, Mesir maupun Indonesia di masa Perang Dingin. Akibatnya perlawanan terhadap model-model pembangunan yang tidak adil perlu mencari saluran-saluran baru – termasuk dalam berbagai jenis populisme politik. Di ketiga negeri tersebut, militer sebagai institusi juga mengklaim dirinya sebagai penjamin persatuan nasional, kekuatan yang berada di atas persaingan politik sempit. Namun dalam kenyataannya, di Thailand, apalagi Mesir dan Indonesia, militer telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang menguasai berbagai jenis usaha – legal, setengah legal atau sama sekali gelap – yang pasti memengaruhi kepentingan dan sepak terjangnya.

Tentunya sebagai buku berupa kumpulan tulisan, para pembaca akan menemukan gaya menulis, pokok perhatian dan kerangka analisa yang kadangkala berbeda di antara berbagai penulisnya. Ada esei agak panjang dan agak pendek, tulisan yang asli dibuat dalam Bahasa Indonesia serta yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris. Bahkan ada juga rekaman wawancara. Namun, mudah-mudahan para pembaca menemukan pula cara

berpikir yang cukup koheren di antara upaya setiap penyumbang artikel untuk memahami kudeta militer – bukan saja sebagai peristiwa penggulingan pemerintah sipil oleh institusi militer – tetapi bagian dari konflik sosial menyejarah yang sarat dengan faktor ekonomi politik. Lebih jauh lagi, para penulis berusaha membahas fenomena kudeta militer bukan hanya dalam dikotomi militer-sipil atau otoriterisme-demokrasi. Persoalan-persoalan yang diangkat mereka secara keseluruhan menunjukkan kompleksitas sosial yang tidak bisa direduksi dalam wujud narasi dikotomis yang sederhana.***

Prakata

Kudeta: Jalan Buntu atau Jalan Keluar?

Andre Barahamin

JUDUL di atas bukanlah pertanyaan retorik.

Sebaliknya, ini merupakan sebuah upaya untuk melihat apakah memang kudeta merupakan satu-satunya opsi yang harus ditempuh dan disepakati sebagai jalan keluar ketika demokrasi tidak berfungsi? Apakah pengambilalihan kekuasaan secara ilegal merupakan solusi ketika demokrasi ternyata justru menjadi jawaban ketika seorang megalomaniak terus menerus berkuasa? Mungkinkah kudeta tampil sebagai satu-satunya pilihan paling logis secara politik untuk mendorong perubahan demokratik?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat memulai dengan menyepakati satu hal. Bahwa tujuan paling mendasar dari kudeta adalah perubahan kepemimpinan di sebuah negara yang dilakukan secara paksa oleh sesama aktor negara.

Narasi yang paling umum digunakan sebagai alasan yang mendorong kudeta adalah harapan bahwa perubahan paksa kepemimpinan nasional dalam bentuk intervensi aktif untuk merehabilitasi salah kemudi kebijakan ekonomi politik sebuah negara. Narasi tersebut umum digunakan gerombolan pelaku kudeta -yang berjumlah kecil- untuk mendapatkan dukungan luas -yang berjumlah besar- dari mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam proses transfer kekuasaan -yang berlangsung secara ilegal- tersebut. Yaitu dengan mengasumsikan bahwa aktor negara yang lain lebih baik dibanding yang lain dalam mengendalikan negara.

Siapakah kelompok kecil pelaku kudeta tersebut?

Dalam praktiknya, kudeta selalu dan hanya mungkin dilakukan oleh militer. Hal tersebut didukung oleh beberapa hal. *Pertama*, militer adalah kelompok memiliki senjata. Ini adalah alat paling efektif untuk memaksa seseorang menyerahkan kekuasaan. *Kedua*, militer memiliki struktur yang tidak hanya hirarkis namun juga ketat, disiplin dan -paling penting- loyal. Hal tersebut mempermudah ketika kudeta diluncurkan. Proses pengambilan keputusan tidak akan melalui proses yang berliku-liku seperti yang umum dialami kelompok sipil politik. *Ketiga*, militer memiliki keuntungan dengan menguasai titik-titik yang strategis secara geografis dan politis. Menguasai lokasi-lokasi tersebut adalah garansi bahwa lawan dapat dilumpuhkan dan respon balasan terhadap kudeta dapat diredam secepatnya.

Kelebihan-kelebihan tersebut adalah simalakama dari keberadaan militer itu sendiri.

Meskipun tujuan utama dan ideal militer sebagai alat perlindungan negara dari ancaman eksternal, dalam banyak kasus militer justru menjadi duri dalam daging bagi keberlangsungan demokrasi. Keuntungan memiliki perangkat koersif melalui peralatan dan personil secara reguler menciptakan bahaya bahwa militer suatu hari akan menjadi anjing yang menggigit tangan yang memberinya makan.

Feaver (1999) berpendapat bahwa secara historis, hubungan sipil-militer sejak awal memang sebuah anomali. Keduanya merupakan dua entitas organisasi yang berbeda secara esensi dan formasi. Hal ini dapat dilacak pada perbedaan tata kelola antara struktur militer dan struktur sipil. Keduanya beroperasi dalam wilayah ideologi yang berbeda dan cenderung bertabrakan. Akibatnya, dibangun semacam ilusi mengenai independensi yang justru menyelimuti ketegangan yang eksis sejak lama. Ketegangan tersebut biasanya meningkat jika salah satu pihak merasa bahwa yang lain sedang melakukan intervensi.

Namun bukan berarti keduanya tidak bisa bertemu. Dalam beberapa kasus kudeta, militer merupakan perpanjangan tangan dari kekuatan sipil yang sedang bertempur memperebutkan pengaruh. Hal ini, misalnya, tampak jelas dalam kasus kudeta paling anyar di Thailand. Tentara melakukan kudeta setelah dipastikan bahwa Raja dan keluarga kerajaan akan memberi-

kan dukungan terhadap aksi tersebut.

Menurut catatan sejarah, kudeta hanya menghasilkan tiga kemungkinan. *Pertama*, transfer kekuasaan antar persona semata yang berasal dari latar belakang politik serupa. Misalnya sebuah kondisi di mana seorang diktator akan digantikan oleh diktator yang lain. Contoh yang bisa diajukan adalah ketika Jendral Yakubu Gowon di Nigeria digantikan Brigadir Mur-tala Muhammad di tahun 1975.

Kedua, ketika kudeta tidak hanya menghasilkan transfer kekuasaan semata tapi kemudian juga menghasilkan perubahan signifikan terhadap identitas ekonomi politik sebuah negara. Jenis kudeta seperti ini biasanya menysasar pemegang kekuasaan yang berasal dari kubu yang berbeda secara haluan politik dan dianggap membahayakan posisi kelompok politik lain. Misalnya ketika Salvador Allende dikudeta dari kursi kepresidenan Chile di tahun 1973.

Ketiga, adalah kudeta yang dianggap membuka jalan terhadap “demokratisasi”. Ini adalah tipe intervensi militer dengan bertindak sebagai pemerintahan transisional sebelum menggelar pemilihan umum sebagai ajang transfer kekuasaan. Walau pada kenyataannya, pemilu pasca kudeta tidak selalu berakhir manis seperti yang diharapkan banyak orang.

Dalam banyak kasus, kecurangan dalam pemilihan selalu jadi isu utama yang muncul ke permukaan. Contohnya adalah ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan kemudian menjadikan pemilihan umum sebagai legitimasi sistem diktatorian militer yang dikomandoinya. Tujuh gelaran pemilihan umum sejak 1968 hingga 1998, adalah ajang yang sudah umum dapat diprediksi hasilnya. Kasus serupa adalah kudeta yang menimpa Manuel Zelaya di Honduras, Juni 2009 yang lalu. Perubahan sikap politik Zelaya dari seorang politisi konservatif dan pendukung kebijakan neoliberal menjadi pendukung ALBA serta menjalin relasi personal dan ekonomi dengan Raul Castro dan Kuba menjadi sebab militer melengserkannya. Pemilu Honduras dilangsungkan setahun sesudah kudeta meski telah diprediksi bahwa ajang ini hanyalah kamuflase kelompok pro-AS untuk memenangkan kembali pengaruh politik mereka.

Ilusi mengenai kudeta yang akan membawa perubahan demokratik adalah sebuah fenomena politik yang menarik.

Dalam catatannya, Nikolay dan Goemans (2014) mengungkapkan bahwa sebagian besar kudeta yang terjadi sebelum 1991, selalu diakhiri dengan berkuasanya diktator baru. Keduanya berpendapat bahwa pola ini tidak lepas dari pengaruh kondisi geopolitik internasional saat itu, yakni Perang Dingin. Sementara sebagian besar kudeta sesudah 1991 umumnya diikuti dengan dihelatnya pemilihan umum. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan ketergantungan ekonomi melalui politik hutang. Pada umumnya negara-negara yang ditimpa kudeta merupakan negara miskin atau berkembang yang sedang mengalami krisis ekonomi atau krisis politik dalam negeri. Negara-negara ini sangat bergantung dengan bantuan hutang dari negara-negara maju di Utara yang pada dasarnya menjadi sponsor dari kudeta tersebut. Di saat yang bersamaan, negara-negara maju tersebut -semisal Amerika Serikat- berupaya untuk menjaga reputasinya dengan menghindari kontak langsung atau terlihat memberikan dukungan terbuka kepada pemerintahan hasil kudeta (Alesina dan Dollar 2000).

Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan di balik berkurangnya frekuensi kudeta pasca Perang Dingin. Yaitu berkembangnya semacam “etika” di antara para donatur kudeta untuk meminimalisir kemungkinan lahirnya diktator baru. Etika ini lahir melalui serangkaian pengalaman mengerikan di Afrika dan Asia (Bermeo 2011). Di mana, para diktator baru hasil praktik kudeta justru memulai periode kekuasaannya dengan berbagai praktik kejahatan terhadap kemanusiaan. Indonesia di tahun 1965 kembali dapat diajukan sebagai contoh, ketika Soeharto dengan dukungan modal memulai kediktatorannya dengan membantai hampir sejuta orang.

Namun, apakah hal tersebut membuat sebuah kudeta dapat dijadikan sandaran menuju demokratisasi?

Menurut Varol (2012), ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah kudeta militer dapat disebut sebagai tindakan demokratis.¹ *Pertama,*

1 Varol mendaftar tujuh prasyarat yang menurut saya dapat disimpulkan ke dalam lima prasyarat. Hal ini terkait lemahnya indikator yang disodorkan Varol untuk membedakan empat prasyarat sehingga kemudian dirangkum ke dalam dua prasyarat.

kudeta ini menyasar sekaligus sebagai upaya untuk melengserkan rezim otoriter. *Kedua*, kudeta yang dilakukan merupakan respon sekaligus partisipasi militer terhadap perlawanan rakyat terhadap rezim. *Ketiga*, kudeta merupakan solusi ketika perlawanan luas (*popular uprising*) terhadap rezim justru tidak ditanggapi. *Keempat*, militer yang melakukan kudeta merupakan sosok atau kelompok yang tidak terkait dengan kejahatan rezim yang menjadi target kudeta. *Kelima*, militer sebagai aktor kudeta kemudian secepatnya menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan bersih agar transfer kekuasaan dapat dimungkinkan sekaligus mengakhiri kudeta.

Namun, pada kenyataannya sulit menemukan kudeta yang dapat memenuhi syarat-syarat di atas. Varol luput melihat bahwa kudeta tidak semata-mata didorong oleh “hasrat” politik untuk melengserkan diktator atau mengganti sistem otoritarianisme. Sebaliknya, kudeta lebih sering justru didorong oleh kondisi di mana militer merasa kepentingan ekonomi dan politiknya terancam.

Mengimajinasikan bahwa militer tampil menyelamatkan demokrasi adalah tindakan yang naif. Karena dengan demikian, kita sedang membayangkan bahwa kudeta adalah praktik yang baik bagi demokrasi.

Jika demokrasi bagi Anda adalah kesetiaan untuk menjalankan agenda-agenda neoliberal, maka kudeta tentu adalah prospek yang menjanjikan. Jika kita menganggap pemilihan umum yang bebas dan demokratis adalah aktivitas yang mahal dan sia-sia, maka kudeta adalah kebutuhan. Jika dalam penilaian kita masyarakat sipil terlalu lemah dan naif untuk mengartikulasikan kebutuhan dan tuntutan ekonomi politiknya, maka jelas militer dibutuhkan sebagai mediator.

Namun pada kenyataannya, kudeta adalah aktivitas yang menciderai demokrasi. Praktik ini tidak dapat dibenarkan dalam skala apapun. Sebab menggulingkan pemerintahan melalui intervensi militeristik merupakan tindakan anti-demokrasi. Secara esensi dan formasi, kudeta jelas berbeda dengan pemberontakan populer yang dipelopori oleh kekuatan sipil.

Mencitrakan militer sebagai “malaikat pelindung” sipil dari pemerintahan

yang korup dan tidak efektif adalah ilusi yang naif, keliru dan berbahaya. Hal tersebut berarti mengorkestrasikan bahwa senjata adalah alat paling efektif untuk mengonsolidasikan dan mengatur barisan sipil. Membiarkan kendali ekonomi dan politik kepada militer juga berarti menyerahkan kebebasan berserikat, mengutarakan pendapat dan berbagai hak asasi lainnya untuk ditukar dengan kepatuhan absolut. Karena sejarah mencatat, seiring naiknya militer ke tampuk kekuasaan maka peti mati demokrasi sedang diturunkan ke liang lahat.

Dan tentu saja, tidak ada masa depan di dalam kuburan...•••

Kepustakaan:

- Alesina, Alberto, and David Dollar. (2000). *Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?* Journal of Economic Growth 5:33–63
- Bermeo, Sarah Blodgett (2011). *Foreign Aid and Regime Change: A Role for Donor Intent.* World Development 39 (11): 2021–31
- Feaver, Peter D. (1999). *Civil-Military Relations*, 2 Ann. Rev. Pol. Sci. 211, 214
- Marinov, Nikolay dan Hein Goemans (2014). *Coup and Democracy.* British Journal of Political Science, 44, hal 799-825
- Varol, Ozan O. (2012). *The Democratic Coup d'Etat.* Harvard International Law Journal, Volume 53, No. 2.

I

Studi Kasus Thailand

Mengapa Demokrasi Melahirkan Kudeta?

Coen Husain Pontoh

SETELAH lebih dari satu dekade menjauhkan diri dari politik praktis, militer Thailand kembali beraksi. Pada 19 September 2006, di bawah komando jenderal Sonthi Boonyaratglin, mereka melancarkan kudeta terhadap Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang terpilih secara demokratis.

Jika pemilu merupakan ukuran paling minimal dari demokrasi, kudeta jelas merupakan tindakan anti demokrasi yang tak bisa dibenarkan atas alasan apapun. Kudeta adalah tradisi politik barbarian, yang percaya bahwa stabilitas dan harmoni sosial bisa diterapkan secara paksa. Padahal kita tahu, korban pertama dan terakhir dari kudeta, selamanya adalah rakyat kebanyakan.

Tetapi, mengapa pemerintahan yang terpilih secara demokratis itu dikudeta?

Berdasarkan pengalaman beberapa negara, jawaban bisa bermacam-macam. Di Brasil pada 1964 atau Chile 1973, kudeta militer terhadap pemerintahan hasil pemilu, sangat dipengaruhi oleh konteks perang dingin yang dilancarkan Amerika Serikat. Dalam kudeta di Thailand ini, pemimpin kudeta mengatakan, “belum pernah dalam sejarah Thailand, rakyat terpecah-belah seperti saat ini. Dan semua ini akibat perbuatan pemerintahan Thaksin.”

Jika pernyataan ini kita terima, maka ada pertanyaan penting di sini. *Pertama*, mengapa demokrasi gagal menyelesaikan problem kesenjangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat Thailand? *Kedua*, mengapa Thaksin baru bisa dijatuhkan melalui kudeta militer?

Dengan bersandar pada artikel Kasian Tejapira, yang berjudul “Toppling Thaksin” yang terbit di *New Left Review*, 39 May/June 2006, tulisan pen-

dek ini coba menjawab dua pertanyaan di atas. Tejapira adalah pengajar ilmu politik di Thammasat University, Bangkok, Thailand.

Kapitalisme Thailand

Untuk memahami kegagalan pemerintahan produk demokrasi dan rangkaian kudeta yang mengiringinya, ada baiknya kita melihat proses berkembangnya kapitalisme Thailand.

Menurut Kasian Tejapira, formasi ekonomi dari kapitalisme modern Thailand, dimulai pada awal dekade 1960an dan masa ketika Amerika Serikat (AS) meluncurkan perang di Vietnam (*Vietnam War*). Proses pembangunan melalui jalan kapitalis ini mengambil bentuk strategi industrialisasi impor (ISI), yang pelaksanaannya dipandu oleh Bank Dunia serta kucuran dana besar-besaran dari AS.

Pada saat yang sama, raja Bhumibol Aduljadei, memaklumkan dirinya sebagai pejuang garis depan gerakan anti komunisme. Sistem politik pun di atur melalui tangan besi militer, atas nama perang melawan komunisme dan stabilitas sosial.

Hasil dari pembangunan kapitalisme dan politik tangan besi ini, dalam empat dekade setelahnya, pertumbuhan ekonomi Thailand meningkat rata-rata tujuh% per tahun. Per kapita GDP meningkat dari \$100 pada 1961 menjadi \$2.750 pada 1995. Pada awal tahun 1980an, kontribusi sektor manufaktur menggeser kontribusi sektor pertanian pada ekspor dan GDP. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara tahun 1980 dan 1984, Perdana Menteri jenderal Prem Tinsulanond, memberlakukan program penyesuaian struktural (SAP) besar-besaran menurut garis Bank Dunia. Program ini meliputi devaluasi mata uang Baht, pembangunan sektor manufaktur berorientasi ekspor khususnya garmen dan tekstil melalui pengintensifikasian tenaga kerja.

Tetapi, sebagaimana kisah di bagian dunia lainnya, pembangunan melalui jalan kapitalis ini melahirkan kesenjangan sosial yang luar biasa dalam ma-

syarakat Thailand. Pada tahun 1996, dari pembagian kue pendapatan nasional, 5% teratas populasi pendapatannya meningkat sebesar 57% dari 49% pada 1976. Sementara itu, 5% terbawah pendapatannya menurun dari 6% menjadi 4% dalam periode yang sama. Setelah empat dekade pertumbuhan cepat pembangunan kapitalisme, Thailand tumbuh sebagai salah satu negara paling timpang di dunia, lebih buruk ketimbang tetangganya di Asia Timur dan Tenggara.

Dari Kediktatoran Menuju Elektokrasi

Seperti biasanya, ketimpangan pembangunan secara perlahan menggerus basis legitimasi kediktatoran. Satu dua bara api perlawanan pun bermunculan. Yang terbesar adalah demonstrasi 6 Oktober 1973 yang kemudian ditindak brutal oleh militer. Brutalisme itu lantas memicu 3.000 pelajar, buruh dan aktivis lari ke hutan dan bergabung dengan gerakan gerilyawan komunis berhaluan Maois. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Thailand, kalangan intelektual radikal perkotaan, bergabung dengan organisasi petani pemberontak di daerah pinggiran.

Sejak saat itu, situasi politik Thailand kian meluruhkan dinding kokoh kediktatoran. Bersamaan dengan munculnya kelas borjuasi dan kelas menengah perkotaan sebagai hasil dari pembangunan kapitalisme, akhirnya pada 1980, di tengah kegagalan politik kediktatoran dan merajalelanya korupsi, keran keterbukaan diberikan secara terbatas. Sistem parlementarian kemudian diperkenalkan sebagai hasil kompromi antara partai-partai borjuis dan militer.

Pelan-pelan kediktatoran militer bergeser ke apa yang disebut Tejapira sebagai Elektokrasi. Yakni, mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen atau menteri, biasanya adalah politisi dengan latar belakang pengusaha cum bos mafia lokal yang tidak peduli dengan agenda nasional dan kebijakan ekonomi makro. Yang penting segera dapat untung secepat-cepatnya. Sekali terpilih, mereka ini segera bertindak layaknya pebisnis: memperjual-belikan kebijakan publik dan membagi konsesi-konsesi politik jangka pendek.

Demokrasi terbatas yang dikuasi oleh para elektokrasi ini berlanjut hingga terjadinya krisis moneter pada 1997, yang kemudian melahirkan reformasi konstitusi yang dikenal sebagai Konsitusti 1997. Sebelumnya, pada 1992 terjadi gerakan politik untuk melawan kekuasaan para elektokrat itu. Tetapi, gerakan ini gagal karena mengalami perpecahan antara kalangan liberal dan demokrat reformis.

Yang *pertama*, datang dari lapis atas masyarakat yang penuh percaya diri sebagai hasil dari pembangunan kapitalis. Mereka ini adalah para kelas pedagang baru, sebagian besar darinya adalah etnis Cina, yang melihat kalangan profesional CEO atau manajer-manajer keuangan lebih bisa dipercaya dalam mengurus kebobrokan birokrasi ketimbang para jenderal dan elektokrat, dan terutama dalam mengelola Thailand di era globalisasi.

Kelompok *kedua*, sebaliknya, lebih menekankan pada “*people’s politics*,” dan berharap akan bisa membangun jaringan kerja nasional dari aliansi organisasi-organisasi lokal, LSM developmentalis, dan intelektual publik di bawah platform egalitarian, komunitas-pedesaan yang berbasis “*self-sufficient economy*.” Kelompok ini memahami politik seperti demonstrasi jalanan, bersifat langsung dan mengusung gagasan demokrasi partisipatoris. Pada saat yang sama, mereka bertujuan mentransformasikan birokrasi negara ke dalam forum publik menjadi negosiasi antara berbagai kelompok kepentingan.

Kekuasaan para elektokrat yang berkoalisi dengan militer itu, baru benar-benar goyah ketika terjadi krisis ekonomi pada 1997. Krisis ini menyebabkan kekuasaan lama gagal dalam melindungi kepentingan bisnis besar: investasi asing kabur, nilai mata uang Baht meluncur jatuh ke titik terendah, sepertiga dari kapitalis besar Thai jatuh bangkrut, ribuan perusahaan tutup, dua pertiga dari bank-bank komersial berpindah tangan, dan satu miliar buruh kehilangan pekerjaannya. Karena itu, krisis 1997 ini tak sekadar menghancurkan keajaiban pertumbuhan ekonomi tapi, juga berimbas pada reformasi politik yang bertujuan menyingkirkan kaum elektokrat yang ditandai dengan reformasi Konstitusi 1997.

Pada masa-masa krisis ini, Thailand semakin tergantung pada resep-resep ortodoksi-neoliberal yang didiktekan IMF untuk memulihkan krisis. Da-

lam masyarakat sendiri, muncul perbedaan cara pandang dalam pemulihan krisis. Borjuasi besar kini tak dapat lagi menjalankan usahanya tanpa menempel pada partner multinasionalnya; adapun kalangan buruh menilai kini saatnya Thailand menjalankan strategi nasionalisme ekonomi untuk melawan kebuasaan mekanisme pasar yang terbukti telah menggiring ekonomi Thailand ke dalam krisis. Sementara kelas menengah bersifat mendua: di satu sisi mereka melihat peluang yang disediakan oleh ekonomi terbuka dan pasar bebas tapi, krisis 1997 juga telah menghantam peluang ekonomi yang sebelumnya mereka nikmati.

Pada masa-masa inilah Thaksin Shinawatra, sang konglomerat industri informasi menancapkan karir politiknya. Mula pertama ia bergabung dengan Partai Phalang Tham (Kekuatan Moral). Tak lama kemudian Thaksin sukses mengambilalih kepemimpinan partai dari tangan mayor jenderal Chamlong Shrimuang. Pada Juli 1998, Thaksin mendirikan partainya sendiri yang dinamai Thai Rak Thai Party, dan memutuskan bertarung dalam pemilu pertama di bawah Konstitusi 1997, pada Januari 2002.

Untuk mendukung popularitasnya, Thaksin merekrut mantan 700 aktivis yang bertugas sebagai tim kampanye. Tim ini kemudian menelurkan program-program populis kepada rakyat, jika Thaksin terpilih sebagai Perdana Menteri. Hasilnya menakjubkan, TRT memenangi 11 juta suara dan 248 kursi di parlemen. Thaksin pun dilantik sebagai Perdana Menteri.

Guna mengamankan kekuasaannya, Thaksin menjalankan empat strategi sekaligus. *Pertama*, ia menjalankan proses neoliberalisasi ekonomi Thailand seperti, privatisasi dan liberalisasi besar-besaran. Dengan cara ini, ia aman dari rongrongan para spekulan pasar internasional. *Kedua*, ia membagi-bagi kekuasaannya di kalangan kapitalis kroni. Misalnya, ia merekrut Sondhi Limthongkul alias Li Ming Da, mantan aktivis kiri yang kemudian beralih menjadi konglomerat media di masa gelembung ekonomi. Sondhi pemilik Manager Media Group yang mendukung habis-habisan kampanye Thaksin dengan mengerahkan seluruh armada industrinya. Hasilnya, ketika Thaksin menjadi PM, ia merekrut kaki tangan Sondhi ke dalam jabatan-jabatan strategis pemerintahannya. Misalnya, menteri perdagangan dan keuangan, Somkid Jatusripitak, adalah *co-founder* Manager Media Group. Atau kepala penasihat kebijakannya, Pansak Vinyaratn, adalah e-

ditor Asia Times, koran milik Sondhi.

Selanjutnya, untuk menjaga dukungan di tingkat bawah, khususnya di kalangan petani, Thaksin meluncurkan serangkaian kebijakan populis: pinjaman-mikro, bantuan uang bagi petani, pemangkasan sebesar 30 baht bagi setiap kunjungan ke rumah sakit. Ia juga membentuk the Village and Urban Community Fund, untuk membiayai sekitar 4000 komunitas perkotaan dan 7000 komunitas pedesaan di seluruh Thailand.

Keempat, ia menjalankan politik tangan besi terhadap kalangan oposisi, terutama dari kalangan Muslim di Selatan Thailand.

Dengan kebijakan demikian, untuk sementara Thaksin berhasil mengamankan kekuasaannya, sekaligus mengamankan perilaku korup dari keluarganya. Ia bahkan bisa mendikte kekuasaan kehakiman yang mencoba mengusut dugaan korupsi, pemerasan, dan pencucian uang yang dilakukan oleh kroni-kroninya. Ketika diadakan pemilu pada Februari 2005, TRT mengalami peningkatan signifikan dengan memenangkan 19 juta suara dan memenangkan kursi mayoritas di parlemen, 377 dari 500 kursi.

Pondasi yang Rapuh

Tetapi, kekuasaan kuat Thaksin sesungguhnya berdiri di atas pondasi ekonomi yang sangat rapuh. Walaupun, kebijakan populisnya telah mendatangkan dukungan besar dari kaum tani tapi sejatinya kebijakan tersebut tidak menambah tinggi tingkat pendapat kelompok tersebut. Hasil survey tahun 2002 menunjukkan, 500 ribu petani kehilangan tanahnya, 70% dari seluruh populasi tetap hidup di daerah pinggiran, dan 60% pendapatan mereka diperoleh dari pekerjaan di luar sektor pertanian.

Kesenjangan regional juga tetap tinggi. Pada 2004, Bangkok dengan populasi sebanyak 17% dari keseluruhan populasi Thailand, menikmati 44% dari GDP. Di kota-kota besar lainnya, dengan 17% populasi menikmati 27% GDP. Sebaliknya, di Selatan, dengan 14% populasi hanya menerima 9% dari GDP, di pegunungan dengan 34% populasi hanya menerima 11%

dari GDP. Kesenjangan antar sektor juga tinggi: pertanian dengan menampung 42% tenaga kerja, hanya menerima 10% GDP. Sementara di perko-taan dengan 21% tenaga kerja menerima 41% GDP, dan sektor jasa dengan 37% tenaga kerja menerima 50% GDP.

Di kalangan rejim lama, khususnya militer, pelayan sipil dan teknokrat, intelektual liberal, pengacara, dan aktivis LSM, kebencian terhadap rejim Thaksin juga sangat tinggi. Gaya kepemimpinan khas pedagang, korupsi, kroniisme, nepotisme, pemerasan, pembunuhan ekstra-yudisial, dan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis, menjadi sumber utama kebencian kelompok ini. Barisan sakit hati ini pada akhirnya tiba pada kesimpulan: *“Thaksin-Ok Pai, Thaksin Out.”*

Tetapi, seperti ditulis Kasian Tejapiran, seluruh kalangan oposisi ini sesungguhnya memiliki pandangan politik yang sangat beragam. Sondhi Limthongkul, mantan kroni yang beralih menjadi oposan, misalnya, malah menyeru kepada raja agar mau mengambilalih tanggung jawab dari tangan Thaksin. Di kalangan gerakan sosial, LSM, misalnya, dukungan dari kelompok arus bawah sangatlah kecil. Kalangan akar rumput ini, terutama di pedesaan, malah merupakan basis utama pendukung Thaksin. Terbukti dengan hasil referendum pada 3 April 2006, dimana Thaksin memperoleh 56% suara dari 16 juta pemilih. Referendum ini digelar setelah serangkaian demonstrasi besar sejak September 2005, menuntut Thaksin agar mundur dari jabatannya.

Dengan demikian, hanya ada dua kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Thaksin: raja yang merupakan simbol abadi kekuasaan rakyat Thailand, dan militer. Tetapi raja selalu mengambil jalan aman dari seluruh rangkaian pergolakan politik, yang menempatkan posisinya sebagai bapak bagi semua. Tinggal militer yang berpotensi menggulingkan Thaksin. Dan itulah yang mereka lakukan, ketika Thaksin tengah menghadiri sidang umum PBB di New York.***

Sumber: <http://indoprogress.com/2006/09/mengapa-demokrasi-mela-hirkan-kudeta/>

Implikasi Politik Dari Reformasi Di Thailand

Luky Djani

BANGKOK awal Juni 2010, tak menunjukkan wajah muram ataupun mencekam. Padahal, seminggu sebelumnya, terjadi bentrokan antara massa Kaus Merah dan tentara. Bentrokan politik yang tak dapat dihindari. Kekacauan politik di Thailand kali ini adalah yang terburuk sejak aksi pelajar mengguncang dan melawan rezim militer tahun 1973, dengan puluhan korban jiwa dari pihak demonstran dan tentara.

Media serta pemerhati politik sering melabelkan *people power* dengan sebutan “*color revolutions*,” yang merujuk pada identitas warna kaus atau atribut yang dikenakan oleh massa gerakan tersebut. Uniknya, di Thailand, gelombang protes dilakukan silih berganti antara Kaus Merah dan Kaus Kuning sejak tahun 2005 lalu. Akibatnya, politik Thailand berada dalam pusaran gejolak politik berkepanjangan.

Apa yang menyebabkan berulangnya episode *contentious politics* di Thailand? Bagaimana kita memahami rangkaian ini dalam bingkai politik elit dan gerakan rakyat? Tulisan ini akan mengulas faktor-faktor penyebab krisis politik serta relevansinya dengan politik masyarakat sipil di Indonesia.

Akar Gejolak Politik

Aksi dibalas aksi menjadi langgam politik sehingga memicu konflik politik berkelanjutan. Setelah berjalan hampir dua tahun, gelombang protes People's Alliance for Democracy (PAD) -koalisi yang sejak awal gencar mendongkel Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra-, berujung pada *kebiasaan* politik Thailand: kudeta militer yang terjadi pada September 2006. Jenderal Sonthi Boonyaratglin, mengambil alih pemerintahan Thai Rak

Thai (TRT) pimpinan Thaksin.

Setelah kudeta, eskalasi politik tidak menurun. Aksi kudeta justru berhasil memicu gelombang aksi balasan yang dilancarkan oleh pendukung Thaksin, yang bertujuan merongrong junta militer. Untuk meredam situasi sekaligus memulihkan nama Thailand di mata internasional, junta militer menyelenggarakan pemilu di bulan Desember dengan tergesa-gesa. Namun, krisis politik ternyata tidak berhenti setelah pemilu diadakan.

Pemilu Desember 2007 mencatatkan kemenangan mayoritas People's Power Party (PPP) yang didirikan oleh para pendukung Thaksin dan dianggap sebagai jelmaan TRT. PPP yang dipimpin oleh Samak Sundaravej segera bergegas membentuk koalisi pemerintahan bersama beberapa partai lainnya. Samak kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri.

Tapi kemenangan PPP dalam pemilu mendapatkan respon negatif dari pendukung PAD yang menuduh bahwa telah terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemungutan suara. PAD kemudian mengumumkan secara terbuka penolakan mereka terhadap hasil pemilu. Pernyataan tersebut menandai dimulainya kembali gelombang protes di ibukota Thailand, Bangkok.

Menyadari besarnya dukungan PPP yang diterima dari basis petani dan pekerja, membuat PAD berupaya mendapatkan dukungan dari keluarga kerajaan untuk melegitimasi manuver intervensi politik yang sedang dilakukan. Salah satu taktik yang digunakan PAD adalah dengan menggunakan warna kuning, yang diidentikkan dengan Raja Bhumibol. Tuntutan PAD – yang dikemudian hari lebih populer dengan sebutan Kaus Kuning – adalah pelucutan kekuasaan politik PPP dan memaksa Samak mundur dari posisi Perdana Menteri.

Di tengah kisruh politik, Mahkamah Agung Thailand mengambil keputusan untuk menganulir status Samak sebagai Perdana Menteri. Imbas keputusan ini adalah pelucutan hak PPP untuk memerintah yang kemudian membuka jalan terbentuknya pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh partai Demokrat, lawan politik Thaksin. Pemerintahan koalisi ini menempatkan Abhisit Vejjajiva sebagai Perdana Menteri.

Episode selanjutnya dapat ditebak.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut memicu kekecewaan massa pendukung PPP. Bersama dengan kelompok minoritas lain, mereka kemudian mendirikan United Front for Democracy against Dictatorship (UDD) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kaus Merah. Penggunaan warna merah diasosiasikan sebagai upaya perjuangan demokrasi menuntut pemilihan yang bebas intervensi kerajaan dan militer.

UDD mengerahkan pendukung mereka dan menyerbu Bangkok. Massa pendukung Kaus Merah kembali menduduki daerah sekitar Lumpini Square. Mereka menolak pemerintahan koalisi demokrat dan berujung pada “Sabtu kelabu” yang merenggut korban lebih dari 90 jiwa.

Sepintas, dalam benak publik di luar Thailand, konflik ini sering dipahami bermula dari skandal korupsi gurita bisnis Thaksin Shinawatra. Sebagian menilai aksi-aksi ini sebagai bentuk kontestasi kaum reformis dan *status quo*. Gerakan Kaus Kuning acap diasosiasikan dengan kelas menengah Bangkok, yang menuntut penuntasan skandal korupsi dan *clean politics*. Sedangkan Kaus Merah ditengarai merupakan representasi kelas bawah, umumnya petani, dari wilayah timur laut dan utara Thailand, yang merupakan daerah asal Thaksin. Tetapi ada juga yang menganalisisnya sebagai pertentangan kelas (Callahan 2005).¹ Saya sendiri berpendapat, rangkaian gejolak politik Thailand sangat terkait dengan proses politik pada dekade sebelumnya.

Ada dua argumen sentral yang disodorkan oleh beberapa ahli politik Thailand dan Asia Tenggara, dalam menganalisa rangkaian gejolak politik ini. Yang *pertama*, analisis bahwa reformasi politik Thailand di pertengahan 90an sampai puncaknya saat krisis ekonomi 1997 ironisnya berujung pada krisis politik (Callahan 2005, Kuhonta 2008, Prasirtsuk 2007). Pandangan *kedua* adalah pertarungan kekuatan antara “*old capital*”, segitiga monar-

1 Salah satu yang menyoroti dari sudut pandang ini adalah Giles Unpakorn, pelarian politik yang menetap di Inggris. Lihat <http://www.youtube.com/watch?v=Bx9vP12-4o0&feature=related>

ki-militer-kapitalis birokrat, dan “*new capital*”, di antaranya *business-politician* (seperti Thaksin) dan pengusaha pribumi nasional (Hewison 2005, Prasirtsuk 2007). Konflik juga dipicu oleh ketimpangan pembangunan ekonomi di Thailand (Glassman 2010).

Tulisan ini merangkum kedua analisis di atas sebagai dimensi yang bertautan dalam memahami akar dari krisis politik Thailand.

Reformasi Politik

Kembalinya rezim pemerintahan sipil pasca demonstrasi berdarah Mei 1992, yang memaksa militer mundur dari panggung politik, justru menghadirkan “spesies” baru dalam politik Thailand, yakni *species politico-business* yang menggantikan *bureaucratic polity*, yang selama puluhan tahun bercokol dalam nadi politik Thailand. Munculnya *politico-business* ini mengubah wajah perpolitikan negeri Gajah Putih itu. Para politikus sipil bertumpu pada basis-basis konstituen dalam jaringan patronase yang dikendalikan oleh *local strongmen* serta *jao pho* dengan sokongan pengusaha lokal (Callahan 2005, Prasirtsuk 2007). Dengan sistem pemilihan *majoritarian* (istilah populer di Indonesia adalah sistem distrik), para politikus ini menancapkan dominasinya. Praktek *vote-buying* (perdagangan suara) tidak saja menjadi marak tetapi juga menjadi instrumen sentral dalam kemenangan pemilu.

Di parlemen, pakem berubah. Sebelumnya politik parlemen diselenggarakan berdasarkan kendali rezim militer dan birokrat, dimana parpol dan politikus sekadar menjadi figuran dalam kancah politik. Pasca rejim militer, politikus adalah pemain utama. Partai politik kehilangan soliditas dan kontrol atas politikus. Dinamika parlemen lebih berdasarkan kaukus kedaerahan maupun sektoral lintas partai. Pemerintahan dan anggota kabinet ditentukan oleh kaukus dan faksi-faksi di parlemen. Persaingan antar kaukus politik mengakibatkan pemerintahan tidak stabil. Kelompok-kelompok politik saling jegal demi menjadi anggota kabinet pemerintahan, sebagai jalur cepat memperoleh rente. Satu-satunya cara menjaga pemerintah dari mosi tak percaya parlemen adalah dengan mengangkat

pentolan kaukus sebagai menteri maupun posisi strategis lainnya ataupun melalui transaksi “beli-putus” (Kuhonta 2008, Ockey 1994).

Wajah politik inilah yang memicu kegusaran para pemerhati politik, akademisi serta kelas menengah di Bangkok. Kegundahan melihat korupsi yang melilit penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang dipenuhi perkoncoan, serta perdagangan suara di pedesaan (khususnya daerah utara Thailand), memicu munculnya desakan reformasi politik dari kelas menengah Bangkok (yang termasuk dalam wilayah administratif Bangkok Metropolitan Region/BMR). Meluasnya kegusaran itu memaksa pemerintahan PM Chuan Leekpai, membentuk Democracy Development Committee (DDC). Tujuannya menyusun *grand design* reformasi tatanan politik Thailand. Lembaga ini diketuai oleh Dr. Prawase Wasi² (Kuhonta 2008, Prasirtsuk 2007). Rekomendasi dari DDC kemudian diadopsi oleh Constitution Drafting Assembly (CDA), dengan mereformasi sistem politik Thailand yang bertujuan untuk memastikan mekanisme *check and balance* berjalan, penguatan parpol, menghilangkan dominasi birokrasi (termasuk militer) serta mengamputi praktek korupsi. Upaya reformasi ini kemudian dituangkan pada satu paket hukum yang lebih dikenal dengan nama Konstitusi Rakyat yang ditetapkan tahun 1997 (Kuhonta 2008).

Satu poin penting adalah mereformasi partai politik dan memperkuat basis politik pemerintahan. Sistem pemilu dalam Konstitusi Rakyat diubah menjadi *mixed system* yakni *majoritarian* dan *party-list* (proportional) serta 5% *electoral threshold*. Juga dibuat aturan yang mensyaratkan calon legislatif (caleg) harus menjadi anggota parpol minimal 90 hari sebelum dinominasikan sebagai peserta pemilu. Tujuannya jelas untuk mencegah politikus lompat pagar ke parpol yang dinilai akan memenangi pemilu (Kuhonta 2008). Selain itu, parpol juga memiliki hak menentukan penempatan anggota dewan pada badan-badan kelengkapan parlemen, yang mana “hak prerogatif” ini tadinya dipegang oleh para penguasa kaukus (Prasirtsuk 2007).

2 Menurut Erik Martinez Kuhonta, Prawase Wasi merupakan intelektual yang dekat dengan kerajaan dan memiliki pandangan politik konservatif.

Untuk memastikan berjalannya *checks and balances*, konstitusi mendirikan dua perangkat. Yang *pertama* adalah Senat, yang berfungsi untuk “menilai” produk perundangan dari parlemen. Para senator ini adalah calon perseorangan non partai yang dipilih dari tiap provinsi, mirip DPD di Indonesia. Perangkat *kedua* adalah kehadiran beberapa lembaga *state auxiliary* seperti KPU, National Counter Corruption Commission (NCCC), Mahkamah Konstitusi serta PTUN. Lebih jauh, publik bisa menggunakan petisi yang ditandatangani oleh sekurangnya 50 ribu orang dan diserahkan pada NCCC untuk mencopot pejabat tinggi maupun politisi yang dinilai bermasalah.

Terobosan lainnya adalah pengangkatan menteri. Jika sebelumnya anggota parlemen yang didukung oleh kaukus maupun faksi tertentu bisa menjadi menteri, maka dalam tatanan baru, pengangkatan menteri sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri. Menteri kabinet dipilih dari anggota parlemen yang kemudian harus meletakkan jabatan di lembaga legislatif.³ Tujuannya untuk memisahkan kaitan antara eksekutif dan legislatif, sehingga menguatkan pemerintah agar tidak dengan mudah bisa digoyang oleh mosi maupun tuntutan dari kaukus dan faksi-faksi di parlemen (Kuhonta 2008, Prasirtsuk 2007). Alasan lain adalah memotong sumber finansial bagi para elit politik di kaukus. Tanpa menduduki jabatan di kabinet, maka politikus kehilangan akses atas dana publik dan *privilege* lain, sehingga mereka diyakini akan sulit mempertahankan hegemoni di daerah pilihannya (Glassman 2010, Ockey 2007, Hewison 2004).

Poin berikutnya adalah untuk memotong pengaruh birokrasi sebagai pemain politik. Hal ini didasarkan pada fakta politik bahwa birokrasi Thailand, semenjak tahun 1930an, merupakan pemain sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan (Riggs 1960). Kerjasama birokrasi dengan militer dan penguasa lokal membuat kekuasaan menjadi nyaris tak terbatas (Ockey 2007). Desentralisasi secara tidak langsung mengurangi peran birokrasi. Di lain pihak pengangkatan dan penempatan birokrasi berada

3 Thaksin mengangkat semua anggota kabinet pada masa pemerintahan pertamanya dari anggota parlemen yang dipilih melalui party-list system. Bahkan pada periode kedua, 27 dari 35 anggota cabinet bukan berasal dari anggota parlemen.

di tangan Perdana Menteri melalui menteri-menteri kabinet. Politisasi birokrasi oleh politisi lokal serta anggota dewan menjadi berkurang, akan tetapi birokrasi kini sepenuhnya di bawah kendali Perdana Menteri (Prasirtsuk 2007).

Untuk menghilangkan perdagangan suara –yang dianggap sebagai musuh utama bagi demokrasi Thailand– maka serangkaian perubahan ditempuh. Pandangan mainstream dalam memahami fenomena *vote-buying* melihat pemilih, khususnya di pedesaan, tidak memahami esensi dari demokrasi elektoral serta terbelenggu dalam kendali patron. Dalam artikelnya yang berpengaruh, Anek Laothamatas –akademisi yang kemudian menjadi politikus– menganalisis bahwa pemilih di luar ‘Bangkok’ memiliki pemahaman lain akan demokrasi (Laothamatas 1996).

Pandangan ini menilai bahwa perdagangan suara secara sempit merupakan masalah hukum sehingga dalam penyusunan konstitusi, solusi dirancang melulu dengan pendekatan legal-teknis. Untuk mengatasinya, serangkaian regulasi diberlakukan dengan tujuan mempersempit ruang untuk transaksi suara. Instrumen lain adalah dengan menyelenggarakan pendidikan pemilih sehingga pemilih “paham” akan esensi pemilu. Pendekatan, yang dalam bahasa Callahan, sebagai *constitutionalism* ini tidak melihat akar masalah relasi politik-ekonomi yang membelenggu pemilih (Callahan 2005). Terpuruk dalam kemiskinan menyebabkan pemilih terhegemoni oleh patron sehingga tidak mengherankan jika suara mereka kerap diperjualbelikan.

Implikasi dari Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi memberi peluang pada kelompok bisnis yang mampu bertahan pasca krisis untuk mendominasi ranah ekonomi. Ditambah dengan reformasi politik, kelompok ini menemukan pintu masuk untuk memperluas dominasi termasuk ke ranah politik. Para taipan industri manufaktur ini berhasil melewati masa krisis, karena mendapatkan proteksi pemerintah serta relatif terbebas dari privatisasi dengan modal dari luar (Prasirtsuk 2007).

Paket kebijakan politik-ekonomi rezim Thaksin yang menentang kebijakan neo-liberal dengan memajukan kebijakan populis nasionalis. Thaksin memadukan proteksi ekonomi bagi kapitalis lokal dengan program-program populis dengan sasaran utama rakyat di pedesaan. Thaksin memberi insentif dan kemudahan bagi *entrepreneur* domestik untuk bersaing dengan kapitalis asing. Hanya saja, yang menikmati kemudahan tentu saja hanyalah kroni-kroninya (Hewison 2005, Prasirtsuk 2007). Contoh nyata adalah pemberian konsesi dan akses pada bank-bank pemerintah kepada para taipan yang bergerak di bidang telekomunikasi, media, otomotif serta transportasi (Prasirtsuk 2007).

Di lain pihak Thaksin ‘membiarkan’ privatisasi bank-bank swasta yang selama ini menjadi sumber modal bagi “old capital”. Seperti yang dialami Bangkok Bank, Thai Farmers Bank, Thai Military Bank, yang kini dikuasai oleh investor asing umumnya dari Singapura. Dengan demikian, bank-bank ini tidak bisa lagi dengan mudah memberikan kredit ringan kepada perusahaan-perusahaan yang tergolong “old capital”. Taktik ini diambil karena pemerintah Thaksin sendiri tidak memiliki ketergantungan pada bank-bank swasta baik dalam pembiayaan pembangunan maupun untuk operasi politik. Sebabnya karena para taipan “new capital” mempunyai cukup modal untuk membiayai aktivitas politik mereka (Prasirtsuk 2007).

Thaksin juga merombak Southern Border Provinces Administration Center (SBPAC)⁴ selatan yang berbatasan dengan Malaysia. Wilayah selatan Thailand dalam beberapa dasawarsa belakangan, selalu menjadi daerah rawan pergolakan akan tuntutan merdeka dari minoritas Muslim. Perubahan SBPAC berdampak pada basis dukungan politik partai demokrat serta militer (Glassman 2010).⁵

Beragam program populis diimplementasikan rezim TRT, diantaranya

4 Semacam otoritas khusus yang menaungi wilayah Thailand bagian selatan.

5 Jenderal Sonthi yang memimpin kudeta merupakan panglima keamanan wilayah Thailand selatan. Militer Thailand ditenggarai menikmati keuntungan dari konflik bersenjata berkepanjangan. Selain itu, wilayah Thailand selatan selama puluhan tahun merupakan basis partai Demokrat yang merupakan partai oposisi terbesar dari TRT.

pengobatan murah (30 bath), penghapusan hutang para petani, dana pembangunan pedesaan (1 juta bath per desa). Kebijakan populis ini ditujukan tidak hanya untuk meraih simpati pemilih pedesaan, tetapi juga untuk memotong pengaruh dan dominasi para penguasa lokal. Tanpa akses pada proyek-proyek pemerintah, para *local boss* ini kehilangan pengaruh dan mesin patronase mereka (Prasirtsuk 2007). Selain itu kampanye “war on drugs” ditujukan untuk melucuti kekuatan finansial para *jao pho* yang kerap bersinergi dengan *local boss* (Glassman 2010, Prasirtsuk 2007).

Upaya reformasi melalui perubahan tatanan politik Thailand tanpa disadari justru melahirkan rejim politik “baru” yang berujung pada konflik politik berkepanjangan. Para arsitek reformasi politik Thailand sepertinya terhenyak saat menyadari bahwa upaya mereka menghilangkan korupsi dan “politik uang” tidak saja membuat praktek penyimpangan ini beralih wujud (Callahan 2005, Prasirtsuk 2007), tetapi yang terpenting adalah munculnya rejim politik baru yang sangat kuat dan mengakar pada fondasi sosial-politik-ekonomi Thailand (Hewison 2005, Prasirtsuk 2007). Thaksin adalah satu-satunya Perdana Menteri dalam sejarah Thailand yang berhasil mempertahankan kekuasaan dan terpilih kembali dengan dukungan suara mayoritas. Kekuasaan menjadi terpusat di TRT dan Thaksin.

Pelajaran untuk Indonesia

Demokrasi Thailand, sebagaimana di Indonesia, baru sebatas arena pertaruhan antar elit. Kisruh politik Thailand merupakan manifestasi dari perebutan kekuasaan antar kelompok elit- “old capital vs new capital”. Komponen Kaus Kuning yang terdiri dari aliansi monarki, militer, birokrasi, pengusaha serta kelas menengah Bangkok. Militer, birokrasi dan monarki merasa peran politik mereka terpinggirkan pasca pemberlakuan Konstitusi Rakyat. Kaum elit ini bersama dengan pengusaha⁶ (baik nasional maupun provinsi) kehilangan sumber dana untuk menunjang operasi politik serta bisnis mereka.

6 Sondhi Limthongkul tokoh kontroversial anggota Presidium PAD mulanya adalah kroni dan kawan Thaksin. Kabarnya, bisnis Manager Group Sondhi dililit hutang, tapi Thaksin tidak membantunya. Ujungnya mereka pecah kongsi.

Akan tetapi, konflik antara Kaus Merah versus Kaus Kuning ini juga bisa dipandang sebagai pertentangan antara kelas bawah (petani, nelayan dan buruh perkotaan) menghadapi kelas menengah serta kelas elit. Menguatnya identitas dan solidaritas di antara simpatisan Kaus Merah merupakan kerja panjang dari beberapa elemen organisasi non pemerintah serta aktifis gerakan sosial. Eksponen yang terpenting adalah ‘Octobrists’,⁷ Assembly of the Poor (AOP) dan NGO-CORD. Kelompok inilah yang mendesain program-program populis dari rejim TRT serta mengaitkan mesin politik TRT dengan kantong-kantong massa di pedesaan dan perkotaan (Kitirianglap dan Hewison 2009, Tejapira 2006).

Dengan tawaran program-program populis, para pemilih pedesaan dan miskin kota memilih secara rasional *platform* dan program partai yang mereka anggap mewakili kepentingan masyarakat kelas bawah (Callahan 2005). Warga pedesaan di bagian utara Thailand, sejak awal 70an telah dianaktirikan oleh pembangunan yang melulu bertumpu pada industrialisasi di BMR. Sehingga tidak mengherankan, pada pemilu tahun 2005 (periode kedua Thaksin), TRT bisa meraup di atas 90% suara pemilih di wilayah utara dan timur laut. Dan yang mencengangkan, perolehan suara di atas 80% di daerah BMR dan bagian tengah Thailand dengan seperangkat kebijakan populisnya (Glassman 2010). Begitu pun saat demonstrasi, Kaus Merah didukung oleh para petani dari utara serta kaum miskin kota di Bangkok. Fenomena mulai mengkristalnya identitas kelas dalam politik Thailand tidak terlepas dari peran aktivis gerakan sosial.

Sayangnya gerakan dari sebagian *civil society* ini tidak dibarengi dengan kelas menengah Bangkok. Mereka inilah yang justru mendukung reformasi politik yang berujung pada konflik politik yang berkepanjangan serta mendukung “old capital”. Kelas menengah ini, yang tidak sabar ingin menghadirkan *clean politics*, justru secara tidak sadar mendukung politik usang yang juga sarat dengan penyimpangan. Harapan dari kasus Thailand

7 Octobrists adalah kelompok yang disegani dalam lingkup gerakan sosial di Thailand. Mereka merupakan ‘veteran’ aktivis pelajar yang memberontak melawan rejim militer tahun 1973 dan memilih lari ke hutan dan bergabung dengan gerilyawan komunis. Untuk detilnya liat Tejapira (2006). Keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan gerakan sosial secara detil dapat dilihat di Kitirianglap dan Hewison (2009).

adalah kelas menengah dan masyarakat sipil di Indonesia, mampu melihat peluang perubahan untuk mentransformasikan relasi politik dan ekonomi secara fundamental.***

Kepustakaan:

- Glassman, Jim (2010). *The Provinces Elect Governments, Bangkok Overthrows Them: Urbanity, Class, and Post-Democracy in Thailand*. Urban Studies 47, Issue 6.
- Hewison, Kevin (2005). *Neo-liberal and Domestic Capital: the Political Outcomes of the Economic crisis in Thailand*. Journal of Development Studies 41, Issue 2.
- Kitirianglap, Kengkij and Kevin Hewison (2009). *Social Movements and Political Opposition in Contemporary Thailand*. The Pacific Review 22, No. 4.
- Kuhonta, Erik Martinez (2008). *The Paradox of Thailand's 1997 "People's Constitution"*. Asian Survey 48, Issue 3.
- Laothamatas, Anek (1996). A Tale of Two Democracies: Conflicting Perceptions of Elections and Democracy in Taylor, R. (ed) *Thailand, The Politics of Elections in Southeast Asia*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Ockey, James (1994). *Political parties, Factions and Corruption in Thailand*. Modern Asian Studies 28, No. 2.
- Ockey, James (2004). *State, Bureaucracy and Polity in Modern Thai Politics*. Journal of Contemporary Asia 34, Issue 2.
- Prasirtsuk, Kitt (2007). *From Political Reform and Economic Crisis to Coup*

D'état in Thailand: The Twists and Turns of the Political Economy, 1997-2006. Asian Survey 47, Issue 6.

Riggs, Fred (1966). *Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity.* Honolulu: East-West Center.

Tejapira, Kasian (2006). *Toppling Thaksin.* New Left Review 39, Issue May-June.

Sumber: <http://indoprogress.com/2011/02/implikasi-politik-dari-reformasi-di-thailand/>

“Kaus Merah”: Mencari Penjelasan

Coen Husain Pontoh

KONFLIK politik yang terjadi di Thailand saat ini sedang memasuki masa-masa yang panas membara. Ribuan demonstran yang menamakan dirinya “Kaus Merah,” yang hampir dua bulan ini bertahan di jalan-jalan kota Bangkok, terlibat bentrok berdarah dengan pasukan militer dan polisi Thailand bersenjata senapan otomatis M16, pasukan tank, dan mobil penyemprot gas air mata.

Laporan resmi terakhir menyebutkan, akibat bentrokan itu sekitar 16 orang tewas dan 140 lainnya terluka. Jika ditambah dengan korban tewas sejak demonstrasi meletus pada pertengahan Maret lalu, jumlahnya mencapai 46 orang. Sementara jumlah korban luka-luka lebih dari 1400 orang. Dengan belum dicapainya jalan keluar dari konflik ini, kemungkinan jumlah korban jatuh akan terus bertambah.

Dihadapkan pada situasi ini, rakyat Thailand terbelah atas tiga kelompok: *pertama*, mereka yang pro The United Front for Democracy against Dictatorship (UDD), yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Kaus Merah”; *kedua* mereka yang mendukung kelompok elit royalis (istana, pemerintahan Abhisit Vejjajiva yang didukung oleh militer, media massa *mainstream* dan sebagian LSM); dan kelompok *ketiga* adalah mereka yang memilih bersikap netral yang muncul dari kalangan menengah terdidik dan beberapa LSM.

Saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebab-sebab kemunculan kelompok Kaus Merah yang militan ini. Saya sengaja fokus pada kelompok ini, karena muncul salah paham luar biasa terhadap kelompok ini yang secara sederhana dituduh sebagai pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Siapa Yang Disebut Kaus Merah?

Dengan meledaknya konflik terbuka saat ini, menurut Veronai Vajinaka, editor harian berbahasa Inggris *Bangkok Post*, kelompok Kaus Merah ini tidak pantas lagi disebut sebagai kelompok prodemokrasi yang mengusung tuntutan-tuntutan demokratik. Mereka lebih tepat disebut kelompok pemberontak, dimana tujuan utama gerakannya adalah menjatuhkan pemerintahan yang sah.

“It’s an uprising. It’s a rebellion. It’s criminal”, ujar Vajinaka, dan karenanya mereka pantas dihukum seberat-beratnya oleh pemerintahan Vejajiva.

Di lain pihak, militansi massa miskin perkotaan dan pedesaan ini dalam melawan pemerintahan korup yang didukung militer, telah sanggup memblejeti perangai LSM Thailand yang sok netral, yang mengusung agenda dialog guna memoderasi aksi-aksi damai militan di jalanan ke meja perundingan. Sebuah sikap yang sesungguhnya ingin menutupi wataknya yang anti gerakan massa. Dengan sikapnya yang netral, para aktivis LSM ini telah menempatkan massa rakyat miskin perkotaan dan pedesaan itu dalam satu nampan dengan elit korup yang bersekutu dengan militer: sama-sama tidak mau mengalah, sama-sama tukang provokasi, sama-sama busuk, dan sama-sama anti gerakan damai.

Tuduhan bahwa kelompok Kaus Merah adalah pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra, bukan tanpa alasan. Tetapi menyederhanakan tujuan aksi Kaus Merah ini adalah mengembalikan Thaksin ke kursi PM juga adalah kesalahan luar biasa. Personalisasi politik bisa memudahkan penjelasan awal tapi sekaligus menghina pendukung Kaus Merah sebagai massa yang bodoh dan tamak karena berjuang hanya demi uang baht hasil belas kasih Thaksin yang kini hidup mewah di tanah pengasingan, Montenegro. Ini persis sama dengan tuduhan tentara NICA yang menganggap rakyat Indonesia bangkit melawan hingga berkalang tanah karena dibodoh-bodohi oleh Sukarno.

Akar dari militansi ini sejatinya adalah kemiskinan parah yang diderita oleh mayoritas rakyat Thailand. Ketika ekonomi Thailand bertumbuh di rata-rata 7% per tahun sebelum dihantam krisis ekonomi 1997, rakyat

Thailand, terutama 5% terbawahnya tetap hidup berkubang kemiskinan. Setelah empat dekade pertumbuhan cepat pembangunan kapitalisme, Thailand muncul sebagai salah satu negara paling timpang di dunia, lebih buruk ketimbang tetangganya di Asia Timur dan Tenggara.

Ketika krisis menghantam pada 1997, dengan seketika ekonomi Thailand jatuh dalam krisis. Sepertiga dari kapitalis besar Thai jatuh bangkrut, ribuan perusahaan tutup, dua pertiga dari bank-bank komersial berpindah tangan, dan satu miliar buruh kehilangan pekerjaannya. Ketika kemudian Thailand masuk dalam kerangka pemulihan ekonomi ala neoliberal yang didiktekan IMF, kehidupan mayoritas rakyat Thailand semakin memburuk.

Dalam kondisi sesak seperti itulah Thaksin Shinawatra, yang berkendara partai Thai Rak Thai (TRT) memenangkan pemilu pada Januari 2002. Partainya, TRT, memenangi 11 juta suara dan 248 kursi di parlemen. Thaksin pun dilantik sebagai Perdana Menteri. Untuk mengamankan kekuasaannya, salah satu kebijakan yang ditempuh Thaksin adalah meluncurkan kebijakan populis: pinjaman-mikro, bantuan uang bagi petani, akses kepada lembaga keuangan, dan pemangkasan sebesar 30 baht bagi setiap kunjungan ke rumah sakit. Ia juga membentuk the Village and Urban Community Fund, untuk membiayai sekitar 4000 komunitas perkotaan dan 7000 komunitas pedesaan di seluruh Thailand.

Dalam kondisi ekonomi yang memburuk, kebijakan populis Thaksin ini tentu saja merupakan berkah bagi penduduk pedesaan dan perkotaan miskin yang selama ini hanya menjadi penonton kue pembangunan ekonomi. Mereka yang memuja angka-angka pertumbuhan ekonomi tinggi, tentu saja mensinisi kebijakan populis seperti ini, karena dipandang cepat atau lambat akan menggerus stabilitas dan performansi ekonomi dalam jangka panjang. Sebuah cara pandang yang ahistoris, karena menganggap krisis ekonomi Thailand adalah hasil dari kebijakan Thaksin yang populis.

Bukan berarti saya mendukung kebijakan populis Thaksin tersebut. Saya hanya ingin kita melihat, mengapa dukungan terhadapnya begitu kuat di arus bawah. Secara ekonomi politik, Thaksin tidak bergeser dari jalan kapitalisme-neoliberal, sehingga walaupun kebijakannya telah mendatangkan

dukungan besar dari kaum tani tapi, sejatinya kebijakan tersebut tidak menambah tinggi tingkat pendapat kelompok tersebut. Hasil survey tahun 2002 menunjukkan, 500 ribu petani kehilangan tanahnya, 70% dari seluruh populasi tetap hidup di daerah pinggiriran, dan 60% pendapatan mereka diperoleh dari pekerjaan di luar sektor pertanian. Kesenjangan regional juga tetap tinggi. Pada 2004, Bangkok dengan populasi sebanyak 17% dari keseluruhan populasi Thailand, menikmati 44% dari GDP. Di kota-kota besar lainnya, dengan 17% populasi menikmati 27% GDP. Sebaliknya, di Selatan, dengan 14% populasi hanya menerima 9% dari GDP, di pegunungan dengan 34% populasi hanya menerima 11% dari GDP. Kesenjangan antar sektor juga tinggi: pertanian dengan menampung 42% tenaga kerja, hanya menerima 10% GDP. Sementara di perkotaan dengan 21% tenaga kerja menerima 41% GDP, dan sektor jasa dengan 37% tenaga kerja menerima 50% GDP.

Dengan kompleksitas seperti ini, ketika Thaksin dikudeta militer pada 19 September 2006, para pendukungnya merasa bahwa patronnya ini telah diperlakukan tidak adil oleh para elit yang selama ini tidak berpihak pada kepentingannya. Melalui serangkaian krisis politik pasca kudeta, hingga diangkatnya teknokrat muda Abhisit Vejjajiva sebagai Perdana Menteri, konsolidasi di kalangan pendukung Thaksin semakin menguat.

Konsolidasi ini makin menemukan momentumnya ketika ekonomi Thailand yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, kembali terkena imbas dari krisis ekonomi 2008. Walaupun, krisis ini bukan disebabkan oleh masalah internal, tetapi dengan struktur ekonomi pasca krisis 1997 yang semakin terintegrasi dan tergantung pada kapitalisme internasional, maka begitu krisis meledak pada 2008, ekonomi Thailand ikut goyah.

Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Chulalongkorn, Suthiphand Chirativat dan Sothitorn Mallikamas, mencatat dengan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata hanya 2.5% pada 2008, ekonomi Thailand pada 2009 memperlihatkan angka pertumbuhan yang suram, dimana pada kuartal pertama angka pertumbuhannya minus 7.1%, dan minus 4.9% dan minus 2.8% pada kuartal kedua dan ketiga.

Daya serap angkatan kerja juga tak luput dari terpaan krisis 2008. Masih

menurut Chirativat dan Mallikamas, sejak 2001 angka pertumbuhan tenaga kerja Thailand meningkat rata-rata sebesar 1.5% per tahun. Hingga sebelum krisis 2008, jumlah keseluruhan angkatan kerja mencapai 37.6 juta orang. Tapi memasuki kuartal terakhir 2008, jumlah tersebut menjadi negatif dan semakin memburuk hingga kuartal kedua 2009. Akibatnya, dalam waktu singkat tingkat pengangguran segera membludak dan mencapai angka tertinggi pada Januari 2009, yakni sebesar 900.000. Ekonom C.P. Chandrasekhar and Jayati Ghosh, menambahkan, posisi tawar buruh Thailand yang makin lemah juga tercermin pada tingkat upah yang hanya sebesar 5% lebih tinggi dibanding tahun 2001, sementara tingkat produktivitasnya mencapai angka 22%.

Penutup

Dengan melihat latar belakang ekonomi politik seperti ini, bersikap netral dalam krisis politik yang saat ini berlangsung di Thailand, sungguh tidak beralasan. Perlawanan kelompok 'Kaus Merah', yang sebagian besar adalah pendukung Thaksin, tidak berakar pada personalisasi politik Thaksin. Sebaliknya, kita mesti melihat militansi itu sebagai hasil dari tekanan ekonomi yang terus memburuk, yang tak kunjung teratasi oleh pemerintahan yang ada.

Dari sini, ada hal penting yang patut diperhatikan, yakni anjuran beberapa LSM agar kedua belah pihak duduk satu meja dan berdialog guna mengatasi konflik politik ini. Usulan ini berarti menegosiasikan dua posisi sosial-ekonomi yang bertentangan satu sama lain secara diametral: elit dan rakyat miskin. Pengalaman di berbagai negara yang mengalami krisis ekonomi, dialog dalam posisi yang timpang pada akhirnya selalu merugikan posisi rakyat miskin.***

Sumber: <http://indoprogress.com/2010/05/kaus-merah-mencari-penjelasan/>

Politik Dan Demokrasi Tetap Menjadi Mainan Elit

Vedi R. Hadiz

KUDETA militer terhadap pemerintahan sipil hasil pemilu, pimpinan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra, merupakan preseden politik yang sangat menarik. Militer Thailand yang otoriter, yang bergelimang darah ketika berkuasa, karena itu dicap anti-demokrasi, kini dianggap sebagai lembaga yang sanggup memulihkan citra demokrasi yang bobrok di masa kepemimpinan Thaksin.

Pada sisi yang lain, gerakan prodemokrasi, yang berjuang sekuat tenaga melawan rezim kediktatoran militer, kini hanya memiliki peran politik pinggiran dalam merawat bangunan demokrasi yang rapuh. Mereka terseok-seok bergerak di tengah-tengah permainan politik elit.

Bagaimana sesungguhnya, keadaan politik, perspektif ideologi, dan peta gerakan politik di Thailand, yang memicu kudeta militer tersebut? Untuk mengetahuinya, **Coen Husain Pontoh** dari **IndoPROGRESS** mewawancarai **DR. Vedi Renandi Hadiz**, Associate Professor di Department of Sociology, National University of Singapore¹, yang dua hari setelah kudeta berlangsung mengunjungi negara Gajah Putih itu. Berikut petikannya:

IndoPROGRESS (IP): *Setelah lebih dari 15 tahun absen dari politik praktis, mengapa militer Thailand kembali dengan tradisi kudetanya?*

Vedi Renandi Hadiz (VRH): Ada banyak faktor, diantaranya yang terpen-

1 Saat ketika wawancara ini dilakukan pada 2006. Sejak tahun 2016, Vedi R. Hadiz bekerja sebagai Professor of Asian Studies di Asia Institute, University of Melbourne, Australia.

ting adalah dukungan Raja yang secara tersirat disampaikan lewat Jendral Prem, penasehat Raja. Raja Bhumipol sendiri sudah sejak lama menunjukkan ketidaksenangannya pada Thaksin. Tanpa dukungan seperti ini, tidak mungkin seorang perwira seperti Jendral Shonti, berani mengambil tindakan kudeta.

Kedua, Thaksin telah mengembalikan konflik politik ke dalam tubuh militer dengan upayanya untuk memajukan orang-orang dekatnya dan menyingkirkan orang-orang yang dianggap kurang kooperatif. Diperkirakan, Thaksin telah bersiap-siap sebelum kudeta untuk melakukan *reshuffling* yang hebat di tubuh militer. Akibatnya, sebagai institusi, militer mengembangkan kepentingan untuk melindungi otoritas dan otonominya terhadap pemerintah Thaksin.

Ketiga, militer mencium bahwa golongan menengah perkotaan, terutama di Bangkok, yang selama ini menentang peranan politik militer, justru akan mendukungnya. Setidak-tidaknya, golongan menengah ini tidak akan menentangnya karena mereka juga berharap Thaksin cepat meninggalkan kekuasaan. Lucunya, golongan menengah perkotaan (terutama intelektualnya) inilah yang selama ini gemar berbicara tentang demokrasi dan sekarang mengumandangkan pikiran aneh bahwa kudeta militer justru untuk 'menyelamatkan' demokrasi.

IP: *Dalam hubungan dengan kudeta itu, apa kesalahan mendasar Thaksin dalam hubungannya dengan militer sehingga ia harus dikudeta?*

(VRH): Lihat point nomor dua di atas. Lebih jauh lagi kebijaksanaan Thaksin di Selatan, telah membuat marah banyak perwira militer. Selain meningkatkan peranan kepolisian (yang memang dekat dengan Thaksin karena ia bekas polisi dan juga kawin dengan anak bekas perwira tinggi kepolisian) di Selatan dan mengecilkan peranan tentara, Thaksin telah bersitegang dengan Jendral Shonti secara langsung. Yang agak ironis, Thaksin yang sipil justru mendukung kebijaksanaan garis keras terhadap pembangkang di Selatan, sedangkan Jendral Shonti (yang Muslim), lebih cenderung pada perundingan.

IP: *Pada awal tahun 2006, terjadi aksi massa besar-besaran yang menuntut Thaksin mundur dari jabatannya. Tapi, aksi massa tersebut hanya sukses sebentar, selanjutnya Thaksin kembali menjadi PM. Apa sebenarnya penyebab kegagalan gerakan massa kala itu?*

(VRH): Partai-partai yang bergabung dalam PAD, seperti Demokrat, Chart Thai, dan Mahachon sebenarnya kurang mempunyai dukungan akar-rumput yang kuat. Mereka tahu, dalam pemilu terbuka mereka akan kalah pada Thai Rak Thai yang sampai sekarang masih populer di kalangan pedesaan. Aksi boikot pemilu mereka memang melukai Thaksin, karena hasil pemilu April akhirnya dibatalkan sebab dinyatakan tidak sah. Tetapi, mereka tidak mampu melangkah lebih jauh. Akibatnya, yang terjadi adalah 'stale-mate' yang berkepanjangan hingga terjadi kudeta militer. Lebih jauh lagi, banyak aktor yang terlibat dalam aksi tersebut kurang mempunyai legitimasi karena latar belakang mereka sebagai bekas orang dekat Thaksin.

IP: *Bagaimana sebenarnya konstelasi politik, perspektif ideologis, dan basis dukungan dari kelompok penentang Thaksin yang gagal itu?*

(VRH): Partai politik di Thailand, pada umumnya tidak punya perspektif ideologis yang kuat. Dalam hal ini mereka menyerupai partai politik di Indonesia. Papol Thailand lebih merupakan aliansi-aliansi sesaat dan taktis di antara orang-orang kuat, berpengaruh atau kaya. Meskipun demikian, Partai Demokrat kelihatannya didukung teknokrat lokal sebab, di bawah Chuan Lekpai, partai ini pernah menjadi pendorong utama proses liberalisasi ekonomi pasca-Krisis Asia. Di masa lalu, partai ini dianggap sebagai partai pro-monarki. Di tahun 1940-an, di bawah Seni Pramroj, partai ini sempat bertentangan dengan gerakan Pridi (salah satu tokoh utama kudeta 1932 terhadap kerajaan absolutis) yang lebih progresif dan bernuansa sosialis. Partai Chart Thai, yang sekarang kelihatannya mulai banyak menampung orang dekat TRT yang mau menyeberang – adalah partai yang cenderung konservatif.

IP: *Sondi Limthongkul, salah satu motor gerakan kelas menengah-atas perkotaan, pasca kudeta militer langsung menyatakan dukungannya terhadap kudeta ini. Bagaimana menjelaskan sikap politik kelas-menengah atas Thailand seperti itu?*

(VRH): Sondi adalah bekas tokoh pelajar kiri di tahun 1970-an, yang kemudian menjadi konglomerat bisnis media massa sejak tahun 1980-an. Di tahun 1990-an dia mulai beraliansi dengan Thaksin. Dia sempat menjadi pembawa acara tv yang banyak dia pakai untuk mengkritik Thaksin setelah mereka pecah. Sumber perpecahan mereka, kabarnya, adalah dibatalkannya kebijaksanaan pemerintah Thaksin untuk membatalkan sebagian besa-r hutang Sondi.

Orang lain yang penting adalah Chamlong, bekas jendral, walikota Bangkok, dan tokoh pemberontakan 1992 melawan pemerintah militer di bawah Suchinda. Pada tahun 1976 dia menjadi pimpinan perwira yang dikenal sebagai ‘Young Turks’ — kelompok yang dianggap paling bertanggungjawab atas pembantaian terhadap gerakan pelajar periode 1970-an. Dia juga pernah amat dekat dengan Prem. Chamlong bekas ketua partai Palang Dharma, yang sempat menjadi kendaraan Thaksin pula di masa lebih awal karir politiknya, juga adalah penganut agama Buddha garis keras yang tampaknya kecewa dengan watak kapitalisnya Thaksin. Lihat pula komentar di atas tentang sikap kelas menengah.

IP: *Khusus di kalangan akar rumput, basis dukungan Thaksin sebagian besar adalah petani. Padahal, pada dasarnya kebijakan Thaksin sangat bias perkotaan. Bagaimana menjelaskan fenomena ini?*

(VRH): Thaksin adalah representasi kemenangan borjuasi Thailand pasca-Krisis Asia . Mereka mengambil alih kekuasaan Negara untuk melindungi kepentingan mereka yang waktu itu terancam oleh kebijaksanaan Chuan Lekpai, yang cenderung menguntungkan modal asing. Tapi semakin lama, Thaksin lebih mementingkan kepentingan kelompok bisnisnya

sendiri dan membuat marah elemen-elemen borjuasi lainnya. Masalahnya, Thaksin semakin menjadi representasi kemenangan SATU orang anggota borjuasi, bukan kelas borjuasi secara UMUM.

Walaupun demikian, Thaksin pintar menggabungkan kebijaksanaan neoliberal (misalnya ketika kebijaksanaan privatisasi menguntungkanannya) dan kebijaksanaan populis yang memenangkan dukungan kaum petani. Di kalangan petani, dia dikenal sebagai satu-satunya PM yang memenuhi janji kampanyenya. Dia menyuntik dana besar kepada setiap desa, mengembangkan kebijaksanaan *'one tambon one product'* dan membuat biaya pengobatan murah bagi orang miskin (suatu hal yang membuat Thaksin tidak populer di kalangan dokter medis).

Pada dasarnya, Thaksin mampu melakukan semua ini karena upayanya yang berhasil untuk melakukan sentralisasi kekuasaan Negara pada dirinya sendiri – termasuk kekuasaan anggaran. Belum lagi kekayaan pribadinya serta berbagai sumber dana off-budget yang kabarnya dikuasainya. Dengan basis dana seperti ini, *money politics* yang digencarkan Thaksin amat sulit dilawan partai lain. Partai Demokrat, misalnya, cuma kuat di kota besar seperti Bangkok dan di Selatan, yang amat membenci Thaksin.

IP: *Berkaitan dengan basis dukungan akar rumput ini, bagaimana sebenarnya dukungan mereka terhadap kelompok-kelompok progresif di Thailand?*

(VRH): Kelompok progresif Thailand tidak punya kendaraan politik yang baik, seperti juga di Indonesia. Upaya tokoh kiri, Giles Ungpakorn, untuk bikin partai bernuansa sosialis, dulu pernah gagal. Banyak intelektual progresif masa 1970-an dan 1980-an menjadi pembantu Thaksin – mereka pikir, mereka berhasil 'mengambil alih' Negara dengan cara ini. Tentu ini asumsi yang sangat keliru. Sebagian lagi menjadi pengusaha atau tenaga ahli yang mendukung partai-partai yang tidak berwawasan maju. Kekuatan LSM juga beragam ciri politiknya – sebagian adalah 'tukang' pembangunan. Assembly of the Poor, yang sempat giat di kalangan miskin desa (dan kota untuk sebagian), kelihatannya sudah lewat masanya. Serikat buruh sudah lama tercerai berai, walaupun ada sektor-sektor yang

kadang-kadang menunjukkan militansi.

IP: *Pelajaran apa yang bisa dipetik oleh gerakan progresif di Indonesia , atas kudeta militer terhadap pemerintahan hasil demokrasi?*

(VRH): (1). Kepentingan institusional militer untuk mempertahankan akses ekonomi dan politiknya selalu harus diwaspadai; (2). Militer di mana saja bisa menggunakan dalih 'kepentingan nasional' untuk mengubur demokrasi; (3). Walaupun demikian, coba perhatikan apakah militer di Thailand, mampu untuk memutar balik jarum jam kepada zaman diktator macam Phibun, Sarit, Thanom, atau Kriangsak. Saya kira tidak akan mampu. Demikian juga militer Indonesia. Dengan kata lain, walaupun militer mengambil langkah sebagaimana di Thailand, kediktatoran model tempo dulu akan sulit dipertahankan dan mereka harus bernegosiasi dengan berbagai kekuatan politik.

Sayangnya, kekuatan politik progresif yang mempunyai basis akar rumput kuat, sangat sulit ikut dalam proses negosiasi dan kontestasi tersebut. Jadi, politik dan demokrasi tetap menjadi mainan elit.***

Sumber: <http://indoprogress.com/2006/10/dr-vedi-r-hadiz-politik-dan-demokrasi-tetap-menjadi-mainan-elite/>

Distrik Thai*: Potret Thailand Pasca Kudeta

22 Mei 2014

Andre Barahamin

JIKA ADA yang bertanya, apa keunikan Thailand, maka saya selalu menjawab dengan sinis: kuil dan kios Seven-Eleven.

Alasan pertama tentu sudah tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Buddha adalah agama yang dianut mayoritas masyarakat Thailand, kecuali di beberapa provinsi di bagian Selatan (Narathiwat, Songkhla, Pattani, Satun dan Yala), di mana Islam adalah agama mayoritas.

Di daerah-daerah mayoritas Islam ini, terutama di Pattani, Yala dan Narathiwat dan beberapa distrik di provinsi Songkhla (Bajoria and Zissis 2008) gerakan dan semangat pembebasan untuk memerdekakan diri dari monarki Thailand begitu sangat terasa. Di provinsi-provinsi yang disebutkan di atas, operasi militer Thailand dilangsungkan dalam skala besar dan meluas. Operasi militer ini juga dibarengi dengan pola-pola kooptatif, interventif dan intimidatif (Chalk 2008). Secara subjektif, saya sering membandingkan operasi militer kerajaan Thailand dengan operasi militer Indonesia di Papua. Massif dan destruktif.

Alasan kedua, disebabkan oleh kenyataan gambaran geografis dimana gerai-gerai Seven-Eleven dapat ditemukan di berbagai sudut kota-kota di Thailand. Seringkali berhadap-hadapan, dua hingga empat gerai sekaligus. Kondisi psikogeografis yang membuat seseorang secara naif dapat merasakan betapa sangat mudahnya membeli produk-produk kebutuhan harian, karena konsumen telah ditunggu tepat di depan batang hidungnya.

Namun, saya akhirnya menambahkan satu lagi keunikan Thailand yang hampir tidak mungkin diduplikasi oleh negara lain: Kudeta!

Ya. Kudeta di Thailand secara dangkal dapat dianggap bukan lagi sesuatu yang asing, yang wah, yang heboh atau patut dikhawatirkan. Setidaknya, itu pandangan prematur yang segera didapatkan ketika militer kerajaan pimpinan Jendral Prayuth Chan-ocha melakukan kudeta pada 22 Mei yang lalu. Kudeta Prayuth ini adalah sukses ke-12 kudeta militer sejak monarki Thailand kehilangan kekuasaan absolutnya karena revolusi sosial di tahun 24 Juni 1932 (Hall 1997). Belum terhitung tujuh kali percobaan kudeta lain yang dilakukan namun gagal merebut kekuasaan. Artinya, dalam hitungan matematis sederhana, setiap kurang dari lima tahun, selalu ada satu kudeta atau upaya kudeta yang dilakukan oleh militer kerajaan.

Namun di Thailand, ada larangan tegas dan keras dari junta militer bagi siapapun untuk menyebut peristiwa 22 Mei 2014 sebagai kudeta. Prayuth Chan-ocha bersikukuh bahwa tindakannya bukan dan tidak dapat disebut sebagai kudeta. Melalui berbagai pernyataan di media,¹ jendral Prayuth bersikeras bahwa tindakannya adalah upaya untuk menyelamatkan Thailand² dan mengakhiri krisis politik yang berlarut-larut antara pendukung Kaus Merah dan Kaus Kuning. Sejak November 2013, Bangkok memang digoyang demonstrasi berkali-kali, baik dari pendukung Kaus Merah maupun pendukung Kaus Kuning.

Kurang dari 24 jam setelah melakukan kudeta, Prayuth membentuk National Council for Peace and Order (NCPO/Dewan untuk Kedamaian dan Ketertiban) untuk menjalankan kekuasaan.³ Badan ini kemudian membubarkan parlemen, memberlakukan jam malam, menerapkan sensor ketat terhadap media, dan menginstruksikan agar angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian juga bersepakat dan bergabung dengan NCPO. Menyusul kemudian adalah penangkapan terhadap figur-figur yang dianggap menentang kekuasaan NCPO, seperti Chalerm Yubamrung⁴ dan Yingluck

1 <http://www.bangkokpost.com/learning/learning-from-news/411433/general-prayuth-gets-down-to-work>

2 <http://www.bangkokpost.com/most-recent/411445/reform-lawmaking-bodies-in-pipeline>

3 <http://www.komchadluek.net/detail/20140522/185160.html>

4 <http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Chalerm-arrested-re->

Shinawatra.⁵

Tiga hari berselang, pada 26 Mei, Raja Bhumibol Adulyajev memberikan dukungan terbuka kepada Prayuth.⁶ Dukungan ini sebenarnya sudah dapat diprediksi sejak Raja Bhumibol secara tersirat menyatakan dukungannya dua hari sebelumnya.⁷ Prediksi mengenai dukungan pihak keluarga Kerajaan memang sudah terendus sejak awal, mengingat Prayuth adalah perwira militer loyalis⁸ yang juga merupakan salah satu tokoh kunci militer dalam kudeta yang berlangsung tahun 2006. Saat kudeta yang sukses menggulingkan PM Thaksin Shinawatra tersebut berlangsung, Jendral Prayuth menjabat sebagai Deputy Komandan tentara yang bertugas menjaga Bangkok dan area sekitar ibukota.

Kudeta 22 Mei juga secara khusus berbeda jika dibandingkan dengan kudeta-kudeta militer yang pernah terjadi sebelumnya. Dalam kudeta kali ini, NCPO dan Jendral Prayuth tidak memberikan batas kepastian kapan pemilu akan diadakan dan mengembalikan kekuasaan kepada kekuatan sipil sebagai sinyal berakhirnya kudeta.⁹ Sebaliknya, sang jendral yang berada di ambang pensiun justru secara terbuka mengakui rencananya di hadapan media untuk mengangkat diri sebagai Perdana Menteri¹⁰ dan telah mendesain program jangka panjang untuk Thailand di masa depan.¹¹

port-30234371.html

5 <http://www.bangkokpost.com/most-recent/411335/shinawatras-chalerm-summoned-by-junta>

6 <http://www.bbc.com/news/world-asia-27572726>

7 <http://www.straitstimes.com/the-big-story/bangkok-showdown/story/thai-coup-leader-cements-grip-assumes-law-making-power-20140524>

8 Jendral Prayuth Chan-ocha menghabiskan sebagian besar karir militernya dengan mengabdikan diri di Regimen Infrantri 21, sebuah unit yang bertugas mengawal Ratu Sirikit.

9 <http://www.bbc.com/news/world-asia-27544972>

10 <http://prachatai.com/english/node/4033>

11 <http://www.thairath.co.th/content/424771>

Lalu bagaimana prospek demokrasi di Thailand? Menjawab pertanyaan ini, saya mencoba memaparkan kekuatan dari kelompok-kelompok yang selama ini gigih menentang kediktatoran militer.

Kaus Merah

Penentangan terhadap kudeta 22 Mei paling keras datang dari kelompok Kaus Merah yang didirikan pada tahun 2006 dengan nama Democratic Alliance Against Dictatorship (DAAD). Mereka kemudian mengubah namanya menjadi United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD) (Taylor 2012). Kelompok ini pada awalnya merupakan respon langsung terhadap kudeta militer yang sukses menjungkalkan Thaksin Shinawatra dari kursi Perdana Menteri, satu bulan sebelum pemilihan umum digelar di tahun 2006 (Fuston 2009). UDD secara umum dapat dikatakan berafiliasi dengan Pheu Thais, partai politik yang berhasil mengantarkan kakak beradik Shinawatra ke tampuk kekuasaan (Chaorensin-o-larn 2013). Basis utama Kaus Merah datang dari kalangan petani (Thabcumpon and McCargo 2011) yang bermukim di Isaan,¹² terletak di bagian Timur Laut. Daerah-daerah pendukung utama di Isaan terletak di Nakhon Ratchasima, Sakon Nakhon, dan Khon Kaen. Daerah penyangga lain datang dari dua provinsi terbesar di daerah utara yang berbatasan dengan Myanmar, yaitu Chiang Mai dan Chiang Rai (Chachavalpongpun 2013).

Kaus Merah sejak awal berdirinya telah memosisikan diri sebagai oposisi People Alliance for Democracy (PAD) atau lebih dikenal dengan sebutan Kaus Kuning (Chachavalpongpun 2013). Konflik politik ini dimulai ketika Thaksin Shinawatra berhasil menduduki kursi Perdana Menteri di tahun 2001. Kubu yang pertama, yaitu Kaus Kuning, melandaskan dukungannya di seputaran kekuasaan monarki, militer, birokrat dan Partai Demokrat. Kubu yang lain dengan dipimpin oleh Thaksin, terdiri dari beragam partai politik dan secara informal didukung oleh kekuatan Kepolisian (Thabcumpon and McCargo 2011). Masing-masing kubu juga membangun faksi yang saling berhadap-hadapan di dunia bisnis Thailand hingga akhirnya Thaksin disingkirkan melalui kudeta 19 September 2006.

12 <https://en.wikipedia.org/wiki/Isan>

Namun penting untuk dipahami bahwa Kaus Merah adalah sebuah front luas yang terdiri dari berbagai macam kelompok sosial dan grup-grup politik. Meskipun Kaus Merah selalu disederhanakan sebagai alat politik Thaksin semata, hal yang sebenarnya luput dilihat adalah bagaimana dinamika dan benturan-benturan ideologis dari komponen-komponen yang ada di dalam kelompok ini (Askew 2010). Termasuk di dalamnya adalah eksponen-eksponen Partai Komunis Thailand (PKT).

Argumen di atas dapat dibaca dengan melacak jejak historis tentang pengaruh PKT dalam periode aktifnya yang memang sangat terasa di daerah utara, timur laut dan selatan, namun tidak memiliki dukungan yang signifikan di Bangkok dan daerah sekitarnya (Heaton 1982). Dukungan itu terlihat jelas ketika PKT melancarkan perang rakyat untuk meruntuhkan monarki Thailand di tahun 1965 (Battersby 1999). Daerah Isaan merupakan medan utama dari konsep gerilya tersebut.

Perang gerilya rakyat tersebut berakhir dengan dikeluarkannya Instruksi Perdana Menteri 66/2523 pada 23 April 1980 pemerintah Thailand (Anderson 1993). Instruksi 66/2523 adalah pendekatan non-militer dengan memberikan amnesti penuh bagi mereka yang terlibat dalam perang rakyat tersebut sebagai wujud dari rekonsiliasi nasional setelah periode perang yang berlangsung selama 15 tahun (Punyaratabandhu-Bhakti). Amnesti ini juga memulihkan hak-hak kader-gerilyawan PKT untuk terlibat dalam politik, termasuk kemudian mendirikan partai atau ikut berkompetisi dalam pemilihan umum (Jeamteerasakul 1991). Amnesti dan pendekatan yang persuasif tersebut tidak pernah mendapatkan dukungan dari kalangan militer Thailand, yang menilai hal tersebut sebagai kemunduran kedaulatan monarki (Bunbongkarn 2004).

Meski terlibat secara aktif dalam Kaus Merah, sejatinya pengaruh eksponen PKT, yang kini lebih dikenal dengan sebutan Siam Merah, tidak terlalu signifikan dalam menentukan strategi politik. Namun kelompok ini memainkan peranan penting dalam isu-isu agraria populis, dan mendapatkan dukungan dari kalangan petani pendukung Kaus Merah. Salah satu tokoh utama Siam Merah adalah Jakkrapop Penkair, mantan menteri kabinet di periode kepemimpinan Thaksin yang kini sedang berada di pengungsian. Kelompok ini dikategorikan sebagai salah satu elemen garis keras Kaus

Merah (Thabchumpon dan McCargo 2011).

Namun, pengaruh Siam Merah dalam Kaus Merah masih kalah dibandingkan dengan Kelompok Oktober (Octobrists), yang memiliki latar belakang intelektual dan lebih populer di kalangan pelajar Thailand (Thabchumpon dan McCargo 2011). Kelompok Oktober merujuk kepada mantan-mantan aktivis sayap kiri yang aktif pada periode gerakan pelajar tahun 1970-an di Thailand. Kelompok ini berperan besar dalam sejarah perpolitikan Thailand, seperti gerakan demokratik 1992, berbagai gerakan sosial yang berlangsung di pertengahan dekade 90-an, hingga reformasi politik diakhir tahun 1990-an (Lertchoosakul 2012). Figur-figur kunci Kaus Merah seperti Waeng Tojirakan, Wisu Khantap, Woraphon Phrommikasut dan Arisman Phongruangrong, merupakan bagian dari Kelompok Oktober.

Penting untuk digarisbawahi bahwa pada masa awal konsolidasi, pendukung Kaus Merah didominasi oleh pendukung partai Thai Rak Thai (TRT). Thaksin Shinawatra menggunakan TRT sebagai kendaraan politik hingga menduduki kursi Perdana Menteri sebelum akhirnya partai ini dibubarkan oleh pemerintah pro-monarki pada tahun 2007. Kebanyakan massa pendukung Kaus Merah pada periode awal ini hanya memiliki intensi untuk melindungi Thaksin karena kebijakan-kebijakan populisnya, terutama tentang isu agraria dan isu pendidikan (Askew 2010). Pergeseran ideologis dalam Kaus Merah terjadi secara perlahan, seiring juga terjadinya pergeseran ideologis yang dialami oleh Kaus Kuning.

Jika Kaus Kuning seiring waktu bergerak ke arah yang lebih konservatif, anti-demokrasi, nasionalisme sayap kanan, maka Kaus Merah semakin bergerak ke arah yang berlawanan (Lertchoosakul 2012). Pergeseran dalam Kaus Merah menuju ide-ide tentang demokrasi dan radikalisme gerakan massa juga ikut dipengaruhi oleh elemen-elemen radikal di dalamnya, semisal Siam Merah dan Kelompok Oktober.

Namun peristiwa penting yang menandai pergeseran secara ideologis Kaus Merah adalah kudeta Thaksin, yang kemudian menyadarkan banyak pendukung kelompok ini mengenai pentingnya demokrasi elektoral yang demokratis (Askew 2010). Respon penentangan terhadap kudeta 2006 dan desakan untuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis, justru ber-

kali-kali dihadapi dengan strategi represif yang dipilih oleh rezim Abhisit Vejjajiva, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan gerakan Kaus Merah terjadi ketika Abhisit mengerahkan kekuatan militer untuk membubarkan paksa demonstrasi besar-besaran Kaus Merah pada Mei 2010. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Songkran Berdarah (Lertchoosakul 2012).

Gerakan Pelajar Thailand

Meski Siam Merah dan Kelompok Oktober ini memiliki kecenderungan garis politik yang bertetangga, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa kedua kelompok ini merupakan faksi paling aktif yang terus bertarung untuk memperebutkan pengaruh di kalangan pelajar-pelajar Thailand (Taylor 2012). Daerah-daerah utama yang menjadi target basis pengorganisasian di luar Bangkok adalah Universitas Chiang Mai (CMU) di daerah Utara dan Universitas Khon Kaen (KKU) di bagian Timur Laut. Kedua universitas ini secara politik dan budaya, merupakan simbol perlawanan terhadap dominasi Universitas Chulalongkorn yang dianggap merupakan representasi dari para loyalis monarki. Kedua universitas tersebut juga tampil sebagai alternatif gerakan mahasiswa di Bangkok, yang selama ini berpusat di Universitas Thammasat sebagai ikon.

Universitas Thammasat memang dianggap sebagai ikon gerakan pelajar Thailand kontemporer. Pada dekade 1970-an, universitas ini menjadi pusat gerakan pelajar demokratik sebelum akhirnya dihancurkan militer yang ditandai dengan pembantaian pelajar pada 6 Oktober 1976. Peristiwa berdarah yang kemudian dikenang sebagai Pembantaian Thammasat 1976.

Konteks terjadinya Pembantaian Thammasat 1976, tentu saja tidak terlepas dari konflik Perang Dingin yang saat itu berlangsung antara kekuatan US dan USSR pasca Perang Dunia Kedua (Leifer 1995). Salah satu pemicunya adalah ketakutan militer loyalis monarki bahwa Thailand akan menjadi negara komunis, setelah menyaksikan kemenangan partai komunis di Vietnam dan Laos.

Sebelum terjadinya Pembantaian Thammasat 1976, gerakan pelajar Thailand mengalami perkembangan dan penguatan yang signifikan di akhir dekade 1960-an. Pengorganisasian ide dan gerakan massa oleh pelajar di periode ini akhirnya sukses mengakhiri periode dua dekade diktator militer pada 14 Oktober 1973. Setelah kemenangan demokratik ini, gerakan pelajar mengalami kemunduran yang kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan pro-monarki untuk menyusun kembali kekuatan mereka (Lertchoosakul 2012). Konsolidasi militer ini kemudian diakhiri dengan serangan brutal ke Universitas Thammasat yang memiliki kecenderungan sayap kiri.

Sejak awal, Universitas Thammasat adalah pusat pengorganisasian ide-ide mengenai demokrasi dan isu-isu radikal lain, dan selalu mengambil peran dalam setiap momentum gerakan sipil di Thailand. Universitas ini didirikan pada tahun 1934 oleh Pridi Banomyong, salah satu figur utama gerakan sipil yang sukses mengakhiri kekuasaan absolut monarki di tahun 1932 (Somsak 1991).

Pembantaian Thammasat 1976 menjadi titik paling penting dalam sejarah gerakan pelajar Thailand. Tragedi berdarah ini mendorong lebih dari 3.000 pelajar radikal meninggalkan kampus untuk bergabung dengan perang gerilya yang dilancarkan oleh partai komunis terhadap monarki. Periode gerakan pelajar di dekade 1970-an ini pula yang menjadi landasan historis kelahiran Kelompok Oktober (Octobrist) di kemudian hari. Kelompok yang memainkan peran yang signifikan dalam kebangkitan gerakan sipil di Thailand di akhir tahun 1990-an (Lertchoosakul 2012).

Gerakan pelajar Thailand sempat kembali menguat memasuki dekade 1990-an. Protes-protes sipil yang terjadi di rentang waktu tersebut, ikut membentuk dan menguatkan kembali formasi gerakan pelajar yang sempat melemah pada tahun-tahun sebelumnya. Hingga periode itu, universitas Thammasat tetap menjadi pusat pengorganisasian dan simbol demokrasi bagi gerakan pelajar di masa tersebut (Lertchoosakul 2012).

Pasca gerakan sipil di dekade 1990-an, gerakan pelajar Thailand kembali melemah dan terpecah-pecah ke dalam kelompok-kelompok kecil berbasis universitas atau bahkan fakultas. Konsolidasi gerakan pelajar kembali terjadi ketika militer melancarkan kudeta terhadap Thaksin dan pembubaran

partai TRT oleh rezim pro-monarki. Aksi-aksi penentangan kudeta dan periode awal pembentukan Kaus Merah, sedikit banyaknya berkontribusi terhadap penguatan kembali gerakan pelajar Thailand. Momentum pembentukan Kaus Merah dimanfaatkan oleh gerakan pelajar untuk melakukan perluasan dan konsolidasi. Hal ini ditandai dengan signifikansi pengorganisasian gerakan pelajar yang tidak lagi terpusat di Universitas Thammasat. Gerakan pelajar di CMU dan KKU, yang mulai menggeliat pasca kudeta 2006, hari ini memang tampil sangat signifikan dan kemudian mulai dinilai sebagai patron alternatif gerakan pelajar di Thailand dan ikut menentukan peta gerakan anti-kudeta di Thailand hari ini (Barahamin 2014).

Dari Protes Orwell ke *Hunger Games*

Strategi politik Yingluck Shinawatra yang memilih untuk tidak melakukan perlawanan secara aktif terhadap militer yang melakukan kudeta, menimbulkan kekecewaan di antara pendukung Kaus Merah. Strategi defensif ini diambil berdasarkan ketakutan akan respon represif militer dan mencegah kemungkinan jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak.¹³ Protes-protes Kaus Merah yang berkali-kali melumpuhkan Bangkok ketika berhadapan dengan Kaus Kuning pada periode sebelum kudeta berlangsung, kemudian mengendur secara perlahan hingga berangsur sepi. Kaus Merah kemudian hanya melakukan rapat-rapat massa di luar Bangkok, yang terkonsentrasi di basis-basis pendukungnya. Di masa-masa inilah, gerakan pelajar Thailand menunjukkan konsistensinya.

Berbeda dengan gerakan pelajar di negara Asia Tenggara lain semisal Indonesia, Myanmar dan Filipina yang kecenderungan taktiknya adalah dengan mengerahkan massa dan melakukan demonstrasi, gerakan pelajar di Thailand lebih cenderung mengedepankan protes-protes simbolik. Strategi ini dipilih untuk mengakali pendekatan represif yang cenderung digunakan oleh militer Thailand. Alasan lain adalah efisiensi dan efektivitas strategi untuk mengirimkan pesan kepada publik (Barahamin 2014).

13 <http://www.reuters.com/article/2014/05/23/us-thailand-protest-idUSBREA-4JOHN20140523>

Jika gerakan pelajar di Indonesia memosisikan dirinya sebagai pelopor dan agen perubahan, maka gerakan pelajar di Thailand justru mendefinisikan dirinya sebagai provokator (Barahamin 2014). Ia tidak mengambil beban tanggung jawab politik sendirian untuk melakukan perubahan, namun terus menerus mengasah nalar publik tentang isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia. Gerakan pelajar di Thailand menyadari bahwa perubahan menuju ke arah yang lebih demokratis hanya bisa dicapai dengan kekuatan sipil yang terdiri dari berbagai kelompok sosial, termasuk di dalamnya pelajar.

Sebagai penyampai pesan dan agen provokasi, gerakan pelajar Thailand mengkreasikan bentuk-bentuk protes simbolik yang dapat dilakukan dengan jumlah peserta yang terbatas serta mudah dimengerti publik yang menjadi target kampanye (Barahamin 2014).

Pada awal terjadinya kudeta dan sepiunya respon Kaus Merah akan hal tersebut, gerakan pelajar mengorganisasikan dirinya dan kemudian tampil dengan ‘protes Orwell.’ Protes ini dilakukan dengan menggunakan novel berjudul *1984* yang ditulis oleh George Orwell sebagai medium. Para pelajar penentang kudeta akan membaca novel tersebut di titik-titik keramaian publik. Protes-protes Orwell yang dilakukan oleh pelajar membuat novel yang bercerita tentang diktatorianisme tersebut akhirnya dilarang di Thailand karena menjadi simbol anti-kudeta.¹⁴ Tidak hanya menangkapi pelajar yang didapati melakukan ‘protes Orwell’, militer juga kemudian melarang distribusi novel ini dan mencegah pemutaran-pemutaran film yang diadaptasi dari novel tersebut.

Ketika protes Orwell direspon dengan cepat oleh militer Thailand, gerakan pelajar kemudian tidak kehilangan akal. Taktik baru ditemukan dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam penyebaran pesan penentangan terhadap kudeta. Salah satu pencapaian penting adalah ditemukannya salam tiga jari sebagai simbol protes yang diadaptasi dari film *Hunger Games*. Dengan mengandaikan Thailand sebagai Distrik ke 13 Panem, Bangkok sebagai Capitol dan menunggangi tampilan visual dan isi cerita yang menghibur, gerakan protes anti-kudeta berhasil mengirimkan pesannya secara luas kepada publik.

14 <http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/asia/article4115053.ece>

Gerakan pelajar Thailand mentransformasikan sebuah tayangan produksi Hollywood menjadi alat politik penentangan terhadap kudeta. Pendidikan terhadap publik dilakukan dengan memberikan muatan politik dalam pemaknaan film *Hunger Games*.¹⁵ Tiket-tiket gratis untuk menonton *Hunger Games: Mockingjay Part 1* diberikan bagi mereka yang bisa menjawab apa persamaan antara Bangkok dan Capitol.¹⁶ Tidak cukup dengan itu, gerakan pelajar yang menolak kudeta juga melakukan boikot dan memeragakan *Salam Hunger Games*, beberapa saat setelah jenderal Prayuth Chan-ocha memulai pidatonya di balai provinsi Khon Kaen.¹⁷

Salam Hunger Games dan pesan anti-kudeta yang dipromosikan membuat rezim militer mengambil keputusan untuk menekan para pemilik bioskop agar menarik film tersebut dari peredaran.¹⁸ Jenderal Prayuth Chan-ocha juga melarang penggunaan *Salam Hunger Games*, dan secara tersirat melayangkan ancaman kepada para aktivis pelajar jika bersikukuh terus melancarkan protes.¹⁹

Sikap sang diktator justru dipandang berlebihan oleh para pelajar. Ketakutan terhadap *Salam Hunger Games*, telah membuktikan bahwa kekuasaan militer sangat rentan dan kemungkinan untuk melengserkan militer dari kekuasaan menjadi sesuatu yang layak diperjuangkan.²⁰

15 <http://www.reuters.com/article/2014/11/20/us-thailand-protests-idUSKCN0J417520141120>

16 Pembagian tiket gratis ini digagas oleh Liga pelajar Thailand untuk Demokrasi, sebuah grup pelajar yang berbasis di Universitas Thammasat, Bangkok. Aksi ini membuat rezim militer menginstruksikan agar film *Hunger Games: Mockingjay 1* tidak diputar dan ditarik dari peredaran.

17 <http://www.bangkokpost.com/news/politics/444222/prayut-greeted-in-northeast-by-student-protest>

18 <http://www.voicesofliberty.com/article/thai-theaters-ban-hunger-games-mocking-jay-movie-for-inspiring-liberty/>

19 <http://www.bangkokpost.com/news/general/444665/three-finger-fallout-continues>

20 <http://www.bangkokpost.com/news/general/445825/student-protesters-fear-for-their-lives>

Masa Depan Distrik Thai

Ketidakpastian waktu penyelenggaraan pemilu, sepiunya respon Kaus Merah serta keragu-raguan para elit oposisi, membuat kondisi Thailand semakin mengkhawatirkan.

Memori Songkran Berdarah 2010, terus menerus dijadikan alasan untuk membenarkan sikap pasif yang diambil oleh elit Kaus Merah menyikapi kudeta yang kini sudah berlangsung setengah tahun. Satu-satunya kelompok sosial yang terus aktif dan secara terbuka menentang kudeta, adalah gerakan pelajar. Itupun dengan protes skala kecil yang masih jauh dari prediksi untuk dapat memicu gerakan sosial yang lebih luas.

Sementara itu indikasi untuk terus berkuasa lebih lama telah ditunjukkan secara tersirat dan berkali-kali oleh jenderal Prayuth. Dalam pidatonya di balai provinsi Khon Kaen, 19 November lalu, sang diktator menjanjikan Thailand yang lebih baik dan sejahtera. Ia meminta agar masyarakat Thailand tak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa. Menyarankan agar tidak ada yang ‘terprovokasi’ oleh ‘aktivitas-aktivitas politik yang tidak bermanfaat’.

Pidato yang lebih berupa ancaman tersirat oleh pemimpin junta militer tersebut, ikut menegaskan pendekatan represif yang ditempuh sejak awal kudeta. Human Rights Watch (HRW), misalnya, telah mengecam jenderal Prayuth atas tiadanya itikad untuk mengembalikan kekuasaan kepada kekuatan sipil, penerapan sensor ketat terhadap media, penangkapan semena-mena dan represi terhadap hak berkumpul.²¹

Namun sang jenderal tidak bergeming.

Dalam salah satu pidatonya di stasiun televisi PBS beberapa waktu lalu, diktator Prayuth mengutarakan optimismenya akan datangnya ‘masa

21 <http://www.hrw.org/news/2014/11/24/thailand-unending-repression-6-months-post-coup>

yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata'.²² Janji tersebut, terutama diarahkan kepada mereka yang berdiam di daerah utara dan timur laut, yang merupakan daerah basis pendukung keluarga Shinawatra. Kedatangan Prayuth ke provinsi Khon Kaen juga dipandang sebagai upaya diplomatis untuk memenangkan hati simpatisan Kaus Merah. Dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil.

Namun jika hal itu sampai terjadi, maka Thailand tidak bisa lagi disebut *Thai*, karena tempat ini tak lagi menawarkan kebebasan.***

**Distrik Thai adalah sebutan para penentang kudeta untuk menggambarkan kondisi Thailand di bawah junta militer, dengan meminjam narasi fiksi film Hunger Games.*

Kepustakaan:

Anderson, Benedict (1993). Radicalism after Communism in Thailand and Indonesia. *New Left Review* 202 (November-December), 3–14.

Askew, Marc (2010). "Introduction: Contested Legitimacy in Thailand." dalam *Legitimacy Crisis in Thailand*, Marc Askew (ed). Chiang Mai: Silkworm Books, pp 1-30.

Bajoria, Jayshree and Carin Zissis, (2008). *The Muslim Insurgency in Southern Thailand*. Council for Foreign Relations

Barahamin, Andre (2014). *Fighting Against Cognitive Capitalism in South-east Asia: Introduction on Student Movement in Myanmar, Thailand, the Philippines and Indonesia*. Hue Pedagogical Center, Vietnam.

22 PBS TV, 3 November 2014

- Battersby, Paul (1999). *Border Politics and the Broader Politics of Thailand's International Relations in the 1990s: From Communism to Capitalism*. Pacific Affairs, Vol. 71, No. 4 (Winter, 1998-1999), pp. 473-488
- Bunbongkarn, Suchit (2004). "The Military and Democracy in Thailand". In R.J. May & Viberto Selochan. *The Military and Democracy in Asia and the Pacific*. ANU E Press. pp. 52-54
- Chachavalpongpun, Pavin (April 2013). "*Thailand's Red Networks: From Street Forces to Eminent Civil Society Coalitions*". Southeast Asian Studies at the University of Freiburg, Occasional Paper (14)
- Chalk, Peter (2008) *The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand: Understanding the Conflict's Evolving Dynamic*. RAND Counterinsurgency Paper
- Charoensin-o-larn, Chairat (2013). *Redrawing Thai Political Space: The Red Shirt Movement. Cleavage, Connection and Conflict in Rural, Urban and Contemporary Asia*. Ari Springer. pp. 201-222.
- Funston, John (ed.) (2009). *Divided over Thaksin: Thailand's coup and problematic transition*, Institute of Southeast Asian Studies
- Hall, D.G.E (1997). *A History of Southeast Asia*, London: McMillan Limited
- Heaton, William R. (1982). *China and Southeast Asian Communist Movements: The Decline of Dual Track Diplomacy*, dalam Asian Survey, Vol. 22, No. 8
- Jeamteerasakul, Somsak (1991). *The Communist Movement in Thailand*. PhD thesis, Department of Politics, Monash University.
- Leifer, Michael (1995). "Thammasat University Massacre 1976" dalam *Dictionary of the Modern Politics of South-East Asia*, Taylor & Francis
- Lertchoosakul, Kanokrat (2012). *The Rise of the Octobrists: Power and Con-*

flict among Former Left Wing Student Activists in Contemporary Thai Politics. PhD Thesis, Department of Government, the London School of Economics and Political Science.

Punyaratabandhu-Bhakdi, Suchitra (Feb., 1984). *Thailand in 1983: Democracy, Thai Style*. Asian Survey, Vol. 24, No. 2, A Survey of Asia in 1983: Part II. Pp: 187-194

Thabchumpon, Naruemon and Duncan McCargo (November–December 2011). “Urbanized Villagers in the 2010 Thai Redshirt Protests: Not Just Poor Farmers?”. Asian Survey 51 6): 993–1018

Taylor, Jim (April 2012). “Remembrance and Tragedy: Understanding Thailand’s “Red Shirt” Social Movement”. *Sojourn — Journal of Social Issues in Southeast Asia* 27 (1): 120–152.

Sumber: <http://indoprogress.com/2014/12/distrik-thai-potret-thailand-paska-kudeta-22-mei-2014/>

Junta Militer Penindas HAM di Thailand

Giles Ji Ungpakorn

THAILAND kini sedang menderita dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kudeta kedua dalam sepuluh tahun terakhir. Junta militer baru yang jelas arogan dan bodoh, untuk sementara ini sukses menekan semua perbedaan pendapat. Pemimpin kudeta Jenderal Prayuth Chan-ocha, kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri, dengan dibantu oleh anggota parlemen militer yang juga merupakan hasil penunjukan langsung oleh sang jenderal. Sebuah peristiwa yang sama sekali tidak mengejutkan. Prayuth bahkan tidak perlu menghadiri acara ‘pemilihan’ yang secara mutlak memenangkan dirinya.

Kudeta militer terakhir, yang terjadi pada akhir Mei 2014 itu, mengikuti jejak kudeta sebelumnya pada September 2006. Ia menggenapi tiga ‘kudeta judicial’ yang terjadi beruntun, dan penindasan berdarah disertai pembunuhan oleh tentara yang dibantu oleh Partai Demokrat terhadap gerakan pro-demokrasi Kaus Merah pada tahun 2010.¹

Sejak tahun 2005, masyarakat dan kondisi politik Thailand telah terjerembab dalam krisis mendalam yang karakternya ditandai dengan pembelahan antara mereka yang percaya dengan demokrasi dan mereka yang memilih diktatorian sebagai jalan. Di kelompok diktatorian terdapat tentara, para elit royalis,² kelompok menengah dan gerakan royalis mereka yang bernama Kaus Kuning, Partai Demokrat dan kelompok-kelompok NGO.

Pada sisi demokrasi berdiri Kaus Merah; kelompok gerakan sosial terbesar dalam sejarah gerakan kontemporer Thailand, dan berbagai partai politik

1 Peristiwa yang dimaksud adalah Tragedi Songkran Berdarah tahun 2010. Lihat <http://www.news.com.au/travel/travel-updates/killed-and-2643-injured-in-five-days-during-thailands-songkran-festival/story-fnizu68q-1226887849142>

2 Royalis adalah sebutan untuk kelompok sipil menengah ke atas dalam lapis masyarakat Thailand yang mendukung monarki.

dari pengusaha kaya raya Thaksin Shinawatra dan saudari perempuannya Yingluck yang juga mendukung Kaus Merah. Partai mereka yang terakhir, yang memenangkan suara mayoritas dalam pemilu 2011, disebut Pheu Thai Party (PTP).³ Partai ini merupakan rekonstruksi dari partai-partai Thaksin terdahulu,⁴ yang dibubarkan oleh dua kudeta judisial yang terjadi berturut-turut. Sejak pemilu 2011, pemerintahan dikepalai oleh Yingluck Shinawatra, Perdana Menteri perempuan pertama dalam sejarah Thailand. Ini adalah pemerintahan yang dijatuhkan melalui kudeta Mei itu.

Jenderal Prayut telah menjadikan dirinya sebagai ‘Supremo’ Thailand, menempatkan dirinya sebagai orang yang memiliki kekuasaan terhadap pos-pos penting dalam kekuasaan. Hal ini mengingatkan kembali pada masa-masa kelam saat berkuasanya diktatorian militer pada dekade 1960-an hingga tahun 1970-an. Seperti yang dikatakan penulis Wat Wanyangkoon, ‘Junta militer hari ini adalah sampah sejarah yang ditinggalkan oleh era Perang Dingin’.

Hal yang paling mencolok terkait kudeta 2014 adalah begitu cepat dan masifnya respon pada hari-hari awal kudeta. Tiga hari setelah kudeta terjadi, protes massal yang digagas oleh masyarakat umum secara simultan bermunculan di banyak daerah di Bangkok, juga di Chiang Mai dan kota-kota lain. Ini adalah hal yang mengejutkan.

Protes-protes ini memang terjadi secara spontan, tapi akan juga menjadi sebuah kesalahan jika menganggap bahwa massa yang melakukan protes adalah kumpulan yang ‘tidak teroganisir’ hanya karena semata-mata mereka tidak dipimpin oleh gerakan Kaus Merah. Selama bertahun-tahun

3 Nama partai ini secara literer dapat diterjemahkan sebagai Partai Untuk Rakyat Thailand. Penamaan ini secara filosofis ditujukan untuk menentang Partai Demokrat yang dianggap sebagai representasi kelas menengah ke atas.

4 Partai-partai yang dimaksud adalah Thai Rak Thai (Rakyat Thailand Mencintai Thailand) yang dibubarkan pada Mei 2007 oleh Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan kecurangan dalam Pemilu. Untuk itu, Thaksin mendirikan sebuah partai baru yang People’s Power Party (PPP/Partai Kedaulatan Rakyat) yang juga dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Desember 2008.

para aktivis pro-demokrasi telah membangun jaringan-jaringan kecil akar rumput yang mereka organisir sendiri, yang bergerak paralel dengan Kaus Mereka, namun independen dari pengaruh Thaksin Shinawatra atau pengaruh PTP. Protes-protes yang digagas oleh akar rumput tersebut membuat militer kesulitan untuk mengonsolidasikan kekuatan dalam jangka waktu yang lama. Junta militer yang memerintah dengan kekerasan kini sedang berhadapan dengan massa yang sedang marah.

Jangan meragukan sedikitpun bahwa bukanlah hal mudah untuk menentang junta militer dan berdiri berhadapan dengan pasukan bersenjata, yang di masa lalu telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan ragu-ragu menembaki para demonstran yang tidak bersenjata. Harapannya adalah gerakan ini akan tumbuh dan kemudian menyebar hingga ke kelas pekerja yang terorganisir. Tapi hal ini membutuhkan waktu. Taktik ini mungkin lebih tepat diandaikan dengan perumpamaan 'dua langkah maju, satu langkah mundur'.

Setelah protes-protes anti kudeta yang spektakuler di akhir Mei 2014, junta militer secara sistematis menangkapi dan memenjarakan aktivis-aktivis pro-demokrasi terkemuka, dan memaksa mereka berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam politik. Junta militer telah menegaskan bahwa keterlibatan terlalu jauh dalam politik akan berujung pada hukuman penjara yang persidangannya akan dilakukan oleh pengadilan militer. Beberapa figur yang ditahan telah dikenakan tuduhan *Lèse Majesté*⁵ yang berujung pada periode panjang masa tahanan. Beberapa yang lain mesti mengalami penyiksaan sebelum akhirnya terpaksa menyatakan sikap untuk absen dari gelanggang politik. Yang paling baru adalah kasus-kasus penangkapan terhadap aktivis pelajar sayap kiri. Korban terbaru dari *Lèse Majesté* adalah dua pelajar yang memainkan drama politik di Universitas Thammasat tahun 2013.

Banyak aktivis yang kini hidup dalam persembunyian atau terpaksa me-

5 Ini adalah perangkat hukum yang digunakan untuk mereka yang dianggap menghina atau menuduh Raja, keluarga kerajaan, monarki dan instrumen negara. Undang-undang ini membuat Raja, keluarga kerajaan dan monarki tidak bisa dikritik atau dipertanyakan sikapnya. Pihak konservatif pendukung monarki sering menggunakan undang-undang ini untuk membungkam kritik. http://en.wikipedia.org/wiki/Lèse_majesté_in_Thailand

ninggalkan Thailand, di mana sebagian yang lain meminta status sebagai pengungsi politik di berbagai negara. Jumlah aktivis Thailand yang sekarang berada di pengasingan mencapai jumlah terbesar sejak tahun 1970.

Junta militer kini sedang berjudi dengan resiko karena meyakini bahwa jika mereka menciptakan iklim ketakutan, dengan cara menangkap dan menahan sejumlah orang yang menentang kudeta dan aktivis pro-demokrasi, maka dengan sendirinya masyarakat akan mengalami demoralisasi dan kemudian menjadi pasif. Meskipun junta kemudian berhasil memaksakan ketertundukan dan demoralisasi dari mayoritas warga negara, hal ini hanyalah upaya menutupi retakan-retakan dalam masyarakat Thailand. Akar dari krisis hari ini terletak pada lebarnya jurang kesenjangan dalam masyarakat dan bagaimana sebagian besar orang telah menyadari bahwa mereka secara politik dimarginalisasi dan kemudian sampai pada pemahaman bahwa kondisi hari ini seharusnya jauh lebih baik. Saat orang-orang mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka untuk melawan, krisis akan meledak kembali. Dan jika orang-orang belajar dari pengalaman di masa lalu, mereka akan menuntut untuk penghapusan seluruh infrastruktur kekuasaan lama.

Krisis berkepanjangan Thailand ini adalah hasil langsung dari perselisihan yang secara tidak sengaja terjadi antara kelompok yang memilih jalan konservatif untuk mengoperasikan demokrasi parlementar dengan mereka yang memilih jalan yang lebih modern. Hal ini berhubungan dan dapat disamakan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan Partai Thai Rak Thai (TRT)⁶ yang bermaksud memodernisasi masyarakat Thailand agar dapat mendukung ekonomi yang lebih kompetitif di level global, terutama setelah krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1996.

Para pemimpin politik Thailand sejak awal dekade 1970-an selalu mengadopsi sifat *laissez faire* terkait pembangunan, dengan perencanaan minimal dari pemerintah, upah murah, pemenuhan sebagian hak-hak serikat buruh dan pengingkaran tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan standar hidup. Strategi ini memang berhasil di awal-awal penerapannya, tapi saat krisis ekonomi Asia pada 1996 terjadi

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Thai_Rak_Thai_Party

membuktikan bahwa sistem yang digunakan benar-benar gagal. Konsekuensi logis dari krisis ekonomi 1996 menjadi penting untuk memahami krisis politik Thailand yang berlangsung hari ini. Juga penting untuk dipahami bahwa meningkatnya kesenjangan dalam masyarakat Thailand adalah hasil langsung dari pertumbuhan ekonomi pasar bebas. Sekitar 20% dari lapisan atas masyarakat memiliki pendapatan bersih yang setelah dikurangi biaya hidup, berjumlah sepuluh kali lipat dari pendapatan masyarakat pada umumnya.

Tujuan Thaksin pada awalnya adalah berupaya untuk meningkatkan standar hidup dari masyarakat kebanyakan melalui belanja negara. Ia berharap untuk melibatkan masyarakat sebagai 'stake-holder'. Pandangan Thaksin ini didasari keyakinan bahwa peningkatan standar hidup masyarakat akan juga mendorong peningkatan kapasitas dari para konglomerat kapitalis privat Thailand untuk bersaing di pasar global.

Pada pemilu pertama sejak krisis ekonomi tahun 1996, partai yang dipimpin Thaksin mengajukan sebuah rancangan tentang modernisasi dan daftar kebijakan-kebijakan pro rakyat miskin, termasuk di dalamnya adalah skema jaminan kesehatan universal yang mencakup keseluruhan bentuk subsidi dan asuransi kesehatan, kebijakan yang menjadi terobosan pertama dalam sejarah Thailand. Sementara itu di sisi lain, ketika Partai Demokrat menyerukan kepada barisan pengangguran untuk 'kembali ke kampung halaman mereka dan menyandarkan diri kepada keluarga masing-masing' dan di saat yang bersamaan menghabiskan anggaran negara untuk menyelamatkan bank-bank milik para pengusaha kaya yang terancam bangkrut, Thaksin justru menjanjikan bahwa pemerintahannya akan menguntungkan semua pihak, tidak hanya golongan kaya. Janji ini ikut memainkan peranan penting atas kemenangan Thaksin dan TRT dalam pemilu, dan kemudian secara berturut-turut kembali memenangkan setiap pemilu yang berlangsung, meski menggunakan nama partai yang berbeda-beda.

Kebijakan-kebijakan Thaksin, dan basis elektoralnya yang luas, menjadi tantangan bagi berbagai elemen dari elit lama, meskipun mesti digarisbawahi bahwa hal ini tidak pernah sama sekali menjadi tujuan Thaksin. Di masa lalu, para elit memiliki sejenis kesepakatan tidak tertulis untuk

saling berbagi kekuasaan dan akses terhadap sumber-sumber kekayaan nasional. Namun beberapa hal terjadi di luar prediksi.

Kelompok-kelompok NGO pada awalnya menyambut hangat kemenangan Thaksin. Tapi kemudian mereka menentang kebijakan Thaksin untuk menghabiskan anggaran guna meningkatkan standar hidup, mencurigai Thaksin melakukan kecurangan dalam pemilu, terutama setelah fakta bahwa pemerintahan Thaksin jauh lebih sukses mengurangi angka kemiskinan jika dibandingkan dengan kerja-kerja NGO, menjadi sebab mengapa kelompok ini segera berbalik menentang Thaksin. Bersama dengan kelas menengah, barisan NGO kemudian memulai kampanye yang menyalahkan masyarakat luas sebagai kelompok yang terlalu bodoh dan belum layak untuk mendapatkan hak memilih dalam pemilu.

Pada tahun 2005, sebuah persekutuan busuk antara kelas menengah royalis, elit-elit konservatif dan NGO menggagas sebuah gerakan anti pemerintah yang kemudian dikenal sebagai Kaus Kuning. Mereka menyerukan agar militer mengambil alih kekuasaan yang kemudian direspon oleh tentara melalui kudeta pada tahun 2006.

Thaksin kemudian harus mengasingkan diri setelah kudeta pertama di tahun 2006, meskipun partainya kemudian melanjutkan tren kemenangan pada pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2007 dan tahun 2011, dua pemilu yang diselenggarakan di bawah kontrol ketat militer. Junta militer yang berkuasa melalui kudeta sebelumnya menulis sebuah konstitusi militer pada tahun 2007⁷ dan membentuk ‘badan-badan independen’ seperti Senat, pengadilan dan berbagai jenis komisi, yang dipenuhi oleh para loyalis militer. Ide dasar dari perubahan-perubahan konstitusional ini adalah keyakinan bahwa rakyat Thailand mesti ‘diselamatkan dari ketidakmampuan mereka sendiri’. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang terpilih secara demokratik mesti dikendalikan oleh para ‘ahli’ dari kelompok elit konservatif. Di awal tahun ini, badan-badan anti demokrasi ini bekerjasama dengan Sutep Thaugsuban⁸ dan massa Partai Demokrat yang memenuhi jalanan dengan demonstrasi untuk menjungkalkan pemerintahan

7 http://en.wikipedia.org/wiki/2007_constitution_of_Thailand

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Sutep_Thaugsuban

Yingluck, sebelum akhirnya ditutup dengan kudeta militer di bulan Mei.

Kali ini, setelah kudeta kedua yang dilangsungkan tahun ini, junta militer ingin memastikan bahwa Thaksin dan pendukungnya tidak lagi memenangkan pemilu. Seluruh kementerian dan unit pemerintahan kini dikontrol penuh oleh personil militer. Pegawai sipil yang memiliki posisi sebelum kudeta digantikan dengan mereka yang loyal terhadap militer atau merupakan bagian dari kroni junta. Langkah lain adalah, bagaimana gighnya Komisi Anti Korupsi berupaya mencari bukti atas tuduhan prematur terkait kasus korupsi terhadap mantan Perdana Menteri Yingluck. Hal ini merupakan jalan 'resmi' untuk melarang Yingluck dan para politisi pendukungnya di PTP untuk terlibat kembali dalam politik. Jika berhasil, hal tersebut bukan tidak mungkin membuka kesempatan untuk mem-bubarkan PTP juga.

Junta militer juga menduplikasi gaya Majelis Nasional Burma, yang terdiri dari mayoritas tentara dan sebagian kecil tokoh sipil yang anti demokrasi. Hal ini bertujuan untuk membentuk sebuah sistem politik baru di mana dapat dipastikan bahwa pemilu yang diselenggarakan nanti di masa depan dapat diatur sesuai kepentingan militer dan kelompok konservatif. Itu mengapa begitu hangatny sambutan yang diterima perwakilan militer Burma ketika berkunjung ke Bangkok bulan Juli lalu, dan hal yang sama juga terjadi ketika kunjungan balasan Jenderal Prayuth ke Burma pada bulan Oktober 2014.

Hipotesis yang kemudian muncul di banyak laporan media massa asing bahwa kekacauan politik berkepanjangan di Thailand itu utamanya disebabkan oleh 'krisis suksesi kerajaan'. Sebuah laporan yang mengada-ada. Adalah sebuah kesalahan mengasumsikan bahwa monarki Thailand memiliki kekuatan riil dan raja secara konstan melakukan intervensi dalam politik. Kenyataannya, raja Bumibol Adulyajev,⁹ yang selama ini selalu menunjukkan kelemahan dan kepengecutannya, mendapatkan keuntungan dari keberadaan junta-junta militer dan pemerintah yang korup yang secara terus menerus menggunakan figurnya untuk melegitimasi aksi-aksi mereka. Sejak Bumibol dilantik sebagai raja untuk menggantikan kakak laki-lakinya yang tewas dalam sebuah kecelakaan senjata, ia selalu menjadi

9 Raja Bhumibol Adulyajev meninggal pada 13 Oktober, 2016.

alat pemenuhan keinginan dari kelompok militer dan elit-elit konservatif. Semasa era Perang Dingin, raja Bumibol juga membiarkan dirinya digunakan sebagai alat Amerika Serikat untuk menjadi simbol menentang 'komunisme'.

Para elit telah setuju bahwa anak laki-lakinya yang memalukan akan menjadi raja berikutnya, meskipun ada kekhawatiran luas di tengah masyarakat. Sang Pangeran¹⁰ dikenal luas sebagai orang yang menyebarkan berbagai foto telanjang dari perempuan-perempuannya di internet. Putra mahkota juga terkenal sebagai orang yang boros dan sangat sering melecehkan pegawai rendahan. Tapi elit-elit Thailand tidak memiliki opsi yang lain, untuk sampai memberikan mahkota kepada saudari perempuannya, seorang Putri¹¹ yang tidak menikah, atau bahkan sampai memberikan mahkota kepada orang lain, yang beresiko menghancurkan mitos yang dibangun selama ini dan akan melecehkan tradisi monarki. Jika Putra Mahkota dapat disingkirkan karena ia 'tidak memenuhi prasyarat' untuk menjadi raja, maka hal ini dapat membuka kemungkinan untuk dilangsungkan pemilihan atau penunjukan kepala negara.

Hal yang jauh lebih penting adalah, teori mengenai suksesi kerajaan juga mengasumsikan bahwa krisis politik dan sosial yang terjadi hari ini semata-mata hanya persoalan mengenai rivalitas antar kelompok elit tanpa melibatkan jutaan masyarakat luas. Pandangan seperti ini adalah cara pandang politik *top-down*.

Hari ini yang kita saksikan adalah kekuatan neoliberal anti demokrasi sedang merangkak keluar dari sarang mereka untuk menolong junta militer membangun peta menuju jalan 'Demokrasi Terpimpin, Gaya Neoliberal'. Yang menonjol di antara mereka adalah bos-bos universitas bergaji tinggi dengan pemikirannya yang konservatif. Pemerintahan militer yang dibentuk setelah mengambilalih kekuasaan melalui kudeta tahun 2006 juga

10 Putra Mahkota yang dimaksud adalah Somdech Phra Boroma Orasadhiraj Chao Fah Maha Vajiralongkorn Sayam Makutrajakuman atau dikenal dengan nama, pangeran Vajiralongkorn. Lebih lanjut lihat profilnya di <http://en.wikipedia.org/wiki/Vajiralongkorn>

11 Putri Sirindorn yang bernama lengkap Somdech Phra Debaratanarajasuda Chao Fa Maha Chakri Sirindhorn Rathasimagunakornpiyajat Sayamboromrajakumari adalah putri mahkota setelah amandemen konstitusi Thailand pada tahun 1974.

mengikuti kebijakan-kebijakan neoliberal.

Namun memang kesenjangan yang disebabkan oleh neoliberalisme telah ikut mendorong percikan ketidakpuasan di antara rakyat Thailand selama resesi ekonomi tahun 1996, yang kemudian berujung pada dukungan massa kepada partai-partai politik Thaksin dan juga mengerucut pada krisis politik saat ini. Di bulan Juli 2014, Sekretaris Menteri Kesehatan menyarankan agar skema bebas biaya kesehatan mesti ditinjau kembali dan mengusulkan agar pasien harus mampu membayar setidaknya setengah dari tagihan biaya kesehatan mereka.

Sementara itu Komisi Anti Korupsi juga mengusulkan kepada Komisi Pemilu mengenai rencana agar memaksa seluruh partai politik untuk memasukkan daftar manifesto mereka sebelum masa kampanye dimulai. Hal ini dicurigai sebagai cara kekuatan neoliberal anti-demokrasi agar dapat ‘menyapu habis’ semua rancangan kebijakan yang pro terhadap rakyat miskin dengan menggunakan anggaran negara. Para pendukung neoliberal membenci penggunaan uang negara untuk keuntungan mayoritas rakyat dan menyebut hal ini sebagai ‘kebijakan populis’ dengan maksud menghina. Di saat yang bersamaan, banyak orang begitu gembira ketika militer dengan sengaja meningkatkan anggaran mereka sendiri!

Secara kasar dapat dikatakan, ada ribuan aktivis dan pendukung gerakan pro-demokrasi Kaus Merah di seantero Thailand, termasuk di ibu kota Bangkok. Gerakan Kaus Merah tidak dapat disederhanakan sebagai fenomena rural yang berbasis di daerah utara dan timur laut Thailand, seperti yang diklaim oleh komentator-komentator dungu. Kaus Merah melancarkan perjuangan kelas menentang para elit karena mayoritas pendukung Kaus Merah adalah orang-orang kebanyakan, warga pekerja di daerah urban atau rural. Kaus Merah adalah gerakan kelas pekerja dan petani; kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan populis Thaksin. Tapi gerakan ini tidak dapat hanya disederhanakan semata-mata sebagai perjuangan kelas. Faktanya, perjuangan kelas dalam kenyataannya tidaklah sederhana atau murni.

Krisis di Thailand memiliki dimensi-dimensi kelas yang penting, tapi juga hal ini semakin rumit karena kelemahan politik dari gerakan Kiri dan ge-

rakan pekerja yang terorganisir. Hal ini menjelaskan mengapa partai-partai Thaksin pada akhirnya selalu dominan dan memimpin Kaus Merah. Walau memang pada awalnya Kaus Merah didirikan oleh tiga anggota parlemen terpilih dari partai Thaksin, namun Kaus Merah kemudian bertumbuh menjadi gerakan sosial akar rumput dengan coraknya sendiri.

Thaksin Shinawatra sendiri merupakan taipan pengusaha yang kaya raya dan partai-partainya selalu merepresentasikan faksi modern dari kelas kapitalis. Bagaimanapun juga, kita harus bisa mengerti hubungan 'dialektik' antara Thaksin dan Kaus Merah.

Ribuan warga kebanyakan yang mendukung Kaus Merah memang berjuang untuk demokrasi, harga diri dan keadilan sosial bagi diri mereka. Pada saat yang bersamaan, Thaksin dan aliansi politiknya memiliki tujuan yang sama sekali berbeda. Mereka menginginkan kembalinya pengaruh politik yang mereka miliki sebelum terjadinya kudeta di tahun 2006. Namun pada saat yang bersamaan, Kaus Merah juga mendukung Thaksin.

Analisis dialektik ini menjelaskan mengapa terjadinya pengkhianatan oleh Yingluck, Thaksin dan PTP hari ini terhadap perjuangan menuju demokrasi yang dicita-citakan Kaus Merah. Para elit ini telah nyata menyerah kepada junta militer dan menolak untuk mengambil kepemimpinan dalam perjuangan menentang diktatorianisme. Thaksin baru-baru ini menyerukan agar semua orang bekerja sama dengan militer. Para pemimpin Kaus Merah (di UDD) yang mendukung PTP sudah mengikuti langkah ini.

Alasan mengapa Yingluck, Thaksin dan PTP mesti menyerah kepada junta militer karena mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Antara mengerahkan jutaan pendukung PTP dan Kaus Merah untuk menjungkal Orde Lama, atau mengambil jalan damai dengan para elit yang selama ini menjadi rival mereka. Jika mengingat bahwa Thaksin, Yingluck dan PTP sebenarnya berkarakter 'politisi pengusaha kaya', maka secara alami mereka mengambil opsi yang terakhir.

Ini mengapa kaum sosialis di Thailand selalu mengadvokasikan bahwa kelompok progresif dalam Kaus Merah perlu untuk menyatukan diri dan membentuk semacam organisasi radikal, yang memilih hubungan yang

jelas dengan kelas pekerja, agar menjaga terus hidupnya aspirasi awal dari Kaus Merah. Kegagalan untuk membentuk organisasi semacam ini menjelaskan mengapa terjadinya kegagalan dalam perjuangan menentang militer hanya sebulan setelah terjadinya kudeta di bulan Mei.***

II

Studi Kasus Mesir

Benarkah Ada Kudeta Militer di Mesir?

Ted Sprague

“MILITER Mesir Menumbangkan Mursi”. Begitu bunyi tajuk utama *BBC* ketika Mursi jatuh.

“Presiden Mursi ditumbangkan di dalam sebuah kudeta,” lapor *CBC*.

The Guardian menulis, “Militer Mesir menyingkirkan Presiden Mohamed Mursi.”

Dengan berita bertubi-tubi dari berbagai media ini, tiba-tiba sejumlah Kiri menjadi khawatir dan ikut-ikutan latah: “bahaya kudeta militer, bahaya kudeta militer!”

Tetapi benarkah ada kudeta militer di Mesir?

Setelah disahkannya UU Ormas, dan juga karena trauma kediktatoran militer Orde Baru di Indonesia, banyak kawan-kawan di Indonesia menjadi agak terlalu paranoid terhadap apapun yang berhubungan dengan militer. Tetapi bukan hanya di Indonesia, di negeri-negeri lain juga urat saraf Kiri-kiri kita juga begitu sensitif dan mudah latah.

Militer Mesir mengintervensi dan melengserkan Mursi karena tekanan yang begitu besar dari jutaan rakyat Mesir, yang membanjiri jalan-jalan dan alun-alun di semua kota di Mesir. Menurut laporan yang dirilis Menteri Dalam Negeri dari kabinet Mursi sendiri, disebutkan bahwa sekitar 17 juta rakyat Mesir turun ke jalan. Laporan lain mengatakan 20 juta, dan bahkan sampai 30 juta rakyat. Ini adalah demonstrasi terbesar di dalam sejarah umat manusia, yang jauh lebih besar dibandingkan revolusi dua tahun yang lalu ketika Mubarak tumbang.

Pada revolusi babak kedua ini, seluruh lapisan rakyat –bukan hanya yang

paling maju saja, tetapi juga yang paling terbelakang—terlempar ke dalam arena politik dan meletup-letup. Bahkan orang-orang yang setahun lalu memberikan suara mereka kepada Ikhwanul Muslimin, juga turun ke jalan menuntut lengsernya Mursi. Mereka tidak lagi punya ilusi pada demokrasi borjuasi, tidak lagi menunggu sampai masa jabatan orang yang mereka pilih habis. Mereka membawa demokrasi langsung ke jalan-jalan. Inilah demokrasi sesungguhnya, dan bukan setiap lima tahun sekali mengikuti pemilu.

Rakyat Mesir dalam jutaan bergerak dengan sendirinya dan bukan atas komando militer sama sekali. Bukanlah militer yang mengumpulkan 22 juta tanda tangan dari rakyat yang menuntut diturunkannya Mursi. Bukan juga militer yang mengorganisir tanggal demonstrasi. Militer hanya mengintervensi ketika situasi sudah sangat gawat dan dapat meledak menjadi revolusi rakyat sepenuhnya di luar kendali siapapun. Rakyat sudah mengelilingi gedung-gedung pemerintah dan istana presiden, dan siap merangsek dan membakarnya. Mursi sebenarnya sudah kehilangan kekuasaan, tetapi dia tetap keras kepala. Bahkan para menteri sudah turun dan meminta dia untuk turun juga karena rakyat sudah begitu geram. Sebagian kelas penguasa paham bahwa mereka harus mengorbankan Mursi dan Ikhwanul Muslimin demi menjaga keberlangsungan seluruh sistem politik ini. Kalau militer tidak campur tangan, dengan berbicara atas nama rakyat, tidak diragukan kalau revolusi ini akan berlangsung di luar kendali siapapun. Rakyat akan mengambil kekuasaan di tangannya sendiri dan bahkan mempersenjatai diri mereka. Kelas penguasa Mesir, dari yang berjenggot sampai yang berdasi rapi, dan juga para petinggi Miiter, akan kehilangan seluruh kekuasaan mereka di seantero negeri. Yang kita saksikan di sini bukanlah kudeta militer, tetapi manuver kelas penguasa untuk menyelamatkan situasi.

Dua tahun yang lalu ketika Mubarak ditumbangkan oleh rakyat, skenario yang serupa juga terjadi. Militer campur tangan karena sang presiden terlalu keras kepala. Dewan Agung Militer, setelah demonstrasi rakyat menjadi tambah radikal dan tidak menampakkan tanda-tanda akan surut, lalu menyatakan “dukungannya terhadap tuntutan-tuntutan sah rakyat,” dan dengan ini secara resmi mencampakkan dukungannya terhadap Mubarak. Militer lalu membentuk pemerintahan interim yang ada di tangan Dewan

Agung Militer. Tetapi pada saat itu tidak ada satupun pemerintahan di dunia yang mengutuk ini sebagai sebuah kudeta militer terhadap Mubarak, padahal salah satu perintah pertama dari militer setelah Mubarak jatuh adalah mengosongkan lapangan Tahrir dan melarang demonstrasi. Kelas penguasa dunia justru menghela napas panjang ketika militer Mesir telah menyelamatkan situasi ini dan mengambil kendali, dan mereka segera menyatakan bahwa era demokrasi telah dimulai di Mesir. Militer lalu melakukan berbagai manuver dengan Ikhwanul Muslimin dan kelompok oposisi borjuasi lainnya, yang mereka lihat sebagai sekutu-sekutu yang dapat diandalkan untuk menghentikan laju revolusi.

Ketika Ikhwanul Muslimin, yang merupakan seksi borjuasi berjenggot, terpilih dalam pemilu tahun lalu, Militan (International Marxist Tendency) mengatakan dengan jelas bahwa rezim ini tidak akan dapat bertahan lama, karena ia tidak akan bisa menyelesaikan krisis di dalam masyarakat Mesir hanya dengan ayat-ayat suci. Masalah fundamental di Mesir adalah masalah roti. Seperti yang dikatakan salah seorang demonstran muda di Alexandria beberapa hari lalu: “Tidak ada yang berubah sama sekali; gaji saya tidak naik. Istri saya hamil, bagaimana saya dapat memberi makan bayi saya?”

Selama sistem ekonomi di Mesir adalah sistem kapitalisme, tidak peduli dibungkus dengan ekonomi syariah atau ekonomi keagamaan apapun, maka rakyat miskin tidak akan bisa keluar dari jurang kemiskinan mereka. Ini bukanlah protes menentang Islam, karena jelas terlihat banyak perempuan berkerudung yang tumpah ruah di jalan. Ini adalah protes menentang sistem ekonomi yang tidak adil dan tidak dapat mensejahterakan rakyat, sebuah sistem yang diwakili oleh Mubarak dan sekarang oleh Mursi. Jutaan rakyat Mesir mungkin belum sampai ke kesadaran bahwa mereka sedang berjuang melawan sistem kapitalisme, tetapi mereka dengan cepat sedang bergerak ke arah kesadaran ini. Inilah yang mengkhawatirkan para penguasa. Satu hari saja Mursi –ataupun Mubarak dua tahun yang lalu– terus memaksa bertahan, maka kesadaran rakyat akan melompat bahkan lebih jauh. Inilah alasan mengapa sebagian seksi kelas penguasa – tidak hanya para petinggi militer – mendorong agar mereka turun.

Selain itu, para petinggi militer khawatir kalau revolusi yang semakin mel-

uas ini akan berpengaruh pada tentara bawahan mereka. Pada revolusi pertama dua tahun yang lalu, jelas para tentara bawahan mulai bersimpati pada rakyat dan revolusi. Angkatan bersenjata, di bawah hantaman revolusi, mulai retak. Stasiun televisi *Al Jazeera* melaporkan bagaimana sejumlah tentara meletakkan senjata mereka dan ikut turun berdemonstrasi dengan rakyat. Oleh karenanya para petinggi militer pada saat itu tidak bisa menggunakan tentara untuk menumpas revolusi sama sekali. Kalau mereka mencoba melakukan ini, jelas moncong senjata akan berbalik ke para petinggi militer ini.

Bertolt Brecht, seorang penyair Jerman, menulis sebuah puisi yang dengan gamblang menggambarkan ini:

*jenderal, tankmu adalah kendaraan hebat
bisa meratakan hutan dan menggilas ratusan orang
namun ia punya satu kelemahan:
ia butuh pengemudi*

*jenderal, pesawat pengebommu sangatlah kuat
bisa terbang lebih cepat dari badai dan mengangkut
barang lebih besar dari gajah*

namun ia punya satu kelemahan:

ia butuh mekanik

*jenderal, manusia sangatlah bermanfaat
dia bisa terbang dan bisa membunuh
namun ia punya satu kelemahan:
ia bisa berpikir*

Hal yang sama terjadi, dalam skala yang lebih luas dan dalam, pada revolusi babak kedua ini. Kalau dua tahun lalu demonstrasi hanya dalam jumlah jutaan, kali ini dalam jumlah puluhan juta. Setiap tentara pasti punya ayah atau ibu, anak atau keponakan, paman atau bibi, saudara sepupu atau kawan, yang terlibat di dalam demonstrasi ini. Para tentara bawahan ini tidak buta dan tidak tuli. Mereka adalah manusia yang bisa berpikir, dan

para petinggi militer Mesir paham ini. Mereka tahu mereka tidak bisa serta-merta memerintahkan bawahan mereka untuk menumpas revolusi. Militer ada dalam posisi yang lemah, dan bukan dalam posisi yang kuat sama sekali. Inilah kenyataan yang sesungguhnya.

Inilah alasan mengapa kali ini pemerintahan interim yang dicanangkan oleh militer bukanlah di tangan Dewan Agung Militer seperti dua tahun yang lalu, tetapi diberikan kepada Kepala Hakim Pengadilan Konstitusi, Adly Mahmud Mansour. Ini adalah indikator jelas dari lemahnya intervensi militer kali ini. Dua tahun yang lalu ketika pemerintahan interim dipegang oleh Dewan Agung Militer, mereka sangatlah dibenci oleh rakyat dan berkali-kali terjadi baku hantam dengan demonstran yang sampai mengakibatkan korban jiwa. Petinggi militer kali ini tidak berani mengulang hal yang sama, apalagi dengan puluhan juta rakyat yang telah tumpah ruah.

Pada akhirnya, untuk dapat mengerti analisis di atas, kita harus pertama-tama memahami karakter dari negara. Negara, pada analisa terakhir, setelah dilucuti dari semua pernak-perniknya, adalah badan orang-orang bersenjata yang merupakan alat penindas satu kelas terhadap kelas yang lainnya. Negara adalah, seperti kata Marx dan Engels, komite eksekutif untuk mengurus masalah-masalah kelas penguasa.

Tetapi ini barulah ABC dari Marxisme, setelah ABC ada abjad-abjad lainnya, dan lalu ada suku-suku kata, dan kalimat-kalimat. Negara, dalam situasi tertentu, dapat menjadi independen dari kelas yang dia layani. Engels menulis:

“Akan tetapi, ada pengecualian, pada saat periode dimana kelas-kelas yang berbenturan memiliki kekuatan yang seimbang sehingga kekuasaan negara sebagai penengah memperoleh, untuk sementara, kemandirian pada tingkatan tertentu dari keduanya ...”

Pada momen-momen kritis dimana tidak ada satu kelas pun yang bisa menang, maka negara, terutama badan bersenjatanya, akan memperoleh kemandirian tertentu untuk mengintervensi di luar kehendak kelas penguasa. Bahkan kadang-kadang Negara akan melakukan hal-hal yang

tidak disetujui sepenuhnya oleh kelas penguasa, tetapi sebenarnya untuk melayani kepentingan kelas penguasa secara keseluruhan. Jadi hubungan antara kelas penguasa dan negara bukanlah bersifat satu arah dan formalistik, tetapi bersifat dialektis. Namun secara umum negara borjuasi akan tetapi melayani kepentingan kelas borjuasi. Dalam konteks Mesir, campur tangan militer dalam menumbangkan rezim Mursi (dan Mubarak) semata-mata hanya demi menyelamatkan kapitalisme secara keseluruhan. Tetapi mereka melakukan ini dari posisi yang sangat lemah dan dengan tangan yang terikat, yakni karena tekanan puluhan juta rakyat Mesir.

Contoh ekstrim, dengan situasi yang berbeda, adalah Indonesia pada tahun 1965. Negara (badan orang-orang bersenjata atau militer) juga melakukan intervensi, tetapi dari posisi yang sangat kuat. Pada dekade 1960an, sejarah mencatat sebuah pertempuran kelas yang sangatlah tajam, tetapi tidak ada satu kelas pun yang bisa menang dan merebut kekuasaan. Kelas buruh, yang sebenarnya mampu merebut kekuasaan, disuruh oleh PKI dan Soekarno untuk tidak merebut kekuasaan dan tidak bergerak ke sosialisme, dengan dalih bahwa revolusi ini adalah revolusi nasional. Sementara kelas borjuasi nasional Indonesia terlalu lemah untuk mengalahkan kelas buruh. Situasi yang menggantung ini harus diselesaikan dan militer akhirnya melakukan intervensi dalam bentuk kudeta yang berdarah-darah. Tidak hanya kelas buruh yang dihancurkan, bahkan sejumlah lapisan kaum borjuasi hak-haknya dirampas dan seluruh ekonomi diserahkan kepada militer.

Peristiwa ini pada akhirnya dilakukan demi keberlangsungan kapitalisme dan kelas borjuasi secara keseluruhan. Inilah fenomena yang disebut Bonapartisme, yang dalam sejarah perjuangan kelas –tidak hanya dalam kapitalisme– telah kita saksikan berulang kali, yakni dimana negara, dalam kasus tertentu, memperoleh kemandirian tertentu dari kelas yang dilayani.

Media kapitalis dan penguasa seluruh dunia hari ini punya kepentingan mereka sendiri untuk menggambarkan bahwa jatuhnya Mursi adalah karena kudeta militer. Mereka mencoba mengaburkan kenyataan bahwa ada 30 juta rakyat Mesir yang turun ke jalan. Mereka ingin mengecilkan peran rakyat, dan juga menyebarkan prasangka rasis kalau rakyat Arab adalah

barbar yang membenci demokrasi dan hanya menyukai kudeta militer. Kelas penguasa dunia takut kalau-kalau revolusi Mesir ini ditiru oleh rakyat pekerja dunia. Dalam satu bulan ini saja sudah ada empat pemberontakan besar, di Turki, Brazil, Portugal, dan Mesir.

Kita tentu masih ingat dengan apa yang terjadi dua tahun yang lalu dimana revolusi di Tunisia menyebar dengan cepat, dan bahkan menginspirasi sejumlah perjuangan di Amerika Serikat. Oleh karenanya, kalau kita tidak memahami situasi politik yang sesungguhnya di Mesir dan ikut-ikutan latah “kudeta militer,” kita akan menemukan diri kita menjadi pelayan media kapitalis untuk mengecilkan peran rakyat dan mencegah menyebarkan revolusi ini. Disinilah kita lihat bahwa pemahaman Marxisme secara mendalam adalah krusial dalam gerakan. Tanpa Marxisme sebagai pegangan, kita akan jadi bulan-bulanan dari opini publik borjuasi dan segala prasangka yang disebarkannya. Tidak cukup hanya memahami ABC Marxisme mengenai negara dan merasa puas. Justru yang paling berbahaya adalah pemahaman Marxisme yang setengah-setengah, dan tidak sedikit revolusi yang gagal dengan pahit karena pemahaman yang setengah-setengah ini.

Rakyat Mesir telah menumbangkan Mursi dan Ikhwanul Muslimin. Ini adalah pukulan besar terhadap Islam Politik, yang adalah Islamnya kaum borjuasi. Di Turki, Erdogan dan partai AKP-nya telah tergoncang. Di tanah air, PKS sudah terbukti bobrok dan tidak lebih dari kumpulan pencoleng. Dengan menyedihkan, para petinggi PKS mencoba membela Erdogan dan Mursi. Inilah solidaritas kelas antara PKS, Ikhwanul Muslimin dan AKP, yakni solidaritas kelas kaum borjuasi yang kebetulan beragama sama. Rakyat Mesir dalam jutaan telah menunjukkan bahwa ini bukanlah masalah agama, bukan masalah Islam versus sekularisme. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk melawan penderitaan kemiskinan di bawah sistem kapitalisme.

Hari ini rakyat Mesir telah meraih satu kemenangan, tetapi perjuangan belum selesai. Tidak adanya sebuah partai revolusioner telah memungkinkan militer untuk melakukan manuver dan menyelamatkan situasi dengan menaruh Tuan Mansour sebagai kepala negara sementara. Inilah kelemahan dari gerakan Mesir hari ini, dan tidak ada jalan pintas selain terus membangun kekuatan sosialis revolusioner di dalam gerakan ini.

Selama kapitalisme masih berkuasa di Mesir, maka tidak akan ada jalan keluar bagi rakyat Mesir. Hanya ada satu jalan keluar: rakyat pekerja Mesir menyita hak milik orang-orang kaya yang mengendalikan ekonomi bangsa ini, yang kebanyakan dari mereka punya hubungan dengan rejim Mubarak yang lama, dengan para petinggi Militer, dan dengan para borjuasi berjubah putih. Dengan merebut kekuatan ekonomi dari para penguasa, maka rakyat akan sungguh-sungguh berkuasa dan dapat, untuk pertama kalinya, mengambil nasib mereka ke tangan mereka sendiri.***

Sumber: <http://indoprogress.com/2013/07/benarkah-ada-kudeta-militer-di-mesir/>

Revolusi Sekarang dan Pertanyaan Rumitnya

Tanggapan untuk Ted Sprague

Muhammad Ridha

“REVOLUSI bukan sebuah acara makan malam,” begitu kata Mao Zedong.

Dan rakyat Mesir sekarang memahami benar pernyataan Mao ini. Revolusi Mesir memang bukan sesuatu yang menyenangkan bagi siapapun yang menginginkan kenyamanan, layaknya acara makan malam. Ketika banyak kalangan aktivis kini mengamini begitu saja pernyataan Emma Goldman mengenai “revolusi sebagai tempat kita menari,”¹ maka rakyat Mesir mengambil jalan yang sungguh tidak nyaman dalam membangun revolusinya sendiri. Revolusi mereka bukan parade bersenang-senang di jalan, sambil meneriakkan slogan anti pemerintah dengan harapan bisa dengan tenang kembali ke kondisi rutin masing-masing di keesokan harinya. Revolusi rakyat Mesir justru mengajukan problem revolusioner paling rumit untuk dijawab oleh siapapun yang menghendaki revolusi sekarang: “apa yang akan terjadi di esok pagi setelah mobilisasi populer ini usai?”

Problem ini setidaknya kembali mengemuka ketika rakyat Mesir kembali menggulingkan rezim berkuasa di Mesir. Seperti tahun 2011, penggulingan 2013 ini juga dilakukan melalui mobilisasi populer rakyat. Kali ini, mobilisasi populer ditujukan kepada kepemimpinan Islam Politik di bawah presiden Muhammad Mursi. Bagi rakyat Mesir, Mursi telah gagal untuk

1 Lihat pernyataan Emma Goldman, “If I can’t dance, it is not my revolution.” Pernyataan Goldman seakan meyakini bahwa revolusi sebagai sesuatu yang dapat dilakukan dengan cara yang mudah sekaligus nyaman, layaknya menari di lantai dansa. Bukankan ini yang kita temukan dalam pengalaman kita di tengah banyaknya mereka yang disebut “intelektual dan aktivis kritis” yang menghendaki transformasi sosial namun alpa untuk melakukan pengorganisasian kesadaran politik basis massa rakyat yang berlawanan, selain menjentikkan jari pada mouse komputer di dunia maya?

merealisasikan apa yang menjadi alasan mendasar rakyat ketika turun ke jalan pada tahun 2011. Tidak heran jika tuntutan-tuntutan yang sempat mereka teriakkan saat menurunkan Mubarak di lapangan Tahrir, kembali dikumandangkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kekuasaan Islam Politik Mursi dengan kekuasaan otoritarian Mubarak. Ini bukti bahwa rakyat Mesir serius dengan aspirasi revolusioner mereka. Bahwa Mesir setelah revolusi adalah Mesir yang melakukan transformasi radikal atas setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Suatu pernyataan kuat mengenai, “revolusi sampai menang!”

Namun sebagaimana situasi revolusioner, tidak pernah ada yang namanya kondisi yang ideal dalam revolusi itu sendiri. Walau Mursi diturunkan dengan peluh dan darah rakyat Mesir di jalan, namun kali ini intervensi Militer Mesir pada menit-menit terakhir proses penurunan Mursi membuat proses revolusi tidak dapat dinilai dengan mudah.

Bagi beberapa kalangan, proses mobilisasi rakyat tahun 2013 ini masih merupakan suatu peristiwa yang dapat dikatakan revolusioner karena rakyat Mesir sendiri yang melakukan upaya politik kolektif dalam menurunkan Mursi. Akan tetapi, tidak sedikit yang juga mengemukakan bahwa proses kali ini kental dimensi kontra-revolusioner mengingat intervensi militer adalah upaya kudeta yang mengancam prinsip dasar dari revolusi Mesir yang demokratis.

Di sini kita menemukan kembali apa yang rumit dari revolusi Mesir. Revolusi Mesir melampaui secara kreatif problem utama dari demokrasi liberal dengan memberikan jawaban (sementara) melalui demistifikasi legitimasi kekuasaan formal yang membuka ruang baru untuk memahami demokrasi itu sendiri. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini berkelindan dengan masih hadir serta kontributifnya kekuatan politik konservatif, yakni militer Mesir. Revolusi Mesir, dalam hal ini, menjadi penanda utama tentang kompleksitas revolusi dalam epos kontemporer kita. Menjadi penting bagi kita untuk memperjelas serta klarifikasi atas perjuangan revolusioner rakyat Mesir kini. Karenanya tidak terhindarkan bagi kita semua yang masih ber-setia pada jalan revolusi rakyat pekerja, untuk melakukan pembelajaran dari kerumitan-kerumitan ini.

Demokrasi dengan *Demos*

Salah satu yang krusial untuk ditekankan dari Revolusi Kedua yang dilancarkan rakyat Mesir kali ini adalah bagaimana mereka mendemistifikasi makna “demokrasi” itu sendiri. Ketika para ahli “demokrasi” menyatakan bahwa demokrasi adalah semata terbangunnya institusi demokrasi, maka demokrasi bagi rakyat Mesir merupakan jalan utama untuk merealisasikan cita-cita revolusi itu sendiri. Jadi keberadaan sistem demokrasi beserta dengan institusi-institusinya tidak dapat dipisahkan dari cita-cita revolusi yang melahirkannya.

Apa yang terjadi di Mesir dapat dipahami sebagai krisis legitimasi. Habermas (1976) berpendapat bahwa krisis legitimasi dalam kapitalisme muncul ketika kekuasaan politik yang dibangun dengan nilai-nilai tidak sepenuhnya kapitalis (baca: sistem sosial budaya), bertabrakan dengan imperatif dorongan pertumbuhan khas kapitalisme.

Walau tidak sepenuhnya serupa, namun struktur logika Habermas membantu kita untuk memahami mengapa legitimasi kekuasaan Mursi yang diraih melalui demokrasi prosedural (baca: pemilu) sangatlah ringkih, dimana benturan yang terjadi adalah antara aspirasi revolusi dengan dorongan pertumbuhan ekonomi. Pasca berkuasa, alih-alih memberikan infrastruktur politik yang diperlukan untuk merealisasikan cita-cita revolusi, Mursi justru mengambil jalur politik yang bertentangan dengan aspirasi revolusi atas nama pembangunan serta pertumbuhan Mesir. Melalui upaya replikasi rezim ekonomi-politik AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) di Turki, Mursi mengadopsi kebijakan neoliberal di Mesir.

Hal ini dapat dilihat pada kebijakan Mursi untuk mengambil pinjaman sebesar US\$4,8 Miliar dari IMF. Konsekuensi dari pinjaman ini, Mesir harus melakukan penyesuaian struktural melalui pengurangan pembiayaan publik, pemotongan subsidi, peningkatan pajak atas barang kebutuhan dasar, dan devaluasi mata uang Pound Mesir (Shabi 2012). Trajektori ekonomi politik inilah yang kemudian mengondisikan krisis legitimasi rezim pemerintahan Mursi. Ia dianggap telah berkhianat terhadap revo-

lusi rakyat yang melahirkannya.

Namun penjelasan krisis legitimasi ini mencukupi dengan sendirinya karena adopsi neoliberalisme ke negara yang tengah mengalami perubahan, tidak melulu unik pengalaman Mesir. Dalam hal ini argumen Pepinsky (2013) menjadi relevan. Bagi Pepinsky, proses transisi politik yang terjadi di Mesir, khususnya, dapat dilihat melalui perbandingannya dengan Indonesia. Pepinsky menekankan bahwa warisan otoritarianisme adalah penting dalam memahami upaya stabilisasi “demokrasi,” sehingga “Model Indonesia” yang sering dijadikan referensi bagi transisi mulus demokrasi bagi negara Islam, tidak dapat diterapkan di Mesir dikarenakan warisan otoritarianisme yang berbeda.

Saya bersepakat dengan kesimpulan Pepinsky, bahwa ada spesifitas kondisional antara Indonesia dan Mesir. Namun, diagnosa Pepinsky tentang Mesir cenderung mengabaikan dinamika kekuatan serta perjuangan politik yang juga ikut menentukan proses transisi demokrasi itu sendiri. Aspirasi revolusi masih sangat mengemuka dalam benak rakyat biasa di Mesir. Kalangan pemuda, buruh, dokter, pengacara, dan banyak elemen masyarakat lainnya, masih mengupayakan transformasi nyata melalui perjuangan keseharian mereka. Selain itu, masih terdapat elemen kiri radikal (kelompok kiri sosialis dan komunis) yang tetap memperjuangkan aspirasi revolusioner dalam ranah politik formal Mesir (Slocums 2013). Kondisi ini tentu saja sangat krusial untuk mempertahankan subjektivitas revolusioner dalam memengaruhi ruang politik di negara tersebut.

Situasi inilah yang memungkinkan terjadinya mobilisasi populer pasca 2011 untuk menurunkan Mursi. Rakyat Mesir memahami bahwa demokrasi prosedural tidak dapat dipisahkan dari demokrasi substansial yang sudah dibentuk oleh proses revolusi rakyat itu sendiri. Mengabaikan hal ini, tentu saja, berimplikasi pada tidak relevannya bentuk formal demokrasi dengan berbagai institusinya. Institusi-institusi tersebut dibangun untuk merealisasikan cita-cita revolusi, bukan untuk menegosiasikan (bahkan menegasikan) cita-cita tersebut.

Dalam hal ini, rakyat Mesir sukses mendefinisikan secara kreatif mengenai apa yang sebenarnya kita maksud mengenai ruang politik dalam demokra-

si. Ruang politik dalam demokrasi, bagi rakyat Mesir, adalah medan sekaligus untuk melakukan kontrol langsung atas rezim politik yang dibentuknya. Dalam hal ini, mobilisasi populer yang dilakukan adalah bagian tak terelakkan dari proses demokrasi di Mesir. Tidak heran, jika kemudian dalam pengalaman Mesir kini, kita bisa melihat bahwa *demos* (rakyat) tengah mengartikulasikan kekuasaannya dalam demokrasi.

Kudeta Militer: Revolusi atau Kontra-revolusi?

Terlepas dari temuan kreatif dalam revolusi Rakyat Mesir terhadap demokratisasi selama proses kejatuhan Mursi, kita tidak dapat mengabaikan fakta empirik bahwa kekuatan kontra-revolusioner, seperti militer, juga ambil bagian dalam situasi ini. Jangan lupa bahwa militer adalah bagian yang penting dari basis kekuasaan Mubarak, yang membuat rakyat Mesir melancarkan revolusi pada tahun 2011. Intervensi militer (yang disebut banyak kalangan sebagai kudeta militer) sedikit banyak membuat proses kejatuhan Mursi menjadi dimungkinkan. Untuk itu menjadi sangat penting untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya kita maksud dengan peranan militer dalam revolusi ini.

Keterlibatan militer terhadap kejatuhan Mursi bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh relasi yang tercipta antara militer dengan Mursi pasca pemilu, yang merupakan anak kandung dari revolusi 2011. Sejak berkuasa, Mursi memang telah melakukan penyingkiran sistematis terhadap militer. Puncaknya dapat dilihat pada Agustus 2012, ketika Mursi memutuskan untuk memensiunkan Menteri Pertahanan Hussein Tantawi, serta mencopot Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Sami Anan. Hussein Tantawi sendiri adalah ketua Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF, *Supreme Council of Armed Force*). Pemensiunan Tantawi dan dicopotnya Anan, juga bukan sesuatu yang tanpa dasar. Blunder militer di Sinai pada 5 Agustus 2012, yang menewaskan 16 pasukan penjaga perbatasan adalah dasar yang logis bagi Mursi untuk melakukan manuver ini (Rashwan 2012). Bagi Mursi, hal ini menunjukkan bahwa pihak militer sudah terlalu lama bermain politik yang membuat kehilangan fokus untuk melaksanakan tugas utamanya, yaitu mempertahankan Me-

sir dari ancaman eksternal.

Bersamaan dengan dikeluarkannya Tantawi dan Anan, maka proses penyusunan konstitusi yang baru menghilangkan peranan militer dalam konstitusi. Kondisi ini membuat Mursi memegang kontrol penuh atas proses politik Mesir. Situasi ini kemudian menempatkan militer pada posisi minor, seperti posisi kekuatan politik lainnya yang sudah terlebih dahulu dimarginalisasi oleh kepresidenan Mursi dengan Ikhwanul Muslimin-nya, yakni kalangan liberal, sekuler, dan juga kalangan kiri revolusioner. Konjungtur serta konstelasi politik ini kemudian membuat apa yang saya sebut sebagai satu bentuk, mengutip Laclau-Mouffe, logika persamaan (*logic of equivalence*) di antara mereka yang telah termarginalisasi oleh Mursi. Antagonisme ini kemudian mengondisikan lebih lanjut perlawanan revolusioner yang telah dilakukan oleh rakyat Mesir.

Dengan dasar ini, saya berpendapat argumentasi Sprague (2013) yang mengatakan bahwa revolusi yang terjadi sekarang adalah murni revolusi rakyat tanpa ada intensi militer adalah sangat berbahaya. Pendapat Sprague bisa mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa militer Mesir kini sudah tersubordinasi di bawah kepemimpinan politik yang revolusioner. Akan tetapi, posisi ini juga hendak menolak argumen Nugroho (2013) yang berpendapat bahwa yang mampu menentukan kekuasaan adalah mereka yang memiliki bedil, bahwa penggulingan Mursi tidak lebih sebagai kudeta militer belaka tanpa ada konteks perjuangan politik yang melatarinya.

Walau saya bersimpati pada posisi Sprague, akan tetapi saya perlu menekankan bahwa dalam perjuangan revolusioner peranan militer harus diperhatikan. Perhatian pada militer ini penting agar kita tetap mawas diri, agar kita sadar bahwa intervensi militer ini dapat menjadi narasi awal bagi militer untuk melakukan operasi terhadap rakyat atas nama penciptaan keamanan dan ketertiban pasca jatuhnya Mursi. Dengan dalih mengamankan Mesir dari ketidakpuasan pendukung Mursi, Militer akan juga menggunakan hak represinya untuk menundukkan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam Rakyat Mesir. Oleh karena itu, di sini pihak militer Mesir harus dilihat sebagai elemen oportunis-parasit dalam gerakan revolusioner, yang kehadirannya harus secara sistematis dinetralisir dalam proyeksi politik revolusioner.

Penutup

Alan Badiou dalam bukunya *The Rebirth of History* (2012) mengatakan, kerusuhan dapat memiliki signifikansi historisnya sendiri. Hal ini terjadi ketika, *“lokalitas berhenti menjadi terbatas,... ketika komposisi berhenti menjadi seragam, namun secara bertahap menguraikan representasi terpadu dalam bentuk mosaik dari semua orang, ketika, akhirnya, teriakan negatif pemberontakan murni digantikan oleh penegasan permintaan bersama, yang kepuasannya memberikan makna awal tentang kata “kemenangan” (victory)”* (Badiou 2012, h 35).

Hal inilah, yang setidaknya, terjadi dengan revolusi Mesir. Lokalitas Mesir beresonansi dalam pengalaman kita semua. Pengalaman rakyat Mesir dalam menciptakan subjektivitas kolektif revolusionernya, membuat sejarah peradaban kontemporer tidak dapat sama lagi. Kompleksitas serta pertanyaan rumit yang mengiringi proses revolusi di sana, membuat revolusi Rakyat Mesir bukan semata repetisi dari sejarah, lebih dari itu, ia menciptakan alur urutan baru dalam sejarah yang hasilnya hanya bisa ditentukan oleh rakyat Mesir itu sendiri. Tidak heran, jika mereka tidak mengambil jalur yang biasa dikumandangkan oleh ahli-ahli demokrasi dari Barat.

Bagi kita di Indonesia, satu-satunya cara untuk dapat bersetia dengan alasan utama revolusi Mesir adalah dengan memastikan kemenangan penuh rakyat Mesir dalam revolusi mereka. Bukan bersikap patronase dengan mengambil jarak, sembari memberikan jawaban segera atas problem revolusi mereka. Tidak pula dengan mengajukan kesimpulan-kesimpulan yang simplistik atas jalannya revolusi rakyat Mesir itu. Bersetia pada revolusi rakyat Mesir, berarti kita harus terlibat langsung dengan mengajukan problem yang sama yang membuat mereka harus bersusah payah turun ke jalan untuk membangun revolusinya sendiri. Dan ini hanya mungkin dilakukan jika revolusi juga dilakukan di sini, di Indonesia. ***

Kepustakaan:

Badiou, A. (2012). *The Rebirth of History: Times of Riots and Uprising*. London: Verso

Habermas, J. (1976). *Legitimation Crisis*. Cambridge: Polity Press

Nugroho, R. (2013). *Mursi*. Diambil dari <http://tikusmerah.com/?p=819>

Pepinsky, T. (2013). *There Is No Indonesia Model for the Arab Spring*. Diambil dari http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/02/27/there_is_no_indonesia_model_for_the_arab_spring?page=0,1

Rashwan, N.H. (2012). *Mursi's Coup Against SCAF: the Hows and The Whys*. Diambil dari <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/140/50324/Egypt/First-days/Mursis-coup-against-SCAF-The-hows-and-the-whys.aspx>

Shabi, R. (2012). *Egyptians Are Being Held Back by Neoliberalism, not Religion*. Diambil dari <http://www.guardian.co.uk/commentis-free/2012/dec/21/egyptians-hetd-back-neoliberalism-not-religion>

Slocums, B. (2013). *The Left and the Worker Movements in Egypt's Democratic Revolution*. Diambil dari <http://www.thenorthstar.info/?p=7986>

Sprague, T. (2013). *Benarkah ada Kudeta Militer di Mesir?* Diambil dari <http://indoprogress.com/benarkah-ada-kudeta-militer-di-mesir/>

Sumber: <http://indoprogress.com/2013/07/revolusi-mesir-sekarang-dan-pertanyaan-rumitnya/>

Spontanitas Revolusioner dan Kesiapan Organisasi dalam Revolusi Mesir

Tanggapan untuk Muhammad Ridha

Ted Sprague

REVOLUSI bukanlah drama satu babak dengan naskah yang sudah jadi dan tinggal dibacakan dengan suara yang lantang. Mereka-mereka yang mengharapkan sebuah revolusi yang ideal dan murni, pada akhirnya hanya akan menemukan kekecewaan. Revolusi Mesir adalah satu contoh dari sekian banyak yang menunjukkan sebuah proses revolusi yang dialektis, yang tidaklah bergerak dalam garis lurus dan sesuai dengan skema kaku dari pikiran seseorang.

Revolusi adalah sebuah proses yang hidup dan penuh kontradiksi. Ia penuh kontradiksi –dan oleh karenanya hidup– karena revolusi melempar jutaan orang yang sebelumnya tersisihkan dari kehidupan politik ke dalam arena politik secara langsung. Jutaan rakyat jelata ini tidak hanya membawa insting dan tenaga revolusioner mereka, tetapi juga segudang kenaifan, kebingungan, dan prasangka mereka. Yang belakangan ini terus berbenturan dengan fakta-fakta riil revolusi, dan terus mendorong, menarik, dan menghancurkan semua paham lama. Inilah revolusi, dimana bukan hanya pot-pot bunga saja yang pecah tetapi juga semua prasangka lama.

Untuk bisa memahami apa yang terjadi di Mesir, dan, seperti yang diharapkan oleh kawan Ridha, “mengklarifikasikan apa yang sebenarnya kita maksud dengan peranan militer dalam revolusi [Mesir] kini,” kita harus kembali lagi ke fakta, fakta, dan fakta. Hanya dengan mendasarkan diri kita pada fakta –terlebih, fakta yang hidup dan mengalir secara historis– maka kita bisa memulai analisa politik kita di jalur yang tepat.

Kekeliruan pertama dari kawan Ridha adalah pemahamannya mengenai

peran Ikhwanul Muslimin (IM) dan Mursi dalam Revolusi Mesir yang pertama, dan dari situ maka kekeliruan Ridha mengenai relasi antara Mursi dengan militer. Mursi bukanlah “anak kandung dari revolusi 2011” seperti yang dikatakan oleh Ridha. Revolusi yang menumbangkan Mubarak ini tidak diorganisir ataupun dipimpin oleh IM. Semua yang terlibat aktif dalam revolusi Mesir 2011 tahu kalau para pemimpin IM menyeret kaki mereka pada momen-momen penting revolusi, dan layaknya oportunist tulen, hanya meminta Mubarak turun setelah situasi sudah menjadi jelas kalau sang presiden sudah tidak mungkin lagi dapat mempertahankan kursinya. Bahkan IM sendiri tidak bisa –dan tidak pernah– sesumbar mengatakan bahwa merekalah yang memimpin dan mengorganisir pemberontakan 2011, apalagi mengaku sebagai “anak kandung dari revolusi 2011.”

IM bisa terdorong ke depan hanya karena kelemahan pemberontakan rakyat pada 2011, yang meledak dengan spontan dan tanpa organisasi ataupun kepemimpinan revolusioner yang bisa membawanya ke tahapan yang lebih lanjut. Kita melihat hal yang sama dengan spontanitas dari gerakan *Occupy*, *Indignados* dan Revolusi Arab secara keseluruhan.

Mendasari kekeliruan ini sesungguhnya adalah kekurangpahaman kawan Ridha dan banyak orang lainnya terhadap dialektika perkembangan revolusi, kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalamnya yang lalu memberikan ruang untuk peran IM dalam kasus Mesir. Oleh karenanya sebelum kita bergerak lebih lanjut, kita harus kembali lagi ke ABC dialektika revolusi, yakni masalah spontanitas dan kepemimpinan revolusi.

Di sini saya akan kembali ke Rosa Luxemburg. Saya harus meminta maaf karena menyeret para pembaca ke masa hampir 100 tahun yang lalu. Tapi konflik antara aksi massa spontanitas dan kerja organisasi yang sadar (kepemimpinan) terus menerus memunculkan kepalanya di setiap episode dan tahapan pergerakan. Tanpa pemahaman akan hubungan dialektis antara keduanya, kita akan terlempar dari satu sisi ke sisi yang lainnya, jadi korban impresionisme dan terlumpuhkan secara politik.

Rosa Luxemburg dan Spontanitas Dalam Revolusi

Pada fase awal, spontanitas adalah sebuah kekuatan yang memberikan pemberontakan sebuah keunggulan yang besar. Spontanitas membuat sebuah pemberontakan menjadi tidak terprediksi dan oleh karenanya sulit ditumpas secara langsung oleh kelas penguasa. Spontanitas juga memberikan medan dan ruang yang teramat luas untuk segala bentuk kreativitas politik jutaan massa yang sebelumnya tak pernah terekspresikan. Spontanitas menghancurkan semua rutinitas lama yang merantai mereka dalam kehidupan sehari-hari, rutinitas dalam tindakan dan juga rutinitas dalam berpikir. Ia membuka lebar-lebar jendela pikiran massa yang sebelumnya tertutup, dan dengan demikian memberikan jalan bagi gagasan-gagasan revolusioner –yang sebelumnya mereka cibir, jauhi, dan tolak– untuk masuk dan mencengkram pikiran mereka, dan menggoncangnya keras-keras.

Spontanitas memainkan peran yang teramat positif terutama dalam periode hari ini ketika organisasi-organisasi massa rakyat pekerja telah tenggelam dalam rawa reformisme dan birokratisme, sehingga justru menjadi penghambat gerakan. Para pemimpin organisasi massa raksasa –serikat-serikat buruh dan partai-partai kelas pekerja– telah menjadi kerak dalam roda sejarah, sehingga spontanitas massa dapat menjadi sebuah senjata kuat dalam melawan aparatus reformisme yang kaku. Massa buruh bergerak dengan insting dan daya kreatif mereka tanpa menunggu komando perangkat atau tanpa menggubris larangan mereka.

Namun dalam dialektika kita pelajari bahwa apa yang menjadi terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir menjadi terdahulu.

Spontanitas, yang awalnya adalah sumber kekuatan, berubah menjadi titik terlemah dalam revolusi ketika revolusi telah melangkah ke tahapan selanjutnya, yakni ke masalah kekuasaan. Di tahapan inilah dibutuhkan sebuah organisasi dengan program yang jelas dan terdiri dari bunga-bunga terbaik kelas buruh yang telah dikumpulkan dan ditempa dengan seksama jauh sebelum revolusi meledak. Diperlukan sebuah organisasi yang bisa mengumpulkan energi dari ledakan-ledakan spontanitas dan memusatkannya.

Dalam salah satu karya maha besarnya, *Pemogokan Massa*, yang ditulis Rosa Luxemburg menyusul Revolusi 1905 di Rusia, Rosa mengatakan:

“Jika kemudian Revolusi Rusia mengajarkan kita sesuatu, maka ia mengajarkan bahwa pemogokan massa tidak “dibuat” secara artifisial, tidak “diputuskan” secara serampangan, dan tidak “disebar-sebarkan,” tetapi ia adalah fenomena historis yang, pada momen-momen tertentu, dihasilkan dari kondisi-kondisi sosial dengan keniscayaan historis. ... Bila seseorang ingin secara umum mengobarkan pemogokan massa, sebagai sebuah bentuk dari aksi proletarian, dengan cara agitasi yang metodikal, dan berkampanye dari rumah-ke-rumah dengan “gagasan” ini untuk secara perlahan-lahan meyakinkan kelas buruh akan gagasan ini, ini akan menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia dan tidak-berbuah dan konyol, seperti halnya mencoba membuat gagasan revolusi atau perjuangan di barikade sebagai hasil dari sebuah agitasi khusus”.¹

Revolusi tidaklah diciptakan oleh sekelompok kaum revolusioner. Ia tidak dapat direncanakan seperti sebuah pesta makan malam. Usaha untuk mempercepat datangnya revolusi, untuk mengobarkan revolusi, adalah “sebuah pekerjaan yang sia-sia dan tidak-berbuah dan konyol.” Kapitalisme-lah yang akan menciptakan revolusi, seperti halnya ia menciptakan penggali kuburnya sendiri. Akan tetapi, ini barulah paruh pertama dari persamaan revolusioner.

Paruh keduanya adalah bahwa tugas kaum revolusioner adalah untuk memenangkan revolusi yang telah hadir di hadapannya. Disinilah peran organisasi dan kepemimpinan menjadi krusial.

Akan tetapi, setelah kematiannya, banyak sekali karya Rosa Luxemburg yang dicolek seenaknya oleh para musuh Lenin dan Bolshevisme. Dosa terbesar Lenin dan kaum Bolshevik Rusia, bagi para musuhnya, adalah bahwa Lenin dan kawan-kawannya dengan giat telah mempersiapkan se-

1 Rosa Luxemburg, *Pemogokan Massa*, 1906.

buah organisasi Marxis yang rapat, disiplin, dan tertempa secara ideologi jauh sebelum revolusi meledak, dan oleh karenanya dapat merebut kekuasaan ketika masalah kekuasaan terkedepankan di dalam revolusi. Dosa “peloporisme” ini harus dibersihkan dari Marxisme. Oleh karenanya, Rosa Luxemburg, setelah dia meninggal, dijadikan nabi “spontanitas revolusioner” yang dipertentangkan dengan “peloporisme” (*vanguardism*) Lenin. Ini dilakukan oleh para kritikus Bolshevisme, karena orang yang sudah mati tidak dapat lagi membela dirinya sendiri. Selain itu, dari Marxisme Jerman, hanya Rosa tokoh yang masih memiliki kredensi revolusioner yang tidak ternodai sama sekali.

Kaum muda hari ini, yang mencari-cari gagasan Marxisme, lalu disuguhkan kutipan-kutipan dari Rosa yang sudah dikoyak dari maksud dan konteks yang sesungguhnya –sebuah tindakan yang tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh kaum Stalinis terhadap karya-karya Lenin– untuk mempertentangkan Marxismenya Rosa dengan Lenin.

Satu karya yang sering digunakan oleh para pencolek vulgar ini adalah karya Rosa yang aslinya berjudul “Masalah-masalah Organisasional Sosial Demokrasi Rusia” dan lalu diganti –tentunya setelah yang menulis sudah tidak ada lagi– menjadi “Leninisme atau Marxisme.” Padahal polemik yang ditulis Rosa pada 1904 ini sudah tidak pernah lagi diungkit olehnya.

Karya-karya Rosa dilihat sebagai sebuah monumen abadi, yang dipisahkan dari perkembangan intelektual dan politik sang penulis itu sendiri. Pada kenyataannya, Rosa sendiri dalam berbagai langkahnya melakukan kerja yang disiplin dalam menempa sayap revolusioner di dalam Sosial Demokrasi Jerman dan Polandia. Dia tidak serta merta menunggu mukjizat spontanitas massa untuk mencapai sosialisme. Terutama setelah Revolusi Jerman pada November 1918, dia dengan gigih mengumpulkan kader-kader komunis yang telah pecah dari pengkhianatan Sosial Demokrasi Jerman untuk membentuk Partai Komunis Jerman, yang diharapkannya dapat memimpin proletar Jerman ke kemenangan sosialisme.

Setelah dibebaskan dari penjara, Rosa dan kamerad-kameradnya segera menyelenggarakan kongres pendirian Partai Komunis Jerman. Dalam sesi diskusi Program dan Situasi Politik yang dipimpin oleh Rosa, dia jabarkan

dengan jelas karakter spontanitas dari Revolusi Jerman 1918:

“Adalah karakteristik dari kontradiksi-kontradiksi dialektis darimana revolusi [Jerman 1918], seperti revolusi-revolusi lainnya, bergerak, dimana pada 9 November teriakan pertama dari revolusi ini, *seperti insting teriakan seorang bayi yang baru lahir*, adalah slogan yang akan membawa kita ke sosialisme: dewan buruh dan tentara. Ini adalah seruan yang menyatukan semua orang – dan bahwa revolusi ini secara instruktif menemukan slogan ini, *walaupun pada 9 November slogan ini begitu tidak-memadai, begitu lemah, begitu kekurangan inisiatif, begitu kurang-jelas akan tujuannya, sehingga pada hari kedua revolusi hampir setengah instrumen-instrumen kekuasaan yang telah direbut pada 9 November telah hilang dari cengkraman revolusi...*

Aksi pertama ini, antara 9 November dan hari ini, telah dipenuhi dengan *ilusi-ilusi dari berbagai sisi ...* Apa lagi yang lebih karakteristik dari kelemahan internal Revolusi 9 November daripada kenyataan bahwa di kepala gerakan tampak orang-orang yang beberapa jam sebelum revolusi meledak telah menganggap bahwa tugas utama mereka adalah beragitasi melawannya – untuk membuat revolusi ini mustahil: yakni orang-orang seperti Ebert, Scheidemann, dan Haase. ...

Ada metode revolutioner tertentu dimana rakyat bisa terobati dari ilusi, tetapi sayangnya, obat ini harus dibayar dengan darah rakyat”.²

Revolusi Jerman November 1918 meledak dengan spontan, tanpa diorganisir terlebih dahulu oleh Rosa dan kolega-koleganya, apalagi oleh para sosial demokrat yang “menganggap bawah tugas utama mereka adalah beragitasi melawannya – untuk membuat revolusi ini mustahil.” Ia meledak dengan “insting teriakan seorang bayi yang baru lahir,” dan dengan spon-

2 Rosa Luxemburg, *Our Program and the Political Situation*, 31 Desember 1918.

tan meneriakkan slogan “dewan buruh dan tentara.” Namun bahkan slogan spontan yang sudah maju ini – bila dibandingkan dengan slogan-slogan dari gerakan *Occupy*, *Indignados*, dan gerakan-gerakan spontan lainnya – masihlah “begitu tidak-memadai, begitu lemah, begitu kekurangan inisiatif, begitu kurang-jelas akan tujuannya” sehingga dalam waktu singkat hampir setengah dari pencapaian revolusi telah direbut kembali.

Ilusi juga kental di dalam tahapan awal Revolusi ini, sampai-sampai orang-orang yang beberapa jam sebelumnya menentang revolusi ini dan berusaha keras membatalkannya terdorong ke depan menjadi pemimpin revolusi ini. Para reformis dan sosial demokrat menjadi pemimpin revolusi yang tidak mereka inginkan, dan kelas penguasa Jerman juga bermanuver mendorong mereka ke pucuk kepemimpinan revolusi agar dapat meredamnya. Di karya yang sama, Rosa mengatakan bahwa kaum borjuasi “percaya bahwa dengan kombinasi Ebert-Haase, dengan melalui apa-yang-disebut pemerintahan sosialis, mereka sungguh-sungguh dapat mengekang massa proletariat dan mencekik revolusi sosialis.”

Dalam situasi seperti inilah Partai Komunis Jerman dibentuk dengan tujuan memimpin revolusi yang sudah bergulir ini ke kemenangan. “Liga Spartakus [Partai Komunis Jerman] adalah bagian proletariat yang paling sadar dan punya tujuan, yang mengarahkan seluruh massa luas kelas buruh menuju tugas-tugas historisnya di setiap langkah”, tulis Rosa³ Lalu pada 11 Januari 1919, pada momen-momen genting Revolusi Jerman, empat hari sebelum dia ditangkap dan dibunuh, dia kembali menekankan pentingnya partai: “Tidak adanya kepemimpinan, tidak adanya sebuah pusat untuk mengorganisir kelas buruh Berlin, ini tidak dapat berlanjut. Bila revolusi ini ingin maju, bila kemenangan proletariat, kemenangan sosialisme, tidak hanya menjadi mimpi, para buruh revolusioner harus membentuk sebuah organisasi kepemimpinan yang mampu memandu dan menggunakan energi perjuangan massa”.⁴ “Peloporisme”nya Rosa menjadi begitu nyata dalam praktik karena dia tidak mengurung dirinya dalam teori “spontanitas revolusioner” yang kaku dan tidak dialektis.

3 Rosa Luxemburg, *What Does the Spartacus League Want?* 14 Desember 1918.

4 Dikutip dari Pierre Broue, “The German Revolution 1917-1923”. Rosa Luxemburg, *Die Rote Fahne*, 11 Januari, 1919.

Leon Trotsky menilai Rosa seperti berikut ini:

“Teori spontanitas-nya Rosa adalah sebuah senjata dalam melawan apparatus reformisme yang kaku. ... Dia terlalu realitis, dalam pemahaman revolusioner, untuk mengembangkan elemen-elemen dari teori spontanitas menjadi sebuah metafisika sepenuhnya. Dalam praktik, dia sendiri, seperti yang telah dikatakan, menyangkal teori ini di setiap langkah”.⁵

Namun usaha Rosa untuk mengorganisir partai komunis ini agak terlambat. Sementara Lenin telah mengumpulkan kader-kader Marxis revolusioner sejak awal, sebagai faksi Bolshevik di dalam Sosial Demokrasi Rusia yang dengan gigih melawan reformisme (Menshevik), Rosa hanya melakukan ini setelah revolusi telah bergulir. Walaupun Rosa sudah lama memimpin polemik tajam melawan tendensi-tendensi reformisme di dalam Sosial Demokrasi Jerman, dia tidak pernah mengambil langkah selanjutnya untuk membentuk sebuah faksi seperti Bolshevik, yang rapat, disiplin, tertempa, dan profesional. Ke-amatiran-an Partai Komunis Jerman juga terpampang begitu jelas oleh ketidakmampuannya untuk melindungi para pemimpinnya. Mereka tidak mampu menyembunyikan Rosa Luxemburg dan Karl Liebknecht dari kejaran *Freikorps* (milisi anti-komunis). Revolusi Jerman akhirnya kalah dan tenggelam dalam lautan darah.

Kasus Mesir

Tanpa memahami dialektika perkembangan revolusi, yang digerakkan oleh kontradiksi-kontradiksi di dalamnya, maka banyak orang yang mengambil kesimpulan keliru mengenai peran Mursi (IM) dalam Revolusi 2011, dan lalu peran militer dalam revolusi Mesir babak kedua baru-baru ini. Lantas Mursi menjadi “anak kandung dari revolusi 2011,” yang sama konyolnya dengan mengatakan bahwa pemerintahan Ebert-Scheidemann – yakni para sosial demokrat yang beberapa jam sebelum revolusi masih beragitasi menentang revolusi ini – adalah anak kandung dari Revolusi Jerman 1918.

5 Leon Trotsky, *Luxemburg and the Fourth International*, 1935. <http://www.marxists.org/archive/trotsky/1935/06/lux.htm>

Spontanitas, dan oleh karenanya ketidaksiapan organisasi dan kepemimpinan, adalah alasan mengapa kekuasaan yang sudah ada di jalanan akhirnya dipungut oleh IM, seperti halnya rakyat pekerja Jerman pada November 1918, terjebak dalam ilusi demokratis pada para pemimpin sosial demokrat. Setelah berhasil menumbangkan Mubarak dengan energi yang meluap-luap, yang meledak spontan tanpa terikat oleh satu partai atau organisasi manapun, spontanitas akhirnya kehilangan daya energinya untuk tugas selanjutnya: perebutan kekuasaan ekonomi dan politik. Seperti halnya kelas penguasa Jerman bermanuver –dan bukannya tanpa kontradiksi-kontradiksinya sendiri– untuk menyerahkan kekuasaan kepada para pemimpin reformis yang dapat dipercaya, begitu juga di Mesir, kelas penguasa dan Militer melakukan berbagai manuver dengan elemen-elemen oposisi borjuasi liberal dan IM, tetapi terutama dengan yang belakangan ini karena mereka adalah kekuatan terorganisir yang dapat diandalkan untuk “mengegang massa proletariat dan mencekik revolusi sosialis.”

Militer, dengan cara Bonapartis dan dengan restu –yang tidak harus dengan sukarela diberikan– dari kelas borjuasi Mesir secara keseluruhan dan imperialisme AS, mengintervensi untuk menyelamatkan situasi yang sudah tidak terkendalikan ini. Semakin lama Mubarak bercokol, akan menjadi semakin radikal massa rakyat di jalanan dan bisa-bisa semua lapisan kelas penguasa akan tersapu. Ini juga dipahami oleh imperialisme AS, dimana duta besar AS di Mesir saat itu, Frank Wisner, menyampaikan pesan dari Obama kepada Mubarak bahwa sekarang adalah saatnya bagi dia untuk turun dari singgasana.

SCAF (Dewan Agung Militer) lalu mengambil alih pemerintahan provinsial.

Dalam proses selanjutnya, rakyat Mesir dipenuhi dengan ilusi-ilusi dari berbagai sisi yang saling bertabrakan. Sebagian berilusi bahwa SCAF akan dapat memberikan mereka periode transisi ke demokrasi; sebagian berilusi pada kubu liberal, sebagian lagi pada kubu Islamis; sebagian rakyat merindukan Nasser dan Sadat, dan memimpikan kembalinya sosok perwira progresif seperti mereka yang dapat menyelamatkan Mesir; sebagian, yang sangat kecil, terus hanya mempercayai kekuatan mereka sendiri. Inilah proses yang terjadi dalam Revolusi Mesir 2011.

IM sejak awal lebih memilih melakukan negosiasi di atas meja (dan di belakang pintu) ketimbang aksi massa. Dan segera setelah SCAF mengambil alih kekuasaan pasca jatuhnya Mubarak, IM terlibat dalam negosiasi di belakang layar dengan militer, sementara rakyat pekerja yang maju, terutama kaum muda, terus melawan SCAF dengan demo-demo yang menelan puluhan korban jiwa. SCAF paham bahwa mereka lebih bisa mempercayai IM daripada kaum muda revolusioner yang berperan aktif dan sentral dalam Revolusi 2011, dan sebaliknya IM juga lebih mempercayai SCAF daripada massa luas yang ada di jalanan. IM adalah oposisi yang loyal dan terhormat, yang pada analisa terakhir punya kepentingan yang sama dengan Mubarak dan SCAF, yakni mempertahankan kestabilan kapitalisme untuk lancarnya laba dan profit mereka. Revolusi yang datang dari massa rakyat pekerja tidak ada di agenda mereka.

Sameh Elbarqy, seorang mantan anggota IM, mengatakan dengan cukup jelas: “Visi ekonomi Ikhwani Muslim yang utama, bila kita ingin mengklasifikasinya secara klasik, adalah kapitalis ekstrim”.⁶ Basis kelas IM adalah borjuasi. Inilah juga yang luput dari perhatian dan analisa kawan Ridha, yakni basis kelas dari IM. Inilah mengapa Amerika tidak terlalu khawatir dengan terpilihnya Mursi, karena ia dan partainya akan terus menjaga keberlangsungan kapitalisme di Mesir. IM dipercaya dapat menjaga kestabilan Mesir dan meredam gejolak revolusi di Mesir. Pada saat berada di bawah rezim Mubarak, para kapitalis IM memang mengalami diskriminasi politik, dan bahkan kadang-kadang diskriminasi ekonomi. Kelas kapitalis bukanlah satu blok yang homogen. Bisa ada perpecahan dan persaingan di antara mereka. Mereka tersatukan hanya oleh posisi mereka dalam relasi produksi, yakni sebagai pemilik modal, dan oleh karenanya tersatukan dalam perlawanan mereka terhadap kelas buruh.

Rapuhnya dukungan rakyat pada IM, ataupun pada seluruh proses pemilu dan kandidat-kandidat yang ada, dapat dilihat dari potret pemilu presiden pada Mei 2012. *Pertama*, ada 54% rakyat yang tidak memilih (golput). Insting mereka memberitahu mereka bahwa pemilu ini adalah sebuah penipuan dan akal-akalan, bahwa tidak ada satupun kandidat yang be-

6 Suzy Hansen, “The Economic Vision of Egypt’s Muslim Brotherhood Millionaires,” *Bloomberg Businessweek*, 19 April 2012. <http://www.businessweek.com/articles/2012-04-19/the-economic-vision-of-egypts-muslim-brotherhood-millionaires>

nar-benar mewakili revolusi ini. Sungguh tidak dapat dibandingkan dengan pemilu 1999 di Indonesia pasca Reformasi 1998, dimana 90% rakyat berbondong-bondong ke TPS. *Kedua*, dari 46% yang memilih, Mursi hanya meraih 25%, berarti hanya 11,5% dari seluruh populasi pemilih Mesir. Padahal pada pemilu legislatif yang diselenggarakan mulai November 2011 hingga Januari 2012 IM dapat meraih 37,5% dari 54% populasi yang memilih, berarti total 20% dari seluruh populasi. Dalam waktu beberapa bulan saja, dari Januari 2012 hingga Mei 2012, mereka telah kehilangan hampir separuh dukungan mereka. Semakin dekat IM ke kekuasaan, semakin terekspos mereka di mata rakyat. Ini tidak berbeda dengan PKS di tanah air –tetapi dengan tempo yang lebih lambat, karena tidak ada proses revolusi di Indonesia– dimana setelah meraih posisi-posisi di dalam pemerintahan, mereka terekspos sebagai sekelompok pencoleng dan jongos kaum borjuasi.

Pada putaran kedua pemilu Presiden, ketika pilihannya jatuh antara Mursi, kandidat Islamis, melawan Shafik, kandidat yang didukung oleh militer, rakyat melemparkan dukungan mereka ke kedua kandidat ini hampir sama rata; sebagian (51.7%) memilih Mursi karena takut akan kembalinya kubu Mubarak dan militer, sebagian (48.3%) memilih Shafik karena takut akan masuknya sharia Islam ke dalam masyarakat Mesir. Yang ada di pikiran hampir semua rakyat adalah mana yang “terbaik dari yang terburuk” (*lesser evil*). Bahkan sejumlah aktifis kiri revolusioner pun terjebak dalam logika *lesser evil*.

IM naik ke tampuk kekuasaan, tetapi dengan kesepakatan dengan SCAF bahwa pemerintahan Mursi tidak akan menyentuh bisnis yang dikontrol militer dan melindungi mereka dari pengadilan sipil atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan terhadap rakyat. Sampai sekarang, tidak ada satupun petinggi militer yang dibawa ke pengadilan untuk bertanggung jawab atas pembantaian terhadap para demonstran. Sementara Washington paham bahwa IM adalah rekan yang bisa diandalkan untuk menjaga kestabilan iklim investasi dan juga kestabilan politik. Mesir adalah negeri Arab yang sangat penting. Revolusi di sana dapat mengganggu kestabilan seluruh Timur Tengah. Pada kunjungan John Kerry Maret lalu, US\$250 juta dolar dikucurkan untuk Mesir, yang merupakan tanda kepercayaan Washington pada IM yang dulu dianggap sebagai “organisasi teroris.”

Militer, Negara dan Bonapartisme

Akan keliru kalau kita berpikir bahwa hubungan IM dengan militer adalah sebuah hubungan yang mesra. Tetapi akan lebih keliru lagi kalau kita lantas berpikir bahwa IM dan militer adalah musuh secara prinsipil. IM dan militer tersatukan oleh ketakutan mereka terhadap rakyat pekerja dan revolusi, dan bersama-sama mereka bermanuver – sambil menjaga sebanyak mungkin kepentingan mereka masing-masing – agar kestabilan dapat tercapai di Mesir.

Ridha, oleh karenanya, sangatlah keliru mengenai relasi Mursi dan militer, yang digambarkannya dengan apa-yang-disebut “logika persamaan:”

“Keterlibatan militer terhadap kejatuhan Mursi ... lebih banyak disebabkan oleh relasi yang tercipta antara militer dengan Mursi pasca pemilu ... Sejak berkuasa, Mursi memang telah melakukan penyingkiran sistematis terhadap militer. ... Situasi ini kemudian menempatkan militer pada posisinya yang marjinal, seperti posisi kekuatan politik lainnya yang sudah terlebih dahulu dimarginalisasi oleh kepresidenan Mursi dengan Ikhwanul Muslimin-nya, yakni kalangan liberal, sekuler, dan juga kalangan kiri revolusioner. Konjungtur serta konstelasi politik ini kemudian membuat apa yang saya sebut sebagai satu bentuk, mengutip Laclau-Mouffe, logika persamaan (*logic of equivalence*) di antara mereka yang telah termarginalisasi oleh Mursi.”

Pertama, militer tidak bisa disamakan begitu saja dengan kekuatan politik lainnya, “yakni kalangan liberal, sekuler, dan juga kalangan kiri revolusioner.” Militer adalah bagian esensial dari negara, sebagaimana yang dikatakan Marx dan Engels bahwa Negara, pada analisa terakhir setelah dilucuti dari semua pernak-perniknya, terdiri dari badan khusus orang-orang bersenjata yang melayani kepentingan kelas yang berkuasa. Mereka-lah yang mengizinkan IM untuk bisa berkuasa, dan oleh karenanya dapat juga menendang mereka keluar, seperti yang terjadi juga pada Mubarak.

Elit-elit militer tidaklah menyukai Ikhwatul Muslimin, dan bahkan tidak terlalu mempercayainya. Tetapi IM adalah terbaik dari yang terburuk di mata mereka, begitu juga di mata imperialisme AS, dimana yang terburuk adalah rakyat pekerja merebut kekuasaan dengan tangan mereka sendiri.

Namun IM juga bukanlah organisasi yang dipenuhi orang-orang bodoh. Menunggangi gelombang revolusi dengan massa yang membenci kesewenang-wenangan militer, IM menghantarkan beberapa pukulan *jab* pada militer, dengan beberapa usaha *retooling*, guna memperkuat posisi mereka. Tetapi beberapa pukulan *jab* yang saling ditukarkan antara Mursi dan militer tidak mengubah hal-hal fundamental bahwa keduanya berdiri di atas basis kelas borjuasi dan militer adalah badan khusus orang-orang bersenjata dari negara.

Pada situasi krisis di dalam masyarakat, ketika perjuangan kelas menajam, dimana kelas borjuasi tidak mampu lagi mengembalikan kestabilan sementara kelas pekerja walaupun bergejolak tetapi tidak mampu merebut kekuasaan, maka negara dapat meraih kemandirian tertentu untuk bertindak guna menyelamatkan situasi. Sebuah masyarakat tidak bisa terus menerus ada di dalam tungku panas perjuangan kelas. Negara, dalam hal ini militer, mengintervensi.

Di babak pertama revolusi Mesir, dengan menendang keluar Mubarak ketika ia dan partainya NDP tidak dapat lagi mengendalikan situasi dan menjadi *liability*. Di babak kedua, dengan menendang keluar Mursi dan IM, juga untuk alasan yang sama. Inilah fenomena yang disebut Bonapartisme, yakni dimana, seperti yang dipaparkan oleh Ted Grant, “antagonisme di dalam masyarakat sudah menjadi begitu luar biasa sehingga mesin negara, yang “meregulasi” dan “menertibkan” antagonisme ini, sementara masih tetap merupakan instrumen dari kelas yang mempunya, meraih kemandirian tertentu dari semua kelas. Seorang “hakim nasional,” yang mengonsentrasikan kekuatan di tangannya, secara pribadi “mengatur” konflik-konflik di dalam bangsa, memainkan satu kelas melawan kelas yang lain, meskipun demikian tetap merupakan alat dari kelas mempunya.”⁷

7 Ted Grant, *Democracy of Bonapartism in Europe – A Reply to Pierre Frank*, August 1946. <http://www.marxists.org/archive/grant/1946/08/frank.htm>

Bonapartisme adalah fenomena yang sering kita lihat di negeri-negeri Dunia Ketiga yang disebabkan karena di satu pihak borjuasi yang relatif lemah dan di lain pihak, karena situasi krisis akut yang terus-menerus melanda negeri-negeri ini akibat kemiskinan dan penindasan yang tidak tertanggungkan.

Bagi kawan Ridha, militer terlibat dalam penumbangan Mursi karena “logika persamaan,” yakni karena mereka juga termarginalisasi oleh rezim Mursi. Hal tersebut mendorong militer kemudian bersama-sama dengan kaum liberal, sekuler, dan kiri revolusioner untuk bahu-membahu mengeluarkan Mursi. Ini adalah kekeliruan yang fatal. Militer Mesir mengintervensi bukan dalam kapasitas “sekutu” atau “rekan” dengan rakyat yang sama-sama termarginalisasi, tetapi sebagai negara dalam kapasitas Bonapartis seperti yang saya jelaskan di atas.

Dalam artikel saya yang sebelumnya, telah saya jelaskan bahwa:

“Hari ini rakyat Mesir telah meraih satu kemenangan, tetapi perjuangan belumlah selesai. Tidak adanya sebuah partai revolusioner memungkinkan militer untuk melakukan manuver dan menyelamatkan situasi dengan menaruh Tuan Mansour sebagai kepala negara sementara. Inilah kelemahan dari gerakan Mesir hari ini, dan tidak ada jalan pintas selain terus membangun kekuatan sosialis revolusioner di dalam gerakan ini.”

Tidak ada kesimpulan atau kecenderungan ke kesimpulan, seperti yang dituduhkan oleh Ridha kepada saya, bahwa “militer Mesir kini sudah tersubordinasi di bawah kepemimpinan politik yang revolusioner.” Bahkan tidak ada “kepemimpinan politik yang revolusioner” yang dapat kita bicarakan sama sekali! Hanya kelemahan dalam gerakan, yakni ketidaksiapan organisasi dan kepemimpinan, yang memungkinkan manuver dari militer ini.

Perlu ditekankan, sekali lagi, kalau intervensi militer ini datang bukan dari posisi yang kuat tetapi dari posisi yang lemah. Ini terbukti dengan kenyataan bahwa Jenderal Sisi, setelah menyingkirkan Mursi, tidak bisa menaruh SCAF sebagai pemerintahan provisional, seperti yang dilakukan

oleh militer ketika Mubarak jatuh. Mereka sekarang bersandar pada elemen-elemen borjuasi liberal di sekitar El Baradei, untuk mengarahkan revolusi ini kembali ke jalur-jalur demokrasi yang aman.

Penutup

Majalah *The Economist*, yang merupakan majalah kelas penguasa yang sangat jujur, karena ia adalah majalah perspektif untuk pemimpin-pemimpin kapitalis, mengatakan dengan jelas apa bahaya dari jatuhnya Mursi:

“Preseden dari ditumbangkannya Mursi adalah sangat buruk bagi negara-negara demokrasi lainnya yang goyah. Ini akan mendorong orang-orang yang tidak puas untuk mencoba menumbangkan pemerintahan bukan dengan pemilu tetapi dengan mengganggu kekuasaan mereka. Ini akan menciptakan insentif kepada kaum oposisi [baca rakyat] di seluruh dunia Arab untuk mengejar agenda mereka lewat jalanan, dan bukan lewat parlemen. Oleh karenanya ini akan mengurangi peluang perdamaian dan kemakmuran di seluruh daerah ini.”⁸

Ilusi demokrasi borjuasi harus kembali ditegakkan di Mesir.

Yang ada di tangan militer dan El Baradei saat ini hanyalah bayang-bayang kekuasaan. Perimbangan kekuatan hari ini ada di pihak rakyat pekerja. Tetapi selama massa rakyat tidak punya partai dan kepemimpinan yang dapat menyelesaikan masalah perebutan kekuasaan, maka bayang-bayang ini akan mulai meredup. Massa luas tidak bisa terus-menerus dalam keadaan bergejolak. Mereka tidak bisa terus-menerus turun ke jalan selama berminggu-minggu tanpa adanya kemenangan konkrit di akhir perjalanannya. Kelelahan akan memanifestasikan dirinya, dan kekuatan counter-revolusi akan mengambil keuntungan dari kelelahan ini.

Tetapi pertanyaannya: apakah pemerintahan selanjutnya di Mesir dapat menyelesaikan masalah-masalah fundamental di Mesir, yakni masalah

⁸ *The Economist*, “Egypt’s tragedy,” 6 Juli 2013

roti? Ini bukan hanya masalah demokrasi belaka.

Seperti kata Alan Woods: “Bagi massa, demokrasi bukanlah kata kosong belaka. Ujian utama demokrasi adalah bisakah demokrasi mengisi perut-perut yang kosong.”⁹ Pada periode krisis dunia yang sedang kita masuki ini, demokrasi borjuasi tidak akan bisa mengisi perut-perut yang kosong. Pemerintahan yang selanjutnya di Mesir hanyalah akan menjadi pemerintahan krisis. Tidak adanya kepemimpinan revolusioner akan memberikan perjuangan rakyat Mesir sebuah karakter yang berkepanjangan (*protracted*), dengan revolusi dan konter-revolusi yang saling susul menyusul, dengan pasang naik dan pasang surut yang terus menggoncang dan menggerakkan kesadaran mereka. Ini adalah sebuah proses pembelajaran bagi massa luas, sebuah proses yang sedihnya harus dibayar dengan darah rakyat. Tetapi tidak ada jalan lain.

Sebuah partai, sebuah kepemimpinan revolusioner, yang dapat memahami pertimbangan kekuatan kelas dan mengedepankan slogan dan program yang tepat, dan yang, seperti yang dikatakan Rosa, “*adalah bagian proletariat yang paling sadar dan punya tujuan, yang mengarahkan seluruh massa luas kelas buruh menuju tugas-tugas historisnya di setiap langkah;*” inilah yang perlu dibangun. Kita tertarik pada masalah revolusi Mesir bukan hanya karena sentimentalitas solidaritas belaka, tetapi karena masalah yang serupa juga akan kita hadapi dalam revolusi Indonesia mendatang.

Maka dari itu, partai demikian harus dipersiapkan sedini mungkin sebelum revolusi menggedor pintu kita. Massa proletar Indonesia – dan seluruh negeri – tidak bisa hanya mengandalkan spontanitas revolusioner, mereka juga harus punya partai yang sudah siap merebut kekuasaan. Pada akhirnya, seperti yang Leon Trotsky katakan, “Situasi politik dunia dalam keseluruhannya digambarkan oleh sebuah krisis historis kepemimpinan proletariat”¹⁰ ***

9 Alan Woods, *Revolusi Mesir Kedua*, 5 Juli 2013. <http://militanindonesia.org/internasional/afrika/8431-revolusi-mesir-kedua-pernyataan-tendensi-marxis-revolusioner-imt.html>

10 Leon Trotsky, *Program Transisional*, 1938.

Kembali Menengok Revolusi Mesir dan Problematikanya

Tanggapan untuk Ted Sprague

Iqra Anugrah

REVOLUSI Mesir yang sudah bergulir semenjak tahun 2011 kembali berada di persimpangan jalan.

Di tengah berbagai desakan “dari bawah” oleh gerakan Tamarod (Pembangkangan) dan gerakan rakyat Mesir pada umumnya atas kepemimpinan Presiden Muhammad Mursi yang berasal dari Partai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom and Justice Party*, FJP), yang mewakili kubu Ikhwanul Muslimin (IM), secara tiba-tiba pihak militer kemudian masuk “dari atas” dan mengambil alih proses politik dengan meluncurkan kudeta (satu istilah yang diperdebatkan) terhadap Presiden Mursi. Penguasa militer ini lalu membentuk pemerintahan interim dan menunjuk Adly Mansour, Muhammad El-Baradei dan Hazem Al-Beblawi sebagai presiden, wakil presiden dan Perdana Menteri sementara.

Tetapi, cerita tidak selesai di situ.

Tidak lama setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer, terdapat sejumlah masalah baru. Berbagai media dan LSM internasional melaporkan bahwa sejumlah pemimpin FJP dan IM diamankan oleh militer, media yang disinyalir berafiliasi dengan FJP dan IM ditutup dan lebih dari 50 demonstran pro-Mursi meninggal serta 435 lainnya luka-luka dalam aksi kekerasan yang dilakukan oleh militer.

Kemanakah revolusi Mesir akan bergerak? Bagaimanakah tren politik Mesir pasca-Mursi?

Untuk memahami persoalan ini secara lebih jelas, tulisan ini akan mencoba membahas lebih lanjut mengenai peta politik dan kekuatan politik

di Mesir, dengan fokus kepada FJP dan IM, militer serta gerakan oposisi.

Ikhwanul Muslimin: Kolaborator Antar-kelas atau Seksi dari Borjuasi?

Melihat dan melabeli IM dan FJP sebagai “Islamis” terkadang memang mempermudah perbincangan, tetapi juga bisa berarti menghindari diskusi yang lebih serius. Konteks sejarah, sosio-politik dan ekonomi dari lahirnya IM serta “basis material,” yaitu kelas yang memungkinkannya muncul dapat lebih memperjelas pemahaman kita mengenai posisi politik IM.

Didirikan oleh Hassan al-Banna di Ismailia pada tahun 1928, dalam perkembangannya IM berkembang menjadi salah satu kekuatan politik yang patut diperhitungkan di Mesir. Di kalangan Kiri, baik di Mesir maupun di luar Mesir, terdapat suatu ambivalensi dalam merespon kekuatan IM dan Islamisme secara umum. Apa label yang tepat buat mereka? Bagaimana posisi politik kalangan Kiri terhadap mereka?

Chris Harman (1994) dalam artikelnya, *The Prophet and the Proletariat*, berusaha menepis pandangan dan analisa yang simplisistis dalam melihat Islamisme. Menurutnya, Islamisme tidak otomatis “fasis” atau “reaksioner” karena pandangan mereka terhadap isu-isu hubungan agama dan negara, gender dan kebebasan sipil, juga tidak otomatis “progresif” atau “revolusioner,” hanya karena retorika anti-imperialisme dan anti-Barat mereka. Ada faktor-faktor sosial politik yang memungkinkan Islamisme bergerak dari satu tendensi ke tendensi lainnya, yang juga bergantung pada kondisi spesifik di tiap-tiap tempat.

Namun, untuk kasus beberapa negara Timur Tengah, seperti Mesir dan Iran, Harman melihat Islamisme sebagai ekspresi politik dari *kelas menengah* atau *borjuis kecil*. Ini dapat dilihat tidak hanya dari agenda politik Islamisme secara umum, namun juga konteks ekonomi-politik yang melatarbelakanginya: kelas borjuis pedesaan bermigrasi ke kota karena urbanisasi, kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi dalam proses pembangunan, menjadi salah satu sumber “basis kelas” Islamisme. Proses

urbanisasi inilah, yang membentuk lapisan kelas menengah baru seperti komunitas *bazaar*, usaha kecil dan menengah, guru, pegawai pemerintahan dan lain sebagainya (Fischer, 1982).

Konteks ekonomi-politik, yaitu perkembangan proses pembangunan di Mesir, juga memengaruhi komposisi basis pendukung serta karakter politik dari IM. Sebnem Gumuscu (2010), dalam analisa perbandingannya antara Turki dan Mesir menyatakan bahwa perbedaan pola liberalisasi ekonomi di kedua negara menyebabkan perbedaan pola moderasi Islam politik.

Di Turki, pola liberalisasi ekonomi menguntungkan kelompok borjuis pinggiran, usaha kecil dan menengah (UKM) dan kapitalis berorientasi ekspor yang rata-rata berbasis di luar Istanbul yang berafiliasi kepada Asosiasi Industrialis dan Pengusaha Independen (MUSIAD). Kelompok yang beruntung ini kemudian mengartikulasikan visi ekonomi, politik dan sosialnya via Islam Politik terutama Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), melalui perkawinan antara agenda ekonomi pasar terbuka dan demokrasi (borjuis) dengan religiusitas.

Di Mesir, liberalisasi ekonomi yang bermula dari kebijakan *Infitah* (Kebijakan Ekonomi Terbuka) di masa Presiden Anwar Sadat, alih-alih menguntungkan kelompok borjuis pinggiran, UKM dan kelas menengah, justru menguntungkan bisnis-bisnis besar dengan koneksi ke pemerintah pada waktu itu. Ini semakin diperparah dengan pemotongan subsidi sosial dan pengangguran yang meningkat. Elemen kelas menengah atau borjuis kecil yang termarginalisasi inilah yang kemudian tertarik bergabung kepada IM dan semakin mempertegas tendensi konservatif yang militan dalam tubuh IM.

Tentu ada proses moderasi dalam IM dan para penggiat IM pun bergumul dengan proses tersebut. Namun, rupa-rupanya, IM kesulitan untuk melakukan transformasi atas tendensi konservatif dari visi Islamisnya. Tadros (2012) mencatat sejumlah keterbatasan IM di era pasca-Mubarak.

Pertama, ada kesenjangan dalam tubuh IM sendiri dalam merespon prospek tumbangnya Mubarak dan perubahan sosial di masa-masa awal Re-

volusi Mesir. Sejumlah segmen pemuda dari IM, misalnya, meminta izin untuk bergabung dengan aksi massa lintas elemen pemuda di masa awal Revolusi Mesir dan mendesak pimpinan IM yang berasal dari generasi yang lebih tua untuk mendukung aksi tersebut. Pimpinan IM sendiri, yang pada masa itu masih bernegosiasi dengan pihak militer dan sejumlah pejabat di pemerintahan Mubarak, seperti Wakil Presiden Omar Suleiman, awalnya ragu untuk mendukung aksi elemen pemudanya sendiri, meskipun kemudian para pimpinan IM akhirnya mendukung dan bergabung dalam aksi tersebut.

Kedua, dalam hal komitmennya terhadap pluralisme politik yang merangkul semua golongan, hak-hak kelompok minoritas seperti kaum Kristen Koptik dan kesetaraan gender, komitmen IM lebih tepat dipandang sebagai retorika yang bergantung kepada kondisi politik dibandingkan upaya nyata untuk mereformasi pandangannya. Dengan kata lain, terlepas dari upayanya untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok Islam “reformis” atau “moderat,” pandangan arus utama dalam tubuh IM mengenai pluralisme politik, hak-hak minoritas, dan kesetaraan gender pada dasarnya konservatif. Tak heran, secara agak profetik, Tadros sendiri menyatakan bahwa “pada 12 Februari, terdapat indikator-indikator yang jelas bahwa kebijakan-kebijakan IM telah mengurangi kohesi sosial, memperdalam ketimpangan gender dan secara signifikan mempersempit batas-batas normatif di mana isu-isu panas dapat didiskusikan” (hlm. x).

Lalu, bagaimanakah kiprah Mursi dan FJP selama satu tahun pemerintahannya?

Sejumlah kritikus seperti Magdi Abelhadi (2012) dan Ahdaf Soueif (2012), menyebutkan sejumlah kesalahan yang dilakukan Mursi dan FJP selama berkuasa.

Pertama, Mursi menerbitkan sejumlah dekrit kontroversial (secara eufemistik disebut “deklarasi konstitusional”) seperti dekrit yang melarang pihak pengadilan dan yudisial di Mesir untuk mencabut undang-undang atau dekrit yang disahkan oleh Mursi selama masa pemerintahan.

Kedua, agenda-agenda Islamis yang bersifat sektarian.

Ketiga, salah urus kebijakan ekonomi. Untuk poin ketiga ini, dapat dikatakan bahwa Mursi, FJP dan kelompok Islamis pada dasarnya tidak menawarkan visi ekonomi yang betul-betul egaliter melainkan hanya meneruskan kebijakan neoliberal ala Mubarak. Soueif menyebutkan bahwa “Mursi mengunjungi China ditemani oleh beberapa pebisnis yang juga kongsi-kongsinya Mubarak; komunitas perbankan membicarakan bahwa beberapa persetujuan telah dibuat antara pejabat tinggi negara dan kelompok-kelompok mereka, dan meminjam dana dari IMF dan Bank Dunia mendadak jadi tidak berdosa.”

Keempat, massa pendukung IM dan FJP sendiri juga terlibat dalam berbagai aksi vigilantis dan agitatif melawan berbagai elemen dari kelompok oposisi. Perlu diingat juga bahwa Mursi hanya menang tipis di pemilu presiden tahun lalu – bahkan, mereka yang memilih Mursi juga melakukannya karena pertimbangan strategis: agar elit lama di masa Mubarak, militer, dan elemen-elemen kontra-revolusioner lainnya tidak merebut kekuasaan dan membajak Revolusi Mesir.

Barangkali, karena faktor-faktor inilah, politik yang dijalankan oleh Mursi, FJP dan IM pada dasarnya adalah semacam konservatisme borjuis kecil, memicu jutaan rakyat Mesir untuk kembali melakukan aksi massa dan mobilisasi di jalan sebagai protes terhadapnya.

Bagaimana dengan Militer dan Gerakan Rakyat?

Lalu, setelah terjungkalnya Mursi dari kekuasaan, bagaimana dengan gerakan rakyat dan militer?

Di sini, kita membutuhkan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif untuk mengerti konstelasi politik di Mesir dewasa ini. Alih-alih melihat politik Mesir secara dikotomis, dalam kacamata oposisi dan militer versus Mursi, FJP dan IM, kita perlu melihat persaingan antara berbagai kekuatan-kekuatan politik di Mesir secara lebih mendalam.

Melihat aksi-aksi kekerasan dan pemberlakuan “keadaan pengecualian”

(*state of exception*) yang dilakukan oleh pihak militer Mesir sekarang ini, maka patutlah kita mencurigai bahwa militer Mesir memiliki agendanya sendiri. Aksi kelompok militer dalam membatasi kebebasan informasi dan berekespresi, misalnya, dapat menjadi dalih untuk membungkam kritik apapun terhadap dominasi militer dalam politik Mesir.

Oleh karena itu, di sini saya lebih bersepakat kepada posisi kawan Muhammad Ridha (2013) dan mengkritik posisi kawan Ted Sprague (2013) yang terlampau simplistik dalam melihat perkembangan politik Mesir dewasa ini.

Kondisi Revolusi Mesir pasca Mursi mengingatkan saya atas satu pengalaman kisah Revolusi Rakyat di masa Romawi Kuno dalam buku *Oligarchy* karya Jeffrey Winters (2011). Di situ, disebutkan bahwa di masa Romawi Kuno, revolusi dan pemberontakan rakyat yang asli dan berasal “dari bawah” demi melawan para tiran dan diktator dan mewujudkan tatanan ekonomi-politik yang lebih egaliter dan distribusionis terkadang diinterupsi oleh para oligark “dari atas” atas dasar kebencian mereka terhadap para tiran dan diktator yang berkuasa.

Hasilnya? Sayang, bukan kemenangan rakyat, melainkan revitalisasi politik oligarkis yang didominasi oleh kelompok super kaya di masyarakat Romawi. Di dalam masa transisi menuju demokrasi, sebuah studi klasik juga menegaskan pentingnya memperhatikan keretakan dan dinamika politik di antara para elit (O'Donnell & Schmitter, 1986). Mungkin, dalam perspektif inilah, kita bisa lebih memahami konstelasi politik di Mesir saat ini.

Sisi lain yang secara perlahan-lahan mulai tersingkap adalah potensi kelompok Islamis Salafi yang terutama diwakili oleh Partai Cahaya (*Al-Nur*) untuk menjadi salah satu pemain utama dalam politik Mesir pasca-Mursi. Menurut berbagai laporan media, posisi Partai Cahaya bahkan lebih konservatif dibandingkan IM dan FJP, yang setidaknya masih memiliki beberapa faksi moderat. Kemana arah politik Partai Cahaya akan bergerak tentunya perlu kita perhatikan secara lebih seksama.

Kondisi ini tentu menimbulkan berbagai dilema dan pertanyaan yang le-

bih rumit lagi bagi Mesir pasca-Mursi. Terlepas dari perbedaan posisi teoretik dan politik yang jauh antara gerakan rakyat dan kelompok-kelompok Islamis, sebagaimana dijelaskan oleh Samer Shehata (2013), konsolidasi demokrasi di Mesir mensyaratkan inklusi kelompok-kelompok Islamis di dalam proses politik. Memang, persoalan inklusi ini bukan hal yang mudah, bahkan selalu menjadi persoalan yang rumit dalam setiap proses revolusioner dan transisi menuju demokrasi. Namun, yang rumit inilah yang musti dihadapi oleh gerakan rakyat di Mesir, apabila gerakan rakyat di sana –dan berbagai tempat lainnya– mau mewujudkan cita-cita mereka dan mendapatkan legitimasi yang kuat.

Tanpa bermaksud menggurui, mungkin kondisi Mesir sekarang bisa menjadi semacam momen reflektif bagi gerakan rakyat di berbagai tempat lain. Rakyat Mesir memang berhasil dalam eksperimennya melampaui keterbatasan transisi demokrasi dan kerangka demokrasi liberal menuju sebuah bentuk demokrasi yang lebih radikal. Namun, mungkin mobilisasi massa saja tidak cukup; kita perlu melangkah (sedikit) lebih jauh lagi dari situ. Ini juga yang disampaikan oleh Tariq Ali (2013) dalam pesan videonya kepada para demonstran dan aktivis #OccupyGezi. Di tengah fragmentasi gerakan rakyat dan oposisi di Mesir dalam berbagai tendensinya (sekuler, liberal, nasionalis, kiri dan lain-lain), kepemimpinan politik dan bentuk-bentuk lain dari pengorganisasian menjadi penting, apalagi jika gerakan rakyat ingin merebut negara dan mentransformasikan logikanya, di tengah-tengah proses revolusi dan demokratisasi yang rawan “dibajak” untuk menjadi permainan elit.

Pasca-Mursi, kemanakah angin politik di Mesir akan berhembus? Tentu, hanya gerakan rakyat Mesir sendirilah yang dapat menjawabnya.***

Kepustakaan:

Abelhadi, M., 2012. *Muhammad Mursi and the fight for Egypt*. Diunduh dari <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/nov/27/>

Muhammad-Mursi-fight-for-egypt?INTCMP=SRCH (Diakses 9 Juli 2013)

Ali, T., 2013. *A Message to #OccupyGezi*. Diunduh dari <http://mrzine.monthlyreview.org/2013/ali170613.html> (Diakses 9 Juli 2013)

Fischer, M. M. J., 1982. Islam and the Revolt of the Petit Bourgeoisie. *Daedalus*, 111(1), pp. 101-25.

Gumuscu, S., 2010. "Class, Status, and Party: The Changing Face of Political Islam in Turkey and Egypt". *Comparative Political Studies*, 43(7), pp. 835-61.

Harman, C., 1994. *The prophet and the proletariat*. Diunduh dari <http://www.marxists.org/archive/harman/1994/xx/islam.htm> (Diakses 10 Juli 2013).

O'Donnell, G. & Schmitter, P. C., 1986. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.

Ridha, M., 2013. *Revolusi Mesir Sekarang dan Pertanyaan Rumitnya*. Diunduh dari <http://indoproggress.com/revolusi-mesir-sekarang-dan-pertanyaan-rumitnya/> (Diakses 9 Juli 2013).

Shehata, S. S., 2013. *In Egypt, Democrats vs. Liberals*. Diunduh dari <http://www.nytimes.com/2013/07/03/opinion/in-egypt-democrats-vs-liberals.html> (Diakses 9 Juli 2013)

Soueif, A., 2012. *Egypt's hopes betrayed by Mursi*. Diundh dari <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/dec/09/egypt-hopes-betrayed-Muhammad-Mursi?INTCMP=SRCH> (Diakses 9 Juli 2013)

Sprague, T., 2013. *Benarkah Ada Kudeta Militer di Mesir?*. Diunduh dari <http://indoproggress.com/benarkah-ada-kudeta-militer-di-mesir/> (Diakses 9 Juli 2013)

- Tadros, M., 2012. *The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt: Democracy redefined or confined?*. Oxon and New York: Routledge.
- Winters, J. A., 2011. *Oligarchy*. New York: Cambridge University Press.

Masa Depan Demokrasi Mesir

Coen Husain Pontoh

SEJAUH ini perbincangan soal peristiwa politik di Mesir, masih belum banyak menyentuh konstelasi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi yang terlibat dalam pertarungan. Akibatnya, perbincangan itu kalau tidak bertolak dari perspektif politik yang abstrak, seringkali melihat pertarungan politik tersebut secara hitam putih. Yang *pertama* dominan di kalangan liberal, yang *kedua* merupakan wacana yang dilontarkan oleh kalangan Islam Politik.

Perspektif politik yang abstrak bertolak dari konsepsi demokrasi prosedural, yang menekankan proses pemilihan umum sebagai satu-satunya mekanisme transfer atau pergantian kekuasaan yang paling legitimatif sekaligus paling menjamin terwujudnya konsolidasi demokrasi. Legitimasi, dalam perspektif ini, bukan terutama berasal dari rakyat dalam konsep yang kabur, tapi dari rakyat yang pergi memberikan suaranya di kotak pemilu.

Kotak suara, dengan demikian, adalah representasi paling sempurna dari konsep kedaulatan rakyat, sehingga itu segala upaya untuk menjatuhkan pemerintahan Muhammad Mursi dari kekuasaan yang diraihinya melalui pemilu yang sah, jujur dan adil merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi atau kedaulatan rakyat itu sendiri. Lebih-lebih jika pergantian kekuasaan itu dilakukan melalui kudeta militer. Bagi kalangan liberal, apapun kesalahan yang dilakukan Mursi selama berkuasa, ia harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan pemerintahannya dan nanti rakyat yang menghukumnya dalam pemilu berikutnya. Kesimpulannya, masa depan demokrasi Mesir sangatlah murung.

Sementara itu dari kalangan Islam Politik di Indonesia, muncul dengan analisa hitam-putih yang simplistik dan konspiratif: bahwa Mursi, sebagai perwakilan Islam Politik, pasti akan dihalang-halangi oleh kalangan

sekuler yang terdiri dari kalangan liberal, komunis, sosialis, militer, dan AS+Yahudi untuk menyelesaikan masa kekuasaannya sebelum periode kekuasaannya berakhir. Dan karena Mursi adalah pemimpin yang lahir dari proses demokrasi dan dijatuhkan oleh sistem politik demokrasi, maka bagi kalangan Islam Politik (sebagaimana pandangan kaum liberal) segala usaha untuk menjatuhkan Mursi sebagai pemerintah yang sah (*legitimate*) adalah tidak sah (*illegitimate*).

Namun sebagaimana tipikal kaum Islamis, kesimpulan politiknya tidak berhenti di situ. Kasus Mursi makin mengonfirmasi tesis mereka selama ini bahwa demokrasi di manapun tidak akan mengijinkan kalangan Islam untuk berkuasa dan menjalankan program-program politik dan ekonomi yang bernafaskan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, demokrasi tidak cocok dengan Islam.

Konstelasi Kekuatan Politik Mesir

Pasca jatuhnya Husni Mubarak, terdapat empat kekuatan politik yang sangat berpengaruh di Mesir. *Pertama*, adalah kalangan militer yang terselematkan dari keruntuhan Mubarak; *kedua*, pejabat-pejabat tinggi birokrasi pemerintahan Mesir serta kroni-kroni Mubarak yang disebut *Feloul*, yang menggunakan Partai National Democratic (NDP) sebagai kendaraan politiknya; dan *ketiga*, kelompok Ikhwanul Muslimin, yang memiliki struktur dan jaringan organisasi yang luas, serta kepemimpinan politik dan ideologi yang jelas; serta *keempat*, adalah massa rakyat yang berasal dari berbagai aliran politik, organisasi, dan ideologi yang tumpah-ruah di Tahrir Square.

Tiga kelompok pertama adalah pemain lama dalam desain politik Mubarak dan secara institusi dan program-program politik adalah yang paling siap dalam proses politik pasca penggulingan. Sementara kekuatan rakyat, walaupun moral politiknya besar, tapi secara kelembagaan politik paling lemah: tidak punya kepemimpinan politik yang jelas, tidak punya struktur organisasi yang teratur dan luas, serta tidak memiliki program-program politik dan ekonomi alternatif yang solid. Akibatnya, pasca Revolusi Jilid

I (2011), kekuatan politik rakyat ini amat tidak siap dalam mengarungi pertarungan di medan elektoral. Mereka cukup puas telah sukses menjatuhkan Mubarak, tapi gelagapan ketika dihadapkan pada tantangan baru, demokrasi elektoral.

Demikianlah ceritanya, ketika pemilu dilangsungkan, IM sebagai kelompok yang paling tidak terkontaminasi kekuasaan diktator dan korup Mubarak, mendulang suara yang sanggup mengantarkannya ke kursi kekuasaan. Tetapi, sekali lagi, IM hanyalah satu dari tiga kekuatan politik utama (dalam makna kelembagaan) pasca Mubarak, karena itu ia harus bisa membagi kekuasaannya dengan kalangan militer dan Feloul itu. Di sinilah, kita lihat bagaimana ketiganya, terutama IM dan militer, kemudian mengkhianati tuntutan revolusi jilid II.

Ketika Muhammad Mursi terpilih sebagai presiden melalui sebuah arena pemilu demokratis, ada begitu besar harapan yang membuncah padanya. IM sebagai kekuatan politik yang relatif marginal posisinya di masa Mubarak, diharapkan bisa memenuhi tuntutan-tuntutan revolusi jilid I: *breed, freedom, and social justice*. Bagi para pemerhati pergolakan di Mesir yang teliti, harapan besar ini sebenarnya terlalu berlebihan bahkan mustahil dilaksanakan Mursi, Partai Keadilan dan Kebebasan (FJP), serta IM.

Melalui tulisan ini, saya akan menunjukkan kolaborasi politik dan ekonomi dari IM dan militer.

Kolaborasi Politik

Ketika demonstrasi di lapangan Tahrir semakin membesar dan telah nampak bahwa Mubarak tidak bisa lagi dipertahankan, militer mulai melakukan kontak dan komunikasi politik dengan kelompok-kelompok Islamis Mesir, khususnya IM. Pada masa-masa dimana ketegangan memuncak pada bulan Februari 2011, beberapa anggota Dewan Penasehat IM bertemu dengan wakil presiden Jenderal Omar Suleiman, dimana hasil dari pertemuan itu adalah IM sepakat untuk membersihkan Tahrir Square dari para demonstran. Sebagai imbalannya, militer akan membebaskan dua to-

koh terkemuka IM dalam penjara, Khairat El-Shater and Hassan Malek.¹

Pembicaraan antara IM, dengan militer, dalam hal ini Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), berfokus pada soal bagaimana membangun sistem politik baru pasca Mubarak. Setelah Mubarak jatuh, militer semakin aktif mendekati kelompok Islam Politik untuk dijadikan sebagai sekutu politiknya. Misalnya, militer kemudian membebaskan Aboud and Tarek El Zomor yang dipenjara karena tuduhan hendak membunuh Presiden Anwar Sadat. Tak lama kemudian, Tarek al-Bishri dan anggota IM Sobhi Saleh, ditunjuk SCAF untuk mempersiapkan amandemen konstitusi. SCAF juga kemudian mengizinkan kalangan Islam Politik membentuk partai politik sebagai kendaraan politiknya.

Sebagai bagian dari konsesi politik tersebut, IM kemudian mulai memboikot aksi-aksi protes massa di Tahrir Square. Misalnya, mereka memboikot seruan aksi pendudukan pada 8 Juli 2012 selama tiga minggu, yang menuntut agar Mubarak dan mereka yang bertanggung jawab atas terbunuhnya para pemrotes selama 18 hari pemberontakan pada 2011 agar dibawa ke pengadilan. Sebaliknya, IM malah menyerukan aksi massa pada 28 Juli di bawah slogan “The Friday of Unity.” Tuntutan yang diserukan dalam aksi massa yang juga dikenal dengan nama “Friday of Kandahar,” karena massa terbesar berasal dari kelompok Islamis, adalah “Negara Islam” dan mendukung posisi “militer” sebagai lembaga negara penjamin konstitusi.

Ketika militer mulai menggunakan aksi-aksi kekerasan terhadap para pemrotes pada November 2011, posisi IM memilih untuk tidak mendukung para pemrotes. Pada akhir Desember, tiga anggota IM malah memperkarakan tiga anggota Revolutionary Socialists, setelah mereka mengkritik SCAF dalam pidato publiknya. Laporan itu berisi tuduhan bahwa ketiga anggota Revolutionary Socialists itu tengah berusaha untuk memprovokasi terjadinya kekacauan (*chaos*) di seluruh negeri.

1 Wael Eskandar, *Brothers and Officers: A History of Pacts*, http://www.jadaliyya.com/pages/index/9765/brothers-and-officers_a-history-of-pacts Diunduh pada 18 Juli, 21013. Lihat juga, Marwa Awad, *Egypt army, Islamists in talks to resolve impasse*, <http://in.reuters.com/article/2012/06/22/egypt-election-bargaining-idINDEE85L0M120120622> Diunduh pada 18 Juli, 2013.

Pada awal Januari 2012, protes kembali terjadi. Kali ini para demonstran menuntut agar militer segera melepaskan kekuasaan politiknya dan segera diserahkan kepada Dewan Rakyat, yang baru terpilih secara demokratik, yakni parlemen. Terhadap tuntutan ini, IM menolaknya dan menegaskan bahwa masalah SCAF akan diselesaikan secara bertahap sebagaimana yang terjadwal, dimana kekuasaan militer akan berakhir pada 30 Juni 2012. IM juga menolak untuk menjadikan perayaan satu tahun revolusi dengan melancarkan revolusi jilid II dan membangun dukungan untuk segera mengakhiri kekuasaan militer. IM menuduh upaya-upaya untuk melancarkan aksi gelombang kedua ini sebagai tindakan untuk memprovokasi kekaucauan di seluruh negeri. Bahkan IM kemudian secara provokatif berdiri bersama-sama dengan tentara dari Central Security Forces (SCF), untuk memblokir massa yang hendak mengajukan tuntutan mereka kepada parlemen.

Pada 15 Januari 2012, harian *Al-Dostor Al-Asli* melaporkan bocoran rahasia mengenai adanya kesepakatan rahasia antara Pihak SCAF dan IM, dimana hasilnya adalah IM menjamin keamanan dari personel SCAF dan mendukung kandidat presiden yang bisa diterima militer dan IM. Tak berapa lama berselang, Ashraf El Sherif, ilmuwan politik dari the American University, Cairo, mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan antara IM dan SCAF. Bentuk kesepakatan itu antara lain, bahwa pihak militer dan lembaga-lembaga keamanan lainnya akan tetap mengontrol isu-isu kunci seperti kebijakan luar negeri, keputusan-keputusan strategis, kebijakan dan kepentingan ekonomi tingkat atas, sementara IM akan mendapat jatah di kementerian-kementerian pelayanan,² seperti pendidikan, pengadilan, dan televisi nasional.

Demikianlah, ketika Mursi terpilih sebagai presiden, kompromi dan kolaborasi dengan militer tetap dilanjutkannya. Memang ia memensiunkan dua orang jenderal paling berpengaruh dalam militer, yakni Hussein Tantawi, panglima Angkatan Bersenjata Mesir, yang berkuasa sejak 1991, dan Sami Anan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata sejak 2005. Terhadap kedua jenderal ini, Mursi menolak untuk memenuhi tuntutan rakyat agar keduanya dibawa ke pengadilan atas kejahatannya yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, selama aksi protes di Tahrir Square. Sebaliknya, Mursi ma-

² Lihat Eskandar, *Ibid*.

lah memberikan pengampunan dan jaminan keamanan.³

IM dan Neoliberalisme

Ketika gelombang aksi massa menentang kebijakan PM Turki Recep Tayyip Erdoğan makin membesar, muncul harapan agar gerakan itu bisa seperti gerakan massa di Tahrir Square pada 2011 yang sukses menjatuhkan Mubarak. Yang menarik, di Mesir ketika Mursi naik ke tampuk pemerintahan, para tokoh IM melihat masa depan mereka pada Turki di bawah kepemimpinan Erdogan dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Sementara itu, di kalangan liberal Mesir, mereka juga ingin menempatkan militer Mesir seperti militer Turki pro-Kemalist, yakni sebagai penjaga demokrasi ketika kelompok Islamis berkuasa dan menerapkan Syariat Islam.⁴

Apa yang ingin dicontoh IM dari AKP Turki? Menurut Salam, IM melihat AKP sebagai partai Islamis sukses membawa Turki sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru di Eropa dan dunia Islam khususnya. Selain itu AKP juga sukses menciptakan stabilitas politik dalam jangka panjang, dan berhasil membonsai kekuasaan militer Kemalis. Di atas semuanya, IM melihat AKP sebagai contoh hidup bagaimana sebuah perwakilan Islam Politik, sukses menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara sambil bergandeng mesra dengan demokrasi yang selama itu dicaci sebagai sistem yang kafir.

Tentu saja IM mengetahui dengan jelas bahwa AKP secara ekonomi menjalankan kebijakan neoliberal, melalui serangkaian privatisasi, liberalisasi ekonomi, pembatasan anggaran publik dan seterusnya. Namun, itu tidak menjadi soal bagi IM, karena sejak dekade 1990an, ketika Mesir mulai mengadopsi kebijakan neoliberal yang didesakkan oleh IMF dan Bank Dunia, IM tidak melakukan oposisi terbuka atas kebijakan tersebut, bahkan,

3 Gilbert Archar, *Mursi and the Army: The Illusive Power*, http://www.jadaliyya.com/pages/index/12712/Mursi-and-the-army_the-illusive-power Diunduh pada 18 Juli 2013.

4 Lihat Hesha Sallam, *Obsessed With Turkish Models in Egypt*, <http://www.jadaliyya.com/pages/index/12517/obsessed-with-turkish-models-in-egypt> Diunduh pada 18 Juli 2013.

sebagai bagian dari konsesi politik, IM kemudian diijinkan untuk terlibat dalam proses politik formal. Menariknya, akibat penerapan kebijakan neo-liberal tersebut, yang menyebabkan kehidupan ekonomi rakyat semakin memburuk, IM melalui jaringan yayasan sosialnya (*charity foundations*) mampu memberikan pelayanan-pelayanan yang bersifat karitatif terhadap rakyat miskin. Melalui yayasan-yayasan sosial-ekonominya itu, IM sanggup memetik keuntungan politik yang luar biasa besar sehingga menjadikannya sebagai oposisi terbesar bagi kekuasaan negara.⁵

Dalam desain atau ideal Bank Dunia dan IMF, kebijakan neoliberal itu dimaksudkan untuk mengikis habis praktik inefisiensi ekonomi dan perburuan rente oleh Negara, yang dianggap sebagai warisan Nasserisme pro-Sovyet. Menurut Zahid, kebijakan privatisasi perusahaan negara tersebut berjalan lancar kecuali pada perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh militer. Dan cengkeraman militer Mesir di sektor ekonomi ini luar biasa besar, tidak hanya yang berkaitan dengan bisnis sektor keamanan tetapi juga sektor bisnis lainnya, seperti jual beli perumahan, pelayanan kebersihan, kafetaria-kafetaria, pemilikan pompa-pompa bensin, peternakan ayam, produksi bahan-bahan makanan, hingga produksi bahan-bahan plastik. Selain itu, kekuasaan ekonomi militer Mesir ini sangat kuat terutama di tingkat lokal di berbagai propinsi dan diperkirakan penguasaan ekonominya berkisar antara 25%- 40% dari keseluruhan ekonomi Mesir.⁶

Nah ketika IM berkuasa dengan “Model Turki,” maka bukan saja kebijakan ekonominya tidak berbeda dengan kebijakan neoliberal di bawah Mubarak, tetapi kekuasaan bisnis militer ini pun tidak disentuhnya sama sekali. Pertarungan di tingkat kapitalis lokal hanya berlangsung di antara kroni-kroni Mubarak dengan para kapitalis di lingkaran elit IM.

Apa hasil dari kebijakan neoliberal Mursi ini?

5 Lihat buku Mohammed Zahid, *The Muslim Brotherhood and Egypt's Succession Crisis The Politics of Liberalisation and Reform in the Middle East*, I.B. Tauris Publishers, London, NY, 2010.

6 Zainab Abd-Maqd, *The Army and the Economy of Egypt*, <http://www.jadaliyya.com/pages/index/3732/> Diunduh pada 18 Juli, 2013.

Sebuah jajak pendapat Baseera yang dilakukan untuk jaringan televisi *Al-Hayat TV* terhadap 2069 responden berusia antara 20-23 tahun pada Juli 2013, menunjukkan bahwa 13% menyatakan bahwa kondisi ekonomi membaik dibanding tahun sebelumnya, 22% mengatakan tidak ada perubahan, dan 63% berpendapat kondisi ekonomi semakin memburuk. Berkaitan dengan kinerja pemerintahan Mursi, 5% responden mengatakan bahwa kinerja pemerintah sangat baik melebihi yang mereka harapkan, 64% mengatakan sangat buruk, dan 15% mengatakan kinerja Mursi memang seperti yang sudah mereka perkirakan sebelumnya.

Lembaga polling lainnya, The Arab American Institute merilis hasil pollingnya terhadap 5,029 responden, yang menunjukkan bahwa 70% responden mengatakan kondisi ekonomi sangat buruk. Ketika survey ditanyakan kepada pendukung Mursi, 98% mengatakan bahwa kehidupan mereka semakin membaik, sementara yang bukan pendukung Mursi 89% mengatakan bahwa kondisi ekonomi makin memburuk.⁷

Penutup

Kalau kita memperhatikan konstelasi kekuasaan politik di Mesir pasca Mubarak, maka sebenarnya tidak ada konflik yang substansial di antara IM-Mursi dengan militer, karena keduanya ada dalam posisi saling bekerjasama dalam membangun sistem demokrasi parlementer berbasis kebijakan ekonomi kapitalisme-neoliberal. Karena itu, tidak cukup alasan untuk menjelaskan kudeta militer terhadap Mesir ini sebagai akibat dari konflik IM vs militer.

Itulah sebabnya, adalah keliru jika para simpatisan IM mengatakan bahwa IM anti militer sehingga itu harus dikudeta. Kalaupun ada konflik di kalangan elit, itu terjadi di kalangan fraksi kapitalis berjabah berhadapan dengan kapitalis kroni dari kalangan Felou. Tetapi konflik-konflik ini pun tidak signifikan untuk menjelaskan kenapa Mursi harus terpentol dari

7 *Al-Ahram*, "Egypt opinion polls reveal dissatisfaction with Mursi," <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/152/75491/Egypt/Mursi,-one-year-on/Egypt-opinion-polls-reveal-dissatisfaction-with-Mo.aspx> Diunduh pada 18 Juli, 2013.

kursi kekuasaannya.

Penjelasan paling *afdhol* dari kejatuhan Mursi adalah adanya demo massal terbesar dalam sejarah itu. Krisis ekonomi Mesir di bawah Mursi, ternyata tidak bisa diselesaikan melalui slogan “Islam is the only solution,” yang dikumandangkan IM sejak pendiriannya. Slogan itu memang cukup ampuh membuat massa menaruh kepercayaan pada IM ketika mereka tidak berkuasa, tepatnya ketika neoliberalisme mulai dianut Mesir pada dekade 1990an. Rakyat yang lapar, yang merasakan mahalannya segala jenis barang dan pelayanan publik, terbuka matanya bahwa Mursi tidak berbeda dengan Mubarak.

Lalu, bagaimana dengan masa depan demokrasi Mesir?

Sudah jelas masa depan demokrasi Mesir tidak bisa diharapkan dari pemerintahan sementara saat ini, termasuk di dalamnya adalah kelompok liberal. Saya berpendapat, masa depan demokrasi Mesir tergantung pada dua hal: *pertama*, jika gerakan massa semakin mampu mengonsolidasikan dirinya secara politik, organisasi, dan program-program alternatif yang solid. Selama massa masih cair seperti saat ini, maka kemampuannya baru sampai pada menggulingkan fraksi kekuasaan yang tidak berpihak kepadanya untuk digantikan oleh fraksi kekuasaan yang lain. Gerakan rakyat sudah semestinya meninggalkan pola-pola gerakan yang tanpa kepemimpinan politik, organisasi, dan teoritik yang jelas jika mereka ingin menuntaskan revolusinya.

Kedua, demokrasi Mesir akan memberi harapan jika mereka memaknai demokrasi tidak berakhir di kotak suara. Selama demokrasi diukur dari kotak suara, maka selama itu pula demokrasi hanya melayani atau hanya menjadi kendaraan (bukan dibajak oleh) elit bisnis, militer, dan politik (baca: oligarki kapitalis). Demokrasi parlementer harus dibarengi dengan demokrasi partisipatoris, dimana rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan hidupnya *day to day*. Hanya melalui demokrasi partisipatoris maka ada jaminan bahwa kepentingan rakyat tidak dimanipulasi oleh para oligarki kapitalis tersebut. ***

Impase Politik Mesir: Kegamangan Kiri Romantik

Tanggapan terhadap Coen Husain Pontoh

Sapto Waluyo

Coen Husain Pontoh, Editor *IndoPROGRESS*, menulis artikel *Masa Depan Politik Mesir* yang memantik saya untuk menanggapi. Substansi gagasan yang diuraikannya sama sekali tak cocok dengan judul terpasang. Bukan masa depan demokrasi di Mesir dengan beragam tantangannya yang diulas, tapi debat perspektif Liberal vs Islamis, konstelasi politik domestik, bahkan kolaborasi militer yang menyembulkan pengkhianatan Ikhwanul Muslimin (IM), seperti dituduhkan Coen. Posisi IM sebagai salah satu aktor politik utama dikuliti habis, hingga visi ekonomi IM diadili tanpa riset memadai.

Tesis tentang masa depan demokrasi di Mesir hanya dibebaskan dalam dua – cuma dua – paragraf terakhir. Sayang sekali, pembaca disodorkan banyak informasi parsial dan logika yang tidak bersambungan dengan dengan dinamika faktual di lapangan.

Perspektif Kiri

Artikel Coen mewakili pandangan golongan Kiri yang terkesan lepas tangan atas gejolak politik atau “revolusi rakyat” yang telah didorongnya. Aktivis Kiri di Mesir yang tergabung dalam gerakan Tamarod¹ (pembangkangan sipil), berperan sentral dalam penjatuhan Presiden Muhammad Mursi. Namun, ketika kudeta militer mengambil alih kuasa, mereka terkejut dan meradang, lalu kini gamang menghadapi situasi yang tak bisa

1 Sapto Waluyo, “Tamarrud vs Tajarrud,” *Republika*, 11 Juli 2013, h. 6.

dikendalikan lagi.

Karena itu, sangat aneh bila Coen hanya menyorot perdebatan terbuka antara pendukung Liberal vs Islamis. Pada kenyataannya, ada kelompok kiri semisal *Egyptians Movement for Change* yang memelopori Tamarod dengan membuat petisi penolakan atas legitimasi Presiden Mursi. Petisi Tamarod itu mengklaim telah berhasil mengumpulkan dukungan: 15 juta (10 Juni) atau 22 juta (29 Juni) atau 30 juta (2 Juli) tanda tangan. Entah mana yang benar dan bagaimana proses pengumpulan tanda tangan secepat itu dilakukan, karena bukti kongkritnya tak pernah diperlihatkan ke publik, kecuali 170.000 tanda tangan yang dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Jika benar Tamarod mampu mengumpulkan dukungan sebanyak itu, mengapa mereka tidak segera membentuk “Partai Pelopor Revolusioner?” Niscaya tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menandinginya di kotak suara atau di jalanan.

Tamarod juga menepuk dada telah sukses mengerahkan 17 juta massa di Tahrir Square, dan itu dipercaya oleh para pengagumnya di luar Mesir sebagai demonstrasi terbesar sepanjang sejarah. Tetapi, orang yang pernah datang ke Kairo dan mengunjungi Tahrir Square akan bingung, bagaimana mungkin jutaan orang bisa berkumpul di kawasan yang mirip dengan lapangan Monas Jakarta itu?

Gamal Abdel Nasser memang acap berbagi inspirasi dengan Soekarno, sehingga mereka melontarkan gagasan dan kebijakan yang mirip, salah satunya adalah membangun Tahrir Square dan Medan Merdeka (dengan Monas sebagai simbol) menjadi lanskap utama ibukota Mesir dan Indonesia. Bagi pengamat yang objektif, Tahrir Square hanya bisa disesaki oleh 300-400 ribu massa. Lebih dari itu, akan jadi neraka kerumunan.²

Sementara itu, pendukung Mursi – bukan hanya dari kubu Islamis, tetapi juga *National Coalition for Supporting Legitimacy* yang setuju dengan hasil Pemilu dan supremasi sipil – telah mencatat 11 juta dukungan (pertengah-

2 Noah Shachtman, *How Many People Are in Tahrir Square? Here's How to Tell* www.wired.com/dangerroom/2011/02/how-many-people-are-in-tahrir-square-heres-how-to-tell/ diakses 21 Juli 2013.

an Juni 2013).³ Ini juga sulit dibuktikan, tetapi bisa dilacak tanda-tandanya dalam demonstrasi massa yang berpusat di lapangan Rabiah el-Adaweyah (Naser City), lalu menyebar ke Maidan Nahdah, selanjutnya menyemut di pusat kota Ramses Street. Sekujur kota Kairo berhenti beraktivitas untuk sementara waktu. Bahkan, aksi massa itu mempengaruhi lalu lintas ke kota lain, karena terminal Ramses yang berdekatan dengan Jembatan 6 Oktober jadi urat nadi. Tapi semua berjalan damai, tak ada aksi anarki, kecuali saat preman bayaran dan aparat keamanan memprovokasi. Karena itulah bisa dipahami majalah *Time*⁴ membuat laporan utama *The World Best Protesters*, dengan 7 juta massa di seluruh penjuru kota.

Diskursus revolusi di Mesir pada pada fase penumbangan diktator (2011) maupun fase kudeta (2013) tak mungkin dilepaskan dari peran gerakan Kiri (sosialis-Nasseris), karena itu tak bisa disederhanakan hanya sebagai pertarungan wacana Liberal vs Islamis.⁵ Coen sengaja menyimpan jejak aktivis Kiri agar terselamatkan dari perebutan kekuasaan temporal, sehingga dapat berlindung dalam tesis suci tentang revolusi *genuine* rakyat.

Hal tersebut justru tidak berlaku bagi Alaa Abdel Fattah,⁶ salah seorang tokoh muda Kiri di balik Revolusi 25 Januari 2011, yang mempopulerkan slogan “Roti, Kebebasan, dan Keadilan Sosial” (*Bread, Freedom, Social Justice*). Sebenarnya ada pula peran kelompok independen yang antara lain diwakili figur Wael Ghanem,⁷ Marketing Executive Google untuk

3 Al-Sharq Al-Awsat, *Egypt Braces for June 30 Protests* <http://www.aawsat.net/2013/06/article55307786> diunduh 23 Juli 2013.

4 *Time*, *Egypt: The Street Rules*, 22 Juli 2013, h. 18-25.

5 Kekeliruan serupa juga terlihat dalam opini Ikhwanul Kiram di Republika, *Islam Versus Liberal Sekuler* <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/12/12/23/mfh-k6f-islam-versus-liberalsekuler> diunduh 24 Juli 2013.

6 Alaa Abdel Fattah adalah seorang blogger yang mencetuskan slogan Revolusi. Ia pembaca buku Sayid Qutb, yang salah satunya membahas “Keadilan Sosial dalam Islam” (*Al Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*). *The Guardian*, 2 November 2011, Egyptian activist Alaa Abd El Fattah accuses army of hijacking revolution <http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/02/egyptian-activist-alaa-accuses-army> diunduh 24 Juli 2013.

7 Nancy Scola, *Ghonim: “Our Revolution Is Like Wikipedia”*, 14 Februari 2011 [122](http://tech-</p></div><div data-bbox=)

kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yang menginisiasi gerakan *We Are All Khaled Said* lewat Facebook. Ada lagi, aktivis perempuan Asmaa Mahfoudz,⁸ yang menerbitkan video berani mati sebagai bentuk deklarasi anti-Mubarak di Youtube untuk membakar semangat para demonstran di Tahrir Square. Spektrum ideologi pendukung Revolusi sangat rancak mirip Wikipedia, dalam istilah Ghanem, karena setiap orang dapat memberikan kontribusi.

Apakah Coen sengaja membatasi bacaan atau menyembunyikan fakta gerakan Kiri (dan beragam kelompok lain) di Mesir? Yang menyedihkan, inisiatif pembangkangan aktivis Kiri telah dimanfaatkan jenderal militer loyalis Mubarak dan memunculkan impase politik baru, kebuntuan yang berujung kekerasan. Sebagaimana pengamat liberal Zuhairi Misrawi,⁹ Coen berselebrasi dengan wacana kudeta, seraya melupakan sejarah kelam pemerintahan sipil Salvador Allende yang digulingkan Jenderal Augusto Pinochet.

Menjadi tanggung-jawab intelektual Kiri untuk berterus-terang: apakah mereka bersetuju dengan kudeta militer sebagai bagian dari perlawanan rakyat tak bersenjata?

Jika menolak pemerintahan sipil hasil pemilu yang dinilai tak becus menjalankan tuntutan revolusi, maka haruskah bersepakat dengan pemerintahan boneka yang dikontrol penuh militer dan berniat menjalankan pemilu di masa darurat (agar calon militer maju lagi dalam pemilu dan mendapat legitimasi palsu)? Bagaimana upaya mencerdaskan dan menjaga stamina rakyat proletar untuk mengawal misi revolusi, jika sebagai intelektual Kiri sudah menentukan distingsi: mana (kelompok) rakyat yang harus dibela, mana (kelompok) rakyat yang harus dikorbankan? Seberapa relevan pandangan humanisme Kiri dalam menimbang nyawa manusia

president.com/blog-entry/ghonim-our-revolution-wikipedia diakses 24 Juli 2013.

8 Democracy Now! *Asmaa Mahfouz & the YouTube Video that Helped Spark the Egyptian Uprising* http://www.democracynow.org/2011/2/8/asmaa_mahfouz_the_youtube_video_that diunduh 24 Juli 2013.

9 Zuhairi Misrawi, "Ikhwanul Muslimin Tumbang" dalam Kompas, 5 Juli 2013, h. 6.

yang bergelora menuntut perubahan?¹⁰ Darah yang tumpah di Indonesia (1965) atau di Chile (1973) atau di Mesir (2013) adalah darah rakyat, meski berlabel komunis atau sosialis atau Islamis.

Konstelasi Rumit Politik

Coen menyebut ada empat kekuatan yang berpengaruh pasca kejatuhan Mubarak di Mesir, yaitu: *pertama*, militer yang terselamatkan gempuran Revolusi, *kedua*, birokrat antek Mubarak (*fulul*), *ketiga* IM yang diakui memiliki struktur dan jaringan organisasi luas, dan *keempat* massa rakyat yang berasal dari berbagai aliran politik dan ideologi campur-aduk.

Lalu, di mana posisi kekuatan kiri (sosialis-Nasseris)?

Rupanya, Coen menisbatkan kelompok Kiri sebagai bagian dari kuasa besar bernama “massa rakyat,” padahal real politiknya terbatas. Tiga kelompok pertama dicap Coen sebagai “pemain lama dalam desain politik Mubarak dan secara institusi dan program-program politik adalah yang paling siap dalam proses politik pasca penggulingan.” Sementara kekuatan rakyat, dijelaskan Coen, walaupun moral politiknya besar, tapi secara kelembagaan politik paling lemah karena: tidak punya kepemimpinan politik yang jelas, tidak punya struktur organisasi yang teratur dan luas, serta tidak memiliki program-program politik dan ekonomi alternatif yang solid. Sebuah otokritik yang jujur tentang kelemahan golongan Kiri.

Coen mengkategorikan IM sebagai pemain lama bersama militer dan birokrat *fulul*, seakan terpisah dari kekuatan rakyat yang secara implisit dipersepsikan sebagai pemain baru.

Di sinilah kesalahan persepsi itu bermula. Berdasar asumsi bahwa IM tidak terlibat dalam arus Revolusi Januari 2011 menggulingkan rezim Mubarak.

10 Gelombang demonstran pro-Legitimasi telah merasakan tragedi pasca kudeta: penyerangan Jum’at (5/7) menyebabkan 47 tewas, pembantaian subuh (8/7) menewaskan 51 jamaah di Masjid Rabiah al Adawiyah, dan penyerangan preman bayaran di Mansurah (19/7) menewaskan 4 perempuan demonstran.

Suatu asumsi yang terbangun berlandaskan teks formal dan tidak membaca secara cermat dinamika di lapangan, termasuk di Medan Tahrir pada masa-masa genting kejatuhan Mubarak. Pimpinan IM¹¹ memang tidak memberikan pernyataan formal untuk memelopori atau memimpin revolusi, namun mereka mendukung penuh dan menugaskan kader-kader muda¹² untuk memperkuat soliditas aksi dan melindungi peserta aksi dari kalangan perempuan atau kelompok rentan.

Tokoh muda IM, Mohammed Abbas merupakan salah seorang anggota *The Revolutionary Youth Council* yang terbentuk di Medan Tahrir dan bertahan selama 18 hari revolusi. Tokoh senior IM secara bijak mengambil jarak dari Revolusi Kaum Muda Mesir, agar gerakan perlawanan massif itu tidak prematur karena bisa dicap mengusung ideologi Islamis atau dicap sekadar duplikasi Revolusi Islam Iran (1979). Harga yang harus dibayar adalah IM dipersepsikan kontra-revolusioner atau justru menunggangi revolusi untuk ambisi kekuasaan. Anehnya, tak ada yang menuding hal serupa ketika tokoh liberal semacam Mohammed el-Baradei baru turun ke Medan Tahrir persis di bulan Januari 2011. El-Baradei kini diangkat sebagai Wakil PM dalam pemerintahan sementara, setelah kalah dalam pilpres tahun 2012.

Para aktivis dan wartawan yang terlibat langsung di Medan Tahrir pasti mencatat peran tak terbantahkan kader IM dalam melindungi gerakan rakyat dari penyusupan dan provokasi preman atau aparat loyalis Mubarak.¹³ Tugas lain kader IM ialah mengamankan toko dan apartemen yang ditinggalkan penghuninya karena bergabung dengan aksi di Medan Tahrir, termasuk memasok dan mengatur logistik untuk demonstran. Bahkan, sampai soal kecil kebersihan di Medan Tahrir menjadi perhatian

11 Jonathan D. Halevi, the Jerusalem Center for Public Affairs, *Intelligence Document Reveals Muslim Brotherhood Role in Egyptian Revolution* <http://jcpa.org/intelligence-document-reveals-muslim-brotherhood-role-in-egyptian-revolution/#sthash.oFSkJL7.dpuf> diunduh 24 Juli 2013.

12 Global Post, *Inside the Muslim Brotherhood: Part 1* www.globalpost.com/dispatch/egypt/110220/inside-the-muslim-brotherhood#1 diakses 22 Juli 2013.

13 Al Youm al Sab"aa, No. 120, "Protesters in Bloody Wednesday clashes in Cairo's Tahrir Square would have been slain but for the fact that young Muslim Brothers defended them", 15 Februari 2011.

kader IM, disamping penataan waktu dan barisan shalat berjamaah. Konsistensi IM dalam pendisiplinan aksi massa tetap terjaga pada saat atau pasca penjatuhan Mursi, dengan mengusung slogan pro-legitimasi dan pro-konstitusi. Demonstrasi Tajarrud yang berpusat di Medan Rabiah al-Adawiyah terlihat rapi dan aman, sementara demonstrasi di Medan Tahrir yang dimotori Tamarod merekam pelecehan seksual terhadap sedikitnya 100 perempuan.

Pada momen yang tepat dan diperhitungkan dengan jeli untuk menandai Revolusi 2011, IM menghadirkan tokoh sekaliber Yusuf Qardhawwy untuk memimpin khutbah Jum'at di Medan Tahrir. Tapi, IM tidak mau monopoli panggung Tahrir, sehingga tokoh seperti el-Baradei dan Amr Moussa yang lebih menguasai panggung, selain Hamdin Sabahi. IM memang pemain lama dalam perpolitikan Mesir, jauh sebelum Mubarak berkuasa, karena sejak berdiri 1928 di kota Ismailiyah, IM menyatakan menaruh perhatian terhadap kondisi negara Mesir (saat masih di bawah kekuasaan Raja Farouk) dan dunia Islam.

IM bukan semata gerakan dakwah yang meramaikan masjid dengan zikir, namun memompa semangat perjuangan rakyat. Pendukung utama IM di masa awal terdiri dari kalangan pedagang, pekerja, kuli pelabuhan dan petani kecil plus guru dan dosen. Karena formasi keanggotaan yang beragam itulah, IM menampilkan diri sebagai gerakan populis, meski tak bisa dibilang gerakan proletariat dalam kacamata kiri. Tapi jelas, IM tak bisa dikategorikan sebagai kelas borjuasi yang tak memiliki basis sosial dan ideologi di akar rumput.

Hasil pemilu legislatif tahun 2011 diperkuat dengan pemilihan presiden 2012 menunjukkan, basis IM justru di pedesaan dan kota-kota kecil di luar Kairo. Sangat gamblang tergambar dalam hasil pemilu itu, betapa loyalis Mubarak hanya menguasai kota-kota besar yang dikontrol ketat aparat, sambil berbagi suara dengan partai sosialis dan liberal yang bermain di kalangan menengah. Jika harus dibandingkan, IM di Mesir bak perpaduan Masyumi (dalam hal ideologi) cum PDIP/NU (dalam hal loyalitas pengikut) di Indonesia. Mungkin tak paralel betul, namun siapa dapat memungkiri bahwa IM adalah arus utama gerakan populis di Mesir dan bukan kelompok minoritas pinggiran, apalagi sekadar klub intelektual salon.

Pengkhianatan IM?

Untuk mendukung tesisnya, betapa kudeta militer tak perlu ditangisi, Coen mendalilkan IM mengkhianati revolusi saat berkolaborasi dengan militer. Pada Februari 2011, Coen menyitir beberapa anggota Dewan Penasehat¹⁴ IM bertemu dengan Wakil Presiden Jenderal Omar Suleiman. Hasil dari pertemuan itu, masih menurut Coen, IM sepakat untuk membersihkan Tahrir Square dari para demonstran. Sebagai imbalannya, militer akan membebaskan dua tokoh terkemuka IM dari dalam penjara, yakni Khairat El-Shater dan Hassan Malek. Entah apa kaitannya, Coen menjelaskan, militer kemudian membebaskan Aboud dan Tarek El Zomor yang dipenjarakan karena tuduhan hendak membunuh Presiden Anwar Sadat. Tak lama kemudian, Tarek al-Bishri dan anggota IM Sobhi Saleh, ditunjuk SCAF untuk mempersiapkan amandemen konstitusi.

Simpulan Coen terlalu jauh menafsirkan interaksi antar kekuatan politik di tengah situasi *chaos* pasca mundurnya Mubarak. Esam al-Amin¹⁵ mencatat, justru militer (SCAF) yang berinisiatif mencari pelindung agar kejahatan politik dan skandal korupsinya selama rezim Mubarak berkuasa tak dituntut kaum revolusioner. Militer memasang tiga target utama sebagai garansi apabila kekuasaan diserahkan kepada pemerintahan sipil:

Pertama, mengamankan kekayaan haram para jenderal yang bernilai 25-35% dari ekonomi nasional hasil korupsi. *Kedua*, imunitas dan impunitas dari segala kejahatan politik dan ekonomi yang dilakukan di masa lalu. *Ketiga*, status istimewa dalam konstitusi yang membolehkan militer mengontrol anggarannya tanpa pengawasan sipil dan memiliki hak veto untuk kebijakan strategis, termasuk hubungan luar negeri dan keputusan

14 Suatu bukti Coen tak menguasai betul struktur organisasi IM. Maktab al-Irsyad bukanlah “Dewan Penasehat”, tapi Pengurus Pusat IM. Istilah Mursyid Aam, sebagai konsekuensinya, juga bukan “Ketua Dewan Penasehat”, tapi Ketua Umum. IM memang kerap menggunakan nomenklatur sufi sebagai identitas organisasinya.

15 Esam al-Amin, *The Calculus of Egypt’s Presidential Race*, International Policy Digest <http://www.internationalpolicydigest.org/2012/04/23/the-calculus-of-egypts-presidential-race/> diunggah 22 Juli 2013.

untuk menyatakan perang dan damai.

Bagaimana mungkin IM dapat memberikan garansi itu semua, sedang legitimasi politik belum di tangan dan pemilu yang bebas masih dalam wacana? Media pro-militer dan loyalis Mubarak, telah mendefinisikan setiap peristiwa sesuai dengan kehendak politiknya. Bahkan, media pro-status quo tak segan-segan melakukan manipulasi agar membentuk opini publik. Itulah yang dianggap sebagai fakta.

Sikap kritis tetap dipertahankan kaum Islamis sebagaimana terlihat dalam kritik Tariq Ramadan,¹⁶ cucu langsung Hassan al-Banna yang kini menetap di Eropa, dalam kondisi revolusi yang kompleks sering terjadi paradoks. Setelah Mursi terpilih sebagai Presiden dan rancangan konstitusi mulai disusun, maka militer menuntut kembali hak prerogatifnya. Konstitusi itu menetapkan 15 anggota Dewan Keamanan Nasional, sesuai dengan jumlah wilayah otonomi militer, mencakup tanggung-jawab untuk masalah vital seperti pernyataan perang dan damai, serta kewenangan peradilan militer untuk memeriksa kasus sipil. Sebuah porsi kuasa yang membuat peran militer lebih menentukan dalam konfigurasi baru politik Mesir, bahkan lebih luas daripada di masa Mubarak, begitu kritik tajam Ramadan.

Pandangan kritis sangat diperhatikan penentu kebijakan IM di masa Revolusi, karena itu mereka tidak pernah memberikan konsesi kepada militer untuk menekan aksi demonstran di Tahrir Square. Buktinya, kader muda IM tetap bergabung bersama kaum revolusioner sampai jadwal pemilu ditentukan. Setelah proses pemilu, segenap komponen gerakan IM menyokong fondasi kehidupan demokrasi berbasis konstitusi baru. Sebab, mereka merasakan betul derita rakyat akibat kondisi darurat militer sejak Revolusi 1952. Presiden sementara Adly Mansour dan PM Hazem Beblawi serta Wakil PM el-Baradei tak pernah merasakan sedikitpun derita rakyat. Mereka kaum elit borjuasi sejati yang hidup aman dan mewah di tengah penderitaan rakyat. IM menginginkan rakyat Mesir hidup normal sebagaimana negeri demokrasi lainnya.

16 Tariq Ramadan, *Mohammad Morsy's dangerous game: The unfolding paradox in Egypt* <http://www.abc.net.au/religion/articles/2012/12/13/3654018.htm> diunduh 22 Juli 2013.

Sikap politik IM itu dapat diteorikan sebagai format baru gerakan Islam pasca Musim Semi Arab, yang mengarah pada gerakan konstitusionalisme. Andai saja, IM mau berkolaborasi dengan militer untuk memenuhi ambisi politiknya, sebagaimana ilusi Coen, maka kedua kekuatan itu akan sukses bersekutu menghabisi lawan politik lainnya. Tak ada yang mampu menandingi kedua aktor utama itu seandainya bersatu, meskipun kekuatan lain didukung Amerika Serikat dan Israel serta didanai Negara-negara Teluk sekalipun.

Tapi, IM menolak berselingkuh dengan militer. Mereka konsisten untuk memenuhi misi Revolusi: mengakhiri rezim darurat militer dan membentuk pemerintahan sipil yang kokoh. Untuk itu, IM menyetujui pembentukan partai politik (*Freedom and Justice Party*), sebagaimana kekuatan lain bebas melakukan hal serupa. Tatkala FPJ menang pemilu dan Mursi memenangkan kursi Presiden, Muhammad Badie selaku Ketua Umum IM menyatakan secara terbuka: “Rakyat Mesir telah menentukan pemimpinnya yang baru. Saya tunduk kepada perintah Presiden yang dipilih oleh rakyat.”¹⁷

Fakta yang tak terbantahkan, Presiden Mursi kemudian memensiunkan dini dua Jenderal paling berpengaruh dalam militer, yakni Hussein Tantawi (Panglima Angkatan Bersenjata Mesir yang berkuasa sejak 1991) dan Sami Anan (Kepala Staf Angkatan Bersenjata sejak 2005). Tak hanya itu, Mursi juga membebaskan-tugaskan 70 perwira militer dan menugaskan perwira baru yang lebih berintegritas. Hal itu bagian dari upaya reformasi di tubuh militer. Mursi menumbuhkan kebanggaan baru di tubuh militer saat berhasil merebut wilayah Sinai dari tangan Israel dan sukses menggelar gencatan senjata Palestina-Israel serta mengakhiri blokade Gaza. Tak ada nuansa kolaborasi, apalagi pengkhianatan IM, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Suatu perkara yang luput dilakukan Mursi: reformasi di tubuh Kepolisian dan Dinas Intelijen (Mukhabarat), yang selama ini membatasi gerak bebas rakyat. Selain itu juga, institusi Kejaksaan dan Kehakiman masih dipenuhi pendukung rezim lama, sehingga mereka dapat memproses dakwaan yang tak masuk akal kepada kaum sipil revolusioner.

Tudingan Coen melompat ke kebijakan ekonomi Mursi yang dicap neo-

17 Al-Masry Al-Youm, 25 Juni 2012.

liberal seperti model Erdoganomic di Turki. Apa yang bisa dilakukan seorang Presiden di masa transisi, ketika tuntutan rakyat begitu tinggi dan tekanan asing demikian dahsyat? Tatkala cadangan devisa merosot drastik, inflasi menjulang dan angka kemiskinan serta pengangguran ikut terkerek; sebuah langkah darurat harus dilakukan. Menurut *Strategic Analysis*,¹⁸ cadangan devisa Mesir menciut dari \$13,5 milyar (2010) tinggal \$4,8 milyar (2012). Angka pengangguran meningkat dari 12,06% (2011) menjadi 12,31% (2012). Begitu pula angka kemiskinan sangat tinggi (40%).

Suasana yang dihadapi Mursi, boleh jadi mirip dengan tekanan yang dihadapi Presiden B.J. Habibie (1998-1999) di Indonesia. Karena itu, Mursi menempuh langkah drastis berupa mengurangi impor gandum, seraya mengoptimalkan anggaran negara untuk subsidi pertanian agar kebutuhan pokok (roti) terpenuhi. Di era Mubarak, produksi gandum domestik dibatasi maksimal 20%, sekarang sudah melampaui 60%. Dulu Mesir harus mengimpor gandum sepenuhnya dari AS, sekarang Mursi mengimpor dari negara yang lebih bersahabat demi menghemat belanja negara, sambil meningkatkan pendapatan petani lokal. Mursi juga membebaskan hutang produktif 40.000 petani marjinal yang memiliki hutang di bawah 10.000 pounds (Rp 30 Juta), sehingga mereka bisa bernafas lega dan memulai hidup baru. Itu semacam *bail out* untuk rakyat kecil.

Kesalahan Mursi mungkin adalah menerima pinjaman IMF sebesar \$4,8 milyar. Hal itu dibesar-besarkan kelompok kiri Nasseris yang menggalang gerakan Tamarod (pembangkangan). Padahal, pinjaman itu untuk memperkuat cadangan devisa. Padahal, di luar IMF, Mursi juga mendapat bantuan Qatar senilai \$8 milyar dan pinjaman lunak dari Turki sebesar 2 milyar. Investasi memang sulit datang di tengah krisis politik, tapi kunjungan Mursi ke China (Agustus 2012) menghasilkan perjanjian investasi senilai \$4,9 milyar. Bersama investor Korea, Mursi merintis pembangunan pabrik Samsung terbesar di kawasan Arab, di provinsi Bani Suweif, agar barang elektronik terjangkau masyarakat. Pembangunan pabrik otomotif nasional, komputer, hingga peralatan militer sudah masuk dalam program kabinet Mursi. Yang paling memukul Negara-negara Teluk penyokong kudeta adalah kebijakan Mursi merevitalisasi Terusan Suez, sehingga dalam satu

18 *Strategic Analysis, Middle East and North Africa Oil and Gas Sector Risks and Forecasts Report*, The Henry Jackson Society, Juni 2013.

tahun ditargetkan meningkatkan devisa hingga \$100 milyar dari semula hanya \$5,6 milyar. Hal itu tentu akan menekan ekonomi Uni Emirat dan Kuwait yang bersandar pada pelabuhan internasional.

Jika Coen masih berpikir Mursi menjalankan kebijakan neoliberal sebagaimana Erdogan, maka Coen harus membaca ulang referensi yang digunakannya.¹⁹

Kiri Romantik

Sikap intelektual kiri yang membiarkan kudeta militer tanpa kritik, bahkan melakukan selebrasi, telah menciderai aspirasi gerakan rakyat yang murni. Dalam bahasa Khaled Abou el-Fadl,²⁰ justru intelegensia sekular yang terang-terangan melakukan pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi dan demokrasi. Romantisme yang mengorbankan akal sehat dan nurani universal. Sebagian di antara aktivis kiri ada yang menjual ayat-ayat revolusi demi kursi kekuasaan.

Kaum Islamis dengan segala catatan plus-minus atas gebrakan politiknya di Mesir, telah membuktikan bahwa mereka lebih siap untuk menghadapi ajang demokrasi (Pemilu dan Referendum). Lebih dari itu, mereka juga siap untuk berpolitik secara elegan (nir-kekerasan) di jalanan dengan aksi massa yang tak pernah terbayangkan (*unthinkable*) sebelumnya. Bukan semata mempertahankan kekuasaan, tapi menegakkan konstitusi dan meraih legitimasi publik yang otentik.

Sementara kaum kiri yang berlindung di balik tesis Rosa Luxemburg atau Leon Trotsky, telah kehilangan elan revolusionernya. Sebab, mereka tak dapat lagi merasakan harumnya gas air mata dan wanginya darah yang tumpah ditembus peluru aparat, saat asyik berdiskusi di ruang berpendi-

19 Ahmad Dzakirin, *Kebangkitan Pos-Islamisme: Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012.

20 Khaled Abou El Fadl, *The collapse of legitimacy How Egypts secular intelligentsia betrayed the revolution* <http://www.abc.net.au/religion/articles/2013/07/11/3800817.htm> diakses 24 Juli 2013.

Coen Husain Pontoh, dkk.

ngin udara.***

Menakar Peran Gerakan Kiri Dalam Kejatuhan Mursi

Tanggapan terhadap Sapto Waluyo

Coen Husain Pontoh

ARTIKEL saya yang berjudul *Masa Depan Demokrasi Mesir*, mendapatkan tanggapan berharga dari Sapto Waluyo. Sebelum lanjut, saya ingin mengatakan tentang beberapa poin dari artikel itu yang tak perlu saya komentari karena ketidakjelasanannya.

Pertama, soal istilah Kiri Romantik. Saya tak tahu persis apakah ini istilah akademik atau semacam label untuk membuat pembaca tertarik membaca artikel tersebut. *Kedua*, saya dianggap berlandung di balik tesis dua intelektual-revolusioner terkemuka Rosa Luxemburg dan Leon Trotsky. Lagi-lagi saya tak temui argumen yang solid pada bagian mana saya menggunakan tesis kedua sosok tersebut sebagai benteng pertahanan diri. Statemen ini lebih serupa tudingan ketimbang argumentasi. Dan *ketiga*, soal akurasi besaran angka demonstiran yang tamplek di Tahrir Square, serta validitas jumlah penandatanganan aksi petisi Tamarod (pembangkangan).

Saya teringat tulisan Peter Hessler di majalah *The New Yorker*, yang juga bertanya hal senada dengan Waluyo. Hessler bertanya pada seorang organisir Tamarod, “kenapa tidak ada ruang untuk nomor telepon dan alamat email dalam form isian sehingga kelak bisa membangun jaringan kerja aktivisme di masa depan?” Si organizer lalu menjawab singkat, “kamu berharap saya menelpon 15 juta penandatangan ini?”¹

Namun demikian, ada dua hal yang ingin saya tanggapi khusus. *Pertama*, soal kritik Waluyo atas cara pembacaan saya terhadap proses politik di Me-

¹ Peter Hessler, “The Showdown Winners and Losers in Egypt’s ongoing revolution,” *The New Yorker*, July 22, 2013, p. 27.

sir yang berujung kejatuhan presiden Muhamad Mursi; dan *kedua*, soal saya sengaja menutup-nutupi peran gerakan kiri selama masa pergolakan revolusioner jilid I serta proses pemakzulan Mursi.

Cara Pembacaan

Melalui artikelnya, *Impase Politik Mesir: Kegamangan Kiri Romantik*, Waluyo menuduh saya, yang dikatakannya sebagai perwakilan Kiri Romantik, mendukung kudeta militer Mesir terhadap pemerintahan presiden Mursi yang berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan (FJP), yang merupakan sayap politik dari Persaudaraan Muslim (Ikhwanul Muslimin/IM). Saya tidak tahu darimana atau bagaimana ceritanya hingga Waluyo tiba pada kesimpulan demikian.

Artikel saya sebenarnya bertujuan untuk menjelaskan kenapa Mursi jatuh dari kekuasaannya yang terpilih secara demokratis di sebuah negara yang demam revolusinya tengah berkobar. Tetapi rupanya Waluyo menganggap bahwa dengan *menjelaskan* sebab-sebab kejatuhan Mursi, yang kemudian ditelikung oleh kudeta militer itu, tak lain merupakan *pembenaran* atau *pembiaran* atas kudeta militer tersebut. Waluyo rupanya ingin agar saya tak perlu memberi penjelasan, tak usah mencari tahu sebab-sebab kenapa Mursi yang kekuasaannya baru seumur jagung itu didemonstrasi oleh puluhan juta rakyat Mesir. Usaha seperti itu, menurut Waluyo, adalah sia-sia, *toh* Mursi jatuh oleh kudeta militer. Yang paling penting, bagi Waluyo, adalah bagaimana sikap saya terhadap kudeta militer itu sendiri. Mendukung atau menolak? Berdiri di barisan pemerintahan yang sah (*legitimate*) atau berdiam serta berpihak pada kudeta militer?

Hal lain bagi Waluyo, cara saya menjelaskan kenapa Mursi jatuh dianggap sebagai upaya menguliti IM. “Posisi IM sebagai salah satu aktor politik utama dikuliti habis, hingga visi ekonomi IM diadili tanpa riset memadai,” begitu tulis Waluyo. Ia memang benar, tapi dengan melepaskan kritiknya itu dalam konteks pembahasan saya secara keseluruhan. Fakta-fakta yang saya kemukakan tentang IM ia anggap sebagai fakta yang terpisah dan acak dari proses politik yang ada, sementara saya memperlakukan fak-

ta-fakta itu sebagai bagian dari keseluruhan proses politik yang berujung pada kejatuhan Mursi. Karena itu, kritik Waluyo ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari sikapnya yang menolak posisi teoritik saya seperti yang saya kemukakan di atas. Selain itu, kritik saya bahwa Mursi menjalankan kebijakan ekonomi yang tak banyak berbeda dengan rezim Hosni Mubarak, yakni kebijakan ekonomi neoliberal, tidak mendapatkan sanggahan yang serius. Bahkan, apa yang dijelaskan Waluyo soal program-program ekonomi Mursi, sebenarnya hanya memperkuat tesis saya.²

Jika sikap Waluyo ini kita ikuti, maka pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari peristiwa yang sangat bersejarah dari revolusi Mesir saat ini? Jawabannya adalah tidak ada. Bagi Waluyo, yang penting, sekali lagi, apakah saya mendukung atau menolak kudeta militer terhadap Mursi. Posisi saya sudah begitu jelas, saya menolak kudeta militer tersebut tanpa syarat. Tapi, yang juga tak kalah penting buat saya adalah, mencari tahu kenapa Mursi jatuh, karena dari sana saya bisa menarik banyak pelajaran berharga bagi pembangunan gerakan anti kapitalisme-neoliberal di Indonesia. Dan dalam artikel itu, saya sebenarnya mencoba menjauh dari analisa yang bersifat simplistik dan reduksionis, dengan menempatkan kejatuhan Mursi itu dalam konteks perjuangan politik dan ekonomi pasca kejatuhan Mubarak. Artinya, kejatuhan Mursi itu tidak bisa dinisbatkan pada pertarungan politik semata di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada, tapi juga oleh

2 Dalam soal kebijakan ekonomi Mursi ini, saya kira Waluyo tidak memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan neoliberalisme atau lebih tepatnya kapitalisme-neoliberal. Ia mengartikan neoliberalisme sekadar anti AS, khas cara pandang kalangan Islam Politik selama ini. Lihat penggalan artikelnya ini: "Kesalahan Mursi mungkin adalah menerima pinjaman IMF sebesar \$ 4,8 milyar. Hal itu dibesar-besarkan kelompok kiri Nasseris yang menggalang gerakan Tamarrud (pembangkangan). Padahal, pinjaman itu untuk memperkuat cadangan devisa. Padahal, di luar IMF, Mursi juga mendapat bantuan Qatar senilai \$ 8 milyar dan pinjaman lunak dari Turki sebesar \$ 2 milyar. Investasi memang sulit datang di tengah krisis politik, tapi kunjungan Mursi ke China (Agustus 2012) menghasilkan perjanjian investasi senilai \$4,9 milyar. Bersama investor Korea, Mursi merintis pembangunan pabrik Samsung terbesar di kawasan Arab, di provinsi Bani Suweif, agar barang elektronik terjangkau masyarakat. Pembangunan pabrik otomotif nasional, komputer, hingga peralatan militer sudah masuk dalam program kabinet Mursi. Yang paling memukul Negara-negara Teluk penyokong kudeta adalah kebijakan Mursi merevitalisasi Terusan Suez, sehingga dalam satu tahun ditargetkan meningkatkan devisa hingga \$100 milyar dari semula hanya \$5,6 milyar. Hal itu tentu akan menekan ekonomi Uni Emirat dan Kuwait yang bersandar pada pelabuhan internasional.

hambatan-hambatan struktural warisan rezim lama. Dalam konteks itu, menurut saya, Mursi dan IM terlena dengan permainan kekuasaan politik dan gagal dalam mengatasi hambatan-hambatan struktural tersebut. Akibatnya, mereka memilih bersekutu dengan rezim lama, terutama militer (jenderal Abdel Fattah al-Sisi, yang ditunjuk Mursi sebagai Menteri Pertahanan, dikenal sebagai seorang pro-Islamis), sembari membalikkan punggungnya dari kekuatan revolusioner yang menjatuhkan rezim Mubarak.

Mursi dan IM, terlalu percaya diri dengan koalisinya serta konsesi-konsesi politik ekonominya dengan militer, akibatnya lupa dengan sikap politik militer yang sangat pragmatis. Dari wawancaranya dengan aktivis-aktivis dan elit pimpinan IM di lapangan, Hessler mengatakan bagaimana mereka begitu percaya bahwa tentara akan berada di belakang presiden yang memenangkan pemilu secara demokratis.³ Ilusi koalisi yang dibangun Mursi dan IM bersama militer itu membuatnya alpa bahwa militer pun pada akhirnya memisahkan diri dari Mubarak, ketika kekuasaan diktator tua itu tak bisa lagi dipertahankan akibat desakan massa yang sangat besar. Kenyataan pahit akibat kesalahan yang dilakukan Mursi dan elit IM ini yang tampaknya tak bisa diterima Waluyo. Akibatnya, Waluyo lebih suka melompat pada akhir cerita bahwa Mursi jatuh karena dikudeta oleh militer dan kaum Kiri Romantik bersuka-cita atasnya. Sebuah cara berpikir yang ahistoris dan apologetik.

Saya sendiri dalam artikel itu mengatakan bahwa kudeta militer tersebut bisa berlangsung, juga akibat lemahnya gerakan rakyat yang menentang pemerintahan Mursi. Saya mengatakan bahwa “sementara kekuatan rakyat, walaupun moral politiknya besar, tapi secara kelembagaan politik paling lemah: tidak punya kepemimpinan politik yang jelas, tidak punya struktur organisasi yang teratur dan luas, serta tidak memiliki program-program politik dan ekonomi alternatif yang solid. Akibatnya, pasca revolusi jilid I, kekuatan politik rakyat ini amat tidak siap dalam mengarungi pertarungan di medan elektoral. Mereka cukup puas telah sukses menjatuhkan Mubarak, tapi gelagapan ketika dihadapkan pada tantangan baru, demokrasi elektoral.”

3 Salah satu yang diwawancara Hessler adalah juru bicara IM Gehad el-Haddad yang mengatakan, “There is no dialogue with el-Sisi. He is an arm of the state. He follows the leadership of his President, Muhammad Mursi.” *Ibid.*, p.29.

Selanjutnya, di bagian lain dari artikel tersebut saya menegaskan, “selama massa masih cair seperti saat ini, maka kemampuannya baru sampai pada menggulingkan fraksi kekuasaan yang tidak berpihak kepadanya untuk digantikan oleh fraksi kekuasaan yang lain. Gerakan rakyat sudah semestinya meninggalkan pola-pola gerakan yang tanpa kepemimpinan politik, organisasi, dan teoritik yang jelas jika mereka ingin menuntaskan revolusinya.”

Peran Gerakan Kiri dalam Revolusi

Selanjutnya Waluyo mengatakan, “diskursus revolusi di Mesir pada pada fase penumbangan diktator (2011) maupun fase kudeta (2013) tak mungkin dilepaskan dari peran gerakan Kiri (sosialis-Nasseris), karena itu tak bisa disederhanakan hanya sebagai pertarungan wacana Liberal vs Islamis. Coen sengaja menyimpan jejak aktivis Kiri agar terselamatkan dari perebutan kekuasaan temporal, sehingga dapat berlindung dalam tesis suci tentang revolusi genuin rakyat.”

Saya sebenarnya tidak bermaksud menyembunyikan peran aktif gerakan kiri dalam proses penumbangan diktator Mubarak pada 2011 dan demonstrasi massal melawan Mursi. Bahkan dalam dokumen-dokumen pergerakan yang kini bisa diakses melalui *Tahrir Documents*,⁴ terlihat bagaimana gerakan kiri dan serikat buruh begitu aktif dalam memobilisasi aksi-aksi penentangan terhadap Mubarak.

Seperti ditulis Philip Marfleet, “seluruh sektor kunci dalam industri Mesir terlibat dalam aksi-aksi menentang Mubarak: tekstil, baja, transportasi, buruh Terusan Suez, pegawai sipil, bahkan buruh pabrik yang dimiliki oleh militer.”⁵ Namun walaupun sangat aktif, gerakan kiri hanyalah salah satu bagian dari banyak gerakan revolusioner saat itu. Yang pasti, IM baru

⁴ <http://www.tahrirdocuments.org/>

⁵ Philip Marfleet, *Egypt, The Workers Advance*, “International Socialism a quarterly journal of socialist theory, Issue: 139, <http://www.isj.org.uk/index.php4?id=904&issue=139>, diunduh pada 8/10/2013.

turun gelanggang pada 28 Januari 2011 atau datang belakangan, saat gelombang revolusi sedang ada di puncaknya, ketika terdapat tanda-tanda nyata bahwa rezim Mubarak nafasnya telah di ujung tenggorokan.⁶

Demikian juga dalam aksi massa menentang Mursi, peran gerakan kiri, terutama serikat buruh, tak bisa dinafikan. Di tengah-tengah krisis ekonomi yang begitu buruk, Mursi malah meluncurkan rangkaian kebijakan pengetatan ekonomi sesuai anjuran IMF. Di sisi lain, secara politik makin tampak bahwa program mendesak Mursi adalah mengonsolidasi kekuasaannya sendiri melalui kolaborasinya dengan militer.

Inilah yang menjadi pemicu utama berbagai aksi pemogokan buruh yang massif. Sebagaimana dicatat oleh the Egyptian Centre for Economic and Social Rights (ECESR) pada 2012, pemogokan buruh terjadi sebanyak 3,817 kali. Pada empat bulan pertama tahun 2013, jumlah pemogokan itu mencapai lebih dari 2.400 kali. Masih menurut ECESR, lebih dari 70% dari seluruh pemogokan yang terjadi pada 2012 berlangsung di masa pemerintahan Mursi, yang jika di rata-ratakan mencapai 450 kali pemogokan dan protes setiap bulannya antara Juli dan Desember. Sementara, antara Januari dan Maret 2013, pemogokan terjadi rata-rata sebanyak 800 kali di berbagai tempat terpisah setiap bulannya. Sebagian besar pemogokan itu menuntut kenaikan tingkat upah; sementara isu lainnya adalah keamanan kerja.⁷

Menariknya, aksi-aksi pemogokan ini berlangsung ketika gerakan rakyat lainnya belum lagi turun ke jalan-jalan. Sehingga bisa dikatakan bahwa aksi puluhan juta menuntut pemilihan presiden yang dipercepat itu, terinspirasi dari rangkaian gelombang pemogokan oleh puluhan ribu buruh Mesir ini. Apalagi, ketika Mursi dan IM menggunakan pendekatan represif dalam merespon pemogokan-pemogokan buruh tersebut, maka para aktivis kemudian mulai membangun jaringan perlawanan yang menghubungkan antara pabrik, komunitas, dan jalanan.

6 Pembahasan mengapa IM datang “terlambat” dalam peristiwa revolusioner itu, perlu mendapatkan perhatian lebih serius, yang bisa diperdebatkan di waktu yang lain.

7 Lihat Marfleet, *op.cit*

Pada saat yang sama, kekerasan sektarian di masa pemerintahan Mursi juga meningkat pesat dibanding masa rezim Mubarak. Mariz Tadros mencatat, jumlah kekerasan sektarian meningkat dari 45 pada 2010 menjadi 70 pada 2011, tahun ketika gerakan revolusi sukses menjatuhkan Mubarak. Pada 2012, angkanya melonjak lagi mencapai 112.⁸ Selain itu, kekerasan seksual juga terus terjadi di era Mursi ini yang menyebabkan kaum perempuan juga terlibat aktif dalam aksi menuntut mundur Mursi.

Jadi Waluyo benar ketika ia mengatakan bahwa kelompok Kiri juga aktif terlibat dalam aksi penumbangan Mubarak dan kemudian Mursi. Tetapi, keterlibatan kaum Kiri dalam aksi Tamarod itu bukan karena Mursi dan IM adalah representasi Islam Politik, sesuatu yang mungkin hendak dikesankan oleh Waluyo, tetapi lebih karena kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik yang ditempuh Mursi. Kaum kiri melihat bahwa aksi-aksi sektarian yang dilakukan oleh Mursi dan pendukungnya sebagai upaya untuk memecah-belah rakyat Mesir, dan mengalihkan perhatian mereka dari buruknya kebijakan-kebijakan ekonomi politik Mursi.

Penutup

Pasca kudeta, militer langsung bergerak cepat melakukan aksi-aksi penangkapan terhadap presiden Mursi dan para pemimpin IM lainnya. Media-media milik IM juga diberangus. Di jalanan, pendukung Mursi secara aktif dan militan memobilisasi massa pendukungnya untuk menentang tindakan kudeta tersebut. Aksi-aksi ini kemudian dihadapi dengan represi brutal oleh militer. Puluhan orang mati tertembak peluru timah, dan ratusan lainnya menderita luka-luka. Demokrasi Mesir sedang menuju era kegelapannya. Sebagian besar memprediksi bahwa krisis ini tak akan berakhir segera karena IM, dengan pengalaman selama berpuluh tahun direpresi rezim, tak akan mudah ditundukkan dengan kekerasan militer.

Dalam situasi ini, dimana kaum kiri berpihak? Sebuah pernyataan poli-

⁸ Mariz Tadros, "Copts Under Mursi Defiance in the Face of Denial," in *Middle East Report*, Summer 2013, Number 267, p. 23.

tik yang dikeluarkan oleh Revolutionary Socialist (RS)⁹ di Mesir, sebuah kelompok yang aktif dalam gerakan Tamarod, patut diperhatikan. Menurut RS, tindakan represif militer terhadap pendukung IM atas nama kebebasan dan demokrasi adalah bohong belaka. Tindakan itu sejatinya untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dan politiknya yang terancam oleh gerakan massa. Oleh sebab itu, gerakan kiri tidak akan mengambil keuntungan sedikitpun dalam aksi brutal militer tersebut. Kaum kiri justru mengutuk tindakan brutal militer terhadap pendukung Mursi, sebagaimana mereka tidak akan melupakan bagaimana pendukung IM membunuh dan melukai para demonstran di Mokattam, Sidi Gaber di Alexandria, dan di El-Manial, Kairo.¹⁰

Posisi kaum kiri adalah terus mengorganisir dan memobilisasi massa rakyat di jalanan, di komunitas dan di tempat kerja, agar bisa melindungi dirinya sendiri. Sudah terbukti, baik di masa Mubarak, Mursi, dan kini rezim militer, rakyat selalu menjadi korban. Pada kekuatan rakyatlah, letak sesungguhnya kekuatan gerakan kiri. Jika gerakan kiri terpisah dari massa, maka ia tidak memiliki arti sama sekali.***

9 Lihat *Freedom is in the hands of the people*, July 10, 2013, <http://socialistworker.org/2013/07/10/freedom-in-the-peoples-hands>

10 Clashes in Cairo after Mursi Attack Palace Sit-in, http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/12/05/clashes-in-cairo-after-Mursi-supporters-attack-palace-sit-in/?_r=0, diunduh pada 8/11/2013.

Tidak Ada *Chaos* Dalam Masyarakat Mesir

Samir Amin

KETIKA mata dunia berpaling ke Syria, mungkin banyak orang lupa bahwa revolusi Mesir belum selesai dan terus menunjukkan dinamikanya. Di antara negeri-negeri “musim semi Arab”, Mesir adalah satu-satunya negeri dengan konjungtur politik dan sosial yang menunjukkan stamina revolusioner yang paling bertahan lama dalam transisi dari tatanan lama menuju tatanan sosial, politik, dan ekonomi baru.

Bagi pers dominan, yang lebih suka melihat Mesir sebagai negeri yang “stabil” di bawah cengkeraman Barat, yang terjadi di Mesir hari ini merupakan “krisis” yang mengarah pada destruksi yang, sebagai konsekuensinya, membutuhkan stabilisasi. “Stabilitas” adalah kata kunci bagi opini dominan ini. Tetapi, tidak demikian halnya bagi Samir Amin, yang melihat gejolak yang terjadi di Mesir sebagai suatu situasi transisi yang penting bagi rekonfigurasi tatanan sosial, ekonomi, dan politik baru dalam apa yang diistilahkannya sebagai “jalan panjang menuju sosialisme” (*longue route au socialisme*).

Selepas sebuah acara di UNESCO (Paris) pada 20 September 2013, **Samir Amin**, ekonom dan pemikir kelahiran Mesir, direktur Forum Dunia Ketiga dan presiden Forum Dunia Alternatif, diwawancarai oleh **Muhammad Al-Fayyadl**, *pelajar filsafat Universitas Paris VIII*, mengenai revolusi Mesir dan pelajaran yang dapat ditarik bagi rakyat Indonesia. Berikut petikannya:

Muhammad Al-Fayyadl (MAF): *Saya kontributor untuk sebuah jurnal yang dikelola oleh para aktivis kiri di Indonesia, Marxis atau neo-Marxis, dari kiri jauh sampai kiri tengah, bernama IndoPROGRESS. Kami akan senang bila kami dapat mewawancarai Anda mengenai pandangan Anda tentang revolusi Mesir. Pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita tarik dari kasus Mesir*

untuk rakyat Indonesia?

Samir Amin (SA): Ya, ada dua pelajaran besar yang bisa ditarik, karena kejatuhan Mobarak. Perlu ditekankan bahwa pertama-tama, lalu berikutnya kejatuhan Mursi, adalah hasil dari perlawanan rakyat Mesir, dan dari gerakan perlawanan yang terus membesar. Gerakan perlawanan yang berujung pada kejatuhan Mursi, bahkan lebih besar dan lebih kuat daripada gerakan perlawanan yang berujung pada kejatuhan Mobarak. Kita bisa memberikan angkanya. Demonstrasi terbesar menjelang kejatuhan Mobarak, menghimpun (di seluruh kota di Mesir) sekitar 15 juta demonstran. Demonstrasi 30 Juni yang berujung pada kejatuhan Mursi, menghimpun lebih dari 30 juta demonstran. Bahkan untuk sebuah negeri dengan 80 juta penduduk, menyebut 30 juta demonstran pada jam yang sama berarti menyebut seluruh penduduk negeri ikut berdemonstrasi.

Gerakan semacam ini adalah gerakan yang praktis meliputi seluruh negeri, seluruh rakyat. Dan tentu saja begitu besar sehingga gerakan itu mampu menghimpun berbagai kepentingan sosial yang berbeda; ada kepentingan-kepentingan yang berkonflik, visi-visi politik yang berbeda, dan terkadang dapat didamaikan. Dalam gerakan raksasa itu, dengan demikian, terdapat kaum kiri, kaum kanan, dan kaum tengah-kanan. Kaum kiri jauh lebih kuat daripada kelihatannya. Tentu saja, kaum kiri yang terorganisir dalam organisasi-organisasi komunis menghimpun para aktivis dari sekitar 50 ribuan aktivis. Jumlah itu barangkali kecil tetapi itu juga jumlah yang signifikan, karena ia menyangkut pengkaderan.

Tradisi komunis itu di Mesir banyak memiliki prestise, dan sangat dihormati. Ketika kita menyebut “komunis,” orang-orang tidak melihat pada diri Anda sesuatu yang menakutkan, tetapi sebaliknya, seorang pejuang yang berani dalam pembebasan nasional dan kemajuan sosial. Kaum kiri juga menghimpun serikat-serikat kerja yang sangat kuat di Mesir—dengan 5 juta orang yang terorganisir—dan kiri, walaupun dalam situasi terkini—mereka punya alasan untuk itu—mereka tidak ingin lagi menjadi “mata rantai transmisi,” begitu kita menyebutnya dulu, dari garis politik yang didikte dari luar oleh partai politik. Di dalam kaum kiri tersebut, terdapat sehimpunan petani dalam jumlah signifikan, para petani kecil yang berlawan—dan perlawanan itu keras, setiap hari terdapat korban—untuk

mempertahankan kepemilikan kecil yang terancam oleh ekspansi kapitalis yang liar hari ini. Di dalam kaum kiri tersebut juga terdapat gerakan populer kaum perempuan. Terdapat dua gerakan perempuan: gerakan perempuan dari kelas menengah terdidik yang perhatian utamanya adalah pada hak-hak perempuan dan demokrasi, dan gerakan perempuan populer yang menaruh perhatian lebih jauh pada kemelaratan dan penindasan. Di dalam kaum kiri tersebut juga terdapat dua gerakan besar kaum muda. Saya melihat ada empat gerakan kaum muda; masing-masing gerakan tersebut menghimpun 300 sampai 400 ribu aktivis terorganisir—itu bukan jumlah yang kecil. Dua dari gerakan-gerakan tersebut benar-benar kiri; dengan kata lain, memiliki, seperti sering mereka katakan, orientasi pada demokratisasi masyarakat, keadilan sosial, dan kemerdekaan nasional.

Kemudian, terdapat kaum tengah. Di dalam kaum tengah, kita memiliki sejumlah nama besar organisasi dan terkadang partai politik, bukan dari borjuasi tetapi dari kelas menengah, orang-orang terdidik—para dokter, dosen, insinyur, pengacara, karyawan eksekutif administrasi negara dan ekonomi, dan seterusnya. Mereka bukan mayoritas di dalam bangsa Mesir; kelas menengah mungkin sekitar 15-20%. Tetapi pengaruh mereka sangat kuat, karena orang-orang yang terdidik itu memiliki jabatan-jabatan penting. Mereka merepresentasikan kaum tengah, dalam arti bahwa tuntutan mereka adalah tuntutan-tuntutan yang mengarah lebih kepada persoalan-persoalan demokratis, yang tidak dapat direduksi menjadi soal-soal Pemilu, tentu saja—persoalan demokratis dalam arti yang jauh lebih luas, demokratisasi masyarakat, bukan, sekali lagi, semata-mata Pemilu; lagi pula Pemilu adalah sesuatu yang sekunder dalam perjuangan demokratis, yang lebih berarti adalah perjuangan mendapatkan hak-hak sosial, hak-hak pribadi, hak-hak asasi manusia, hak asasi pribadi dan sosial, dan hak berorganisasi dan berjuang—hak mogok kerja, dan seterusnya. Tetapi juga, tanpa menjadi sosialis, mereka bukan sosialis. Dengan kata lain, mereka tidak secara prinsipil menentang kapitalisme, tetapi mereka pro terhadap keadilan sosial, yaitu terhadap model-model pembangunan yang tidak memiskinkan mayoritas rakyat. Dan mereka tentu saja pro terhadap kemerdekaan nasional, yakni terhadap keterputusan dari status aktual dari negara-klien Amerika Serikat dan negara-negara Teluk. Organisasi-organisasi tersebut sangat kuat secara politis, lebih kuat daripada kaum kiri, karena organisasi-organisasi itu menyangkut kelas yang

relatif terdidik, dan seterusnya. Selain itu juga terdapat organisasi-organisasi kepemudaan yang sangat dekat dengan mereka, yang merekrut dan menghimpun anak-anak yang lahir dari kelas sosial tersebut.

Lalu, jangan lupa, kaum kanan. kaum kanan Mesir sangat kuat, dan eksis. Mereka adalah borjuasi, sebuah borjuasi komprador, tentu saja, tetapi borjuasi yang sebenarnya, yang memiliki akar historis dan berakar di pedesaan, kelas para petani kaya yang dulu kami sebut dalam jargon sebagai para “*koulak*,” mereka adalah basis dari Islam reaksioner Ikhwanul Muslimun. Mereka adalah inti sentral dari, katakanlah, pemanfaatan dan gkal atas agama, seperti agama Katolik yang dimanfaatkan oleh kekuasaan di abad ke-19; itu bukanlah hal yang sama sekali baru. Tetapi itu adalah Islam Politik reaksioner dari kelas reaksioner.

Nah, berhadapan dengan itu semua, terdapat militer. Di dalam militer, terdapat para komandan dan perwira. Para komandan, sejak era Anwar Sadat pada 1970, secara sistematis dibeli dan dikorupsi oleh Amerika Serikat. Dan kita tidak dapat berharap hal yang besar dari para jenderal dan komandan itu, termasuk Dewan Tertinggi (Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, *Le Conseil suprême des forces armées*, MAF). Tidak dapat. Tetapi militer di Mesir bukan semata-mata para jenderal, mereka juga adalah para kapten, dan tentara patuh kepada para kapten ini. Jika para kapten membangkang terhadap para jenderal, para jenderal tidak memiliki akses kepada para tentara. Dan terdapat kontradiksi di dalam militer, karena di antara para kapten, terdapat aliran-aliran yang menyatakan diri Nasserian—tetapi ini menyangkut masa lalu, sebagaimana kita menyatakan diri Soekarno di Indonesia—saya akan menempatkan mereka di kubu tengah secara politis. Dengan demikian terdapat dua kubu tengah: tengah-kiri dan tengah-kanan. Dengan kata lain, mereka, para kapten itu, tidak mesti anti-kapitalis, tetapi setidaknya mereka pro terhadap keadilan sosial. Mereka juga tidak terlalu demokrat. Nah, mengapa militer dapat merebut kemenangan populer yang berhasil menggulingkan Mubarak pada 2011 dan menggulingkan Mursi 3 Juli 2013? Jika Dewan Tertinggi melakukan hal tersebut, itu menunjukkan mereka cerdas. Karena militer mereka tahu bahwa komandan mereka...—mereka tidak tunduk kepada Amerika, para sekutu Amerika akan melakukan *fait accompli*, orang-orang Amerika yang tidak cerdas: “Kamu mendukung Mursi habis-habisan,” seperti prop-

aganda Barat hari ini, seperti Hollande yang mengatakan bahwa “Presiden yang terpilih adalah Mursi,” dan seterusnya—karena mereka tahu bahwa komandan mereka... harus *tampak* seolah-olah bersama rakyat. Mereka tidak dapat melawan rakyat, dan tampak seolah-olah melawan rakyat dengan mendukung Mursi, melawan lebih dari 30 juta demonstran. Tentu saja operasi tersebut adalah operasi yang cerdas, dan memberi mereka sejumlah popularitas, kita tidak boleh mengabaikan itu.

Dan saat ini, dalam jangka pendek, terdapat sejumlah kebingungan, karena militer berada di pihak demonstran anti-Mursi—hal itu memberi mereka sedikit prestise. Tetapi peperangan terus berlanjut, terutama dalam hal: program apa yang akan bergulir. Kebijakan politik apa yang akan bergulir. Melanjutkan kebijakan politik neoliberal yang telah diikuti Mursi dengan tunduk kepada Amerika dan negara-negara Teluk, melanjutkan ketundukan kepada Amerika dan negara-negara Teluk, atau memulai kebijakan politik independen, sebuah kebijakan politik yang bersifat sosial? Peperangan akan berlanjut di wilayah itu. Saya percaya bahwa pelajaran yang bisa ditarik dari pengalaman Mesir bernilai bagi banyak negeri secara keseluruhan. Karena gerakan-gerakan perlawanan terhadap sistem yang sedang bekerja saat ini, yang secara keseluruhan tunduk kepada neoliberalisme dan sangat sering tunduk kepada Amerika, bukan secara eksklusif terjadi di Mesir atau di negara-negara Arab. Tetapi kelemahan dari gerakan-gerakan itu adalah ketidakmampuan mereka hingga hari ini—dan mungkin ini adalah kasus yang juga terjadi di tempat lain—mereka, kaum kiri dan tengah, untuk menemukan program bersama yang positif dan alternatif.

MAF: *Dengan demikian, selain gairah revolusi dan perubahan radikal masyarakat dan politik, pelajaran yang bisa kita tarik dari kasus Mesir adalah organisasi massif yang saat ini sedang dibangun oleh rakyat Mesir. Tetapi, yang membuat hal itu agak menakutkan bagi sebagian kami di Indonesia adalah “efek” khaotiknya. Bagaimana Anda memandang hal itu?*

SA: Tidak ada khaos dalam masyarakat Mesir. Ketika pers Barat menyebut sedang terjadi “perang sipil,” itu adalah kebohongan. Tidak ada perang

sipil. Karena terdapat 90% masyarakat di satu pihak melawan Ikhwanul Muslimun, yang 10% di lain pihak. Ikhwanul Muslimun sangat kecil di Mesir, tetapi mereka sangat terorganisir. Mereka adalah 500 ribu orang yang terorganisir, termiliterisasi, didukung oleh milyaran dana negara-negara Teluk, didukung oleh CIA, dipersenjatai oleh Amerika, didukung oleh negara-negara Barat. Jadi mereka terus menebar ancaman; yang mereka organisir adalah terorisme. Ini bukan perang sipil. Mereka akan membom, meledakkan gereja-gereja, dan seterusnya. Hal-hal semacam itu.

Tentu saja setiap negeri memiliki karakteristik yang membedakan satu sama lain. Sebagai contoh, Mesir sangat berbeda dari Tunisia, berbeda dari Syria, masing-masing negara itu berbeda dari Indonesia. Tetapi terdapat fenomena umum, yaitu bahwa model pembangunan neoliberal yang berasosiasi dengan ketundukkan kepada kebijakan Amerika Serikat telah menggiring seluruhnya kepada petaka sosial, di mana-mana. Dan pertanyaannya adalah bagaimana rakyat merespons petaka sosial dan politik tersebut dengan perlawanan yang sangat kuat dan dalam jumlah besar, dan dalam hal itu Indonesia bukan perkecualian. Tetapi di mana-mana kita menemukan, mungkin dalam bentuk yang berbeda-beda, karakteristik yang sama, yakni perlawanan kuat dan dalam jumlah besar, tetapi pada saat yang sama penyebaran aktor-aktor, kekuatan-kekuatan politik dan sosial, sebuah gerakan yang sangat luas yang menghimpun berbagai kepentingan sosial yang berbeda. Jadi, kelemahan dari seluruh gerakan tersebut adalah kristalisasinya terhadap suatu alternatif bersama dan positif.

MAF: *Dalam konteks spesifik hubungan Indonesia dan Mesir, kita mendapatkan tiga hal yang analogis di kedua negeri ini, yakni bahwa pasca-kediktatoran muncul tiga fenomena: neoliberalisasi atau kapitalisme neoliberal, bangkitnya Islamisme dan fundamentalisme agama secara umum, dan kembalinya tentara ke tampuk kekuasaan atau remiliterisasi. Bagaimana menurut Anda?*

SA: Anda tahu tentang Indonesia ribuan kali lebih baik daripada saya, jadi saya tidak akan menambahkan apa yang Anda katakan. Tetapi, mungkin

kelebihan Mesir dalam kaitannya dengan Indonesia adalah bahwa kami di Mesir sudah selesai urusan dengan Islamisme politik, dalam arti bahwa tata pemerintahan Ikhwanul Muslimun sudah menciptakan kemuknaan pada seluruh penduduk Mesir. Dalam demonstrasi 30 juta demonstran, terdapat sebuah papan besar yang bertuliskan “Kami adalah orang-orang mukmin yang taat, dan karena itu kami menentang Ikhwanul Muslimin.” Anda lihat? Saya tidak yakin hal yang sama terjadi di Indonesia. Dan kemudian, mengenai militer di Indonesia, saya tidak tahu bagaimana saya harus menilai. Tetapi mengenai militer Mesir, harus dibedakan antara komandan dan kapten.

MAF: *Jadi, dalam hal itu, rakyat Mesir jauh lebih terorganisir dalam perlawanan menentang Islamisme?*

SA: Sekarang, ya. Dan itu baru.

MAF: *Tetapi, bagaimana mereka dapat memunculkan sentimen kritis yang demikian massif dan kuat terhadap Islamisme, sementara di Indonesia, tidak demikian persis keadaannya?*

SA: Perbedaannya adalah bahwa di Mesir, sebelumnya kita memiliki pemerintahan Islamis, yaitu pemerintahan Mursi dan Ikhwanul Muslimun; Anda tidak memiliki hal itu di Indonesia. Dan sebagai akibatnya, di Mesir, kenyataan bahwa mereka berkuasa membuka mata tentang siapa mereka sesungguhnya. Mereka telah menjalankan suatu kebijakan politik neoliberal yang lebih buruk, bahkan lebih buruk daripada Mubarak, dan ketundukkan kepada Amerika dan negara-negara Teluk yang lebih buruk ketimbang Mubarak. Hal itu membuka mata rakyat Mesir. Dan sejak Maret 2013, sebuah gerakan kepemudaan yang sangat kuat—*tamarod*, yang berarti “pembangkangan”—telah memulai kampanye tanda tangan yang dulu merupakan sarana untuk membentuk diskusi. “Lihatlah Ikhwanul Muslimun, mereka berkuasa, apa yang mereka lakukan!”

MAF: *Saya tertarik pada apa yang Anda katakan tadi mengenai organisasi populer dalam perlawanan melawan status quo kapitalis-cum-Islamis, bahwa diperlukan suatu organisasi yang kuat yang berakar pada massa.*

SA: Tamarod berhasil dalam kampanye anti-Ikhwan, karena mereka berhasil merebut dukungan dari para aktivis kiri dan tengah, dalam segala lini.

MAF: *Tetapi, bagaimana menjaga kontinuitas perlawanan itu, karena di Indonesia juga terdapat berbagai upaya untuk mengorganisasi massa dalam persoalan-persoalan khusus, misalnya dalam soal kesehatan, korupsi, isu-isu publik, tetapi hal itu tampak sebagai sesuatu yang berjalan sendiri-sendiri?*

SA: Itu kelemahannya, dan itu juga yang terjadi di Mesir. Kita tidak memiliki baik teori maupun praktik organisasi, berhadapan dengan tantangan aktual. Itu adalah pekerjaan rumah besar bagi para aktivis, bagi debat-debat, diskusi-diskusi, dan aksi-aksi, untuk menciptakan bentuk-bentuk organisasi yang mampu beradaptasi kepada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak.

MAF: *Tetapi, apakah Anda memiliki harapan bahwa kerja itu akan terus berjalan?*

SA: Ya, saya punya harapan, tetapi ini bukan sekadar karena kita harus berharap. Pada bulan Oktober 2012, saya melewati waktu sebulan untuk berdiskusi dengan praktis seluruh aliran kiri dan tengah. Dan saya menyadari bahwa mulai muncul suatu program bersama; saya akan mengirimkan dokumennya kepada Anda.

MAF: *Pertanyaan terakhir. Apa peran rakyat Indonesia dalam menciptakan apa yang Anda istilahkan sebagai “dunia alternatif,” karena, khususnya dalam persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat Mesir, terdapat suatu catatan sejarah yang istimewa dan mengesankan...*

SA: Dan panjang... karena dulu terdapat simpati aktif antara Soekarno dan Nasser, antara komunisme di Timur Tengah, khususnya di Mesir, Syria, Irak, dan Iran, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika saya menulis tentang apa yang kita lakukan di tahun 1950-an dalam persiapan langkah-langkah konferensi Bandung, saya kemudian menyadari, seperti diungkapkan kamerad kita, Umar Said, mantan jurnalis *Harian Ekonomi* yang eksil di Paris dan berkewarganegaraan Prancis, bahwa dahulu berlangsung diskusi-diskusi di Partai Komunis Indonesia mengenai hal itu.***



Samir Amin

Biodata Penulis

Andre Barahamin, saat ini bekerja sebagai peneliti di Yayasan PUSAKA (Pusat Studi, Advokasi dan Dokumentasi Hak-hak Masyarakat Adat) dengan memfokuskan diri pada kajian soal perampasan tanah di Papua, hak-hak orang asli Papua, Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dan isu seputar perkebunan sawit, bubur kertas dan industri penebangan kayu. Mendapatkan gelar M.Phil dari Thammasat University dan menghabiskan waktu luangnya dengan menjadi editor Harian IndoProgress. Bersama Hizkia Yosie Polimpung, menerjemahkan **Austerity Against Democracy: An Authoritarian Phase of Neoliberalism** (2015) ke dalam bahasa Indonesia. Tulisannya tersebar di berbagai antologi buku dalam dan luar negeri seperti **KRETEK: Kajian Ekonomi dan Budaya 4 Kota** (2010), **Cognitive Capitalism: Student Politic vs Student Activism** (2014), **Teaching Profession in ASEAN** (2014), **Land Grabbing in Southeast Asia** (2015) dan **Skandal Sastra** (2016).

Coen Husain Pontoh, saat ini merupakan pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi IndoPROGRESS. Lulusan Ilmu Politik dari City University of New York ini merupakan mantan tahanan politik Orde Baru karena keterlibatannya dengan serikat buruh di era Soeharto saat masih menjadi bagian dari Partai Rakyat Demokratik. Sempat terlibat dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), tapi aktivismenya dimulai saat menjadi bagian dari Solidaritas Pelajar Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Cabang Manado. Ia menulis **TNI Bukan Tentara Rakyat** (2000), **Utang Yang Memiskinkan** (2002), **Akhir Globalisasi: Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa** (2003), **Menentang Mitos Tentara Rakyat** (2005), dan **Malapetakan Demokrasi Pasar** (2007). Tulisan-tulisannya juga menjadi bagian dari berbagai antologi seperti **Gerakan Massa Menghadang Imperialisme Global** (2005), **Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat** (2008), **Dapur Media: Antologi Liputan Media di Indonesia** (2013) dan **#narasi: Antologi Prosa Jurnalisme**.

Giles Ji Upangkorn, adalah intelektual sekaligus aktivis yang terpaksa harus menjalani hidup dalam pengasingan di Inggris setelah dituduh menghina Raja Bhumibol Aduljadev ketika merilis buku **A Coup for the Rich** (2007). Ia pernah menjabat sebagai Associate Professor di Chulalongkorn University dan merupakan salah satu sosok di belakang mobilisasi menolak kudeta militer terhadap Thaksin Shinawatra di tahun 2006. Dikenal merupakan salah satu pemikir terkemuka Thailand sejak awal 2000-an dan ikut mendirikan grup sosialis Turn Left di Thailand yang merupakan bagian dari International Marxist Tendency (IMT). Di masa pelarian, ia merilis **Thailand's Crisis and the Fight for Democracy** (2010), yang hingga kini dijadikan rujukan luas bagi mereka yang ingin mempelajari soal tarik ulur demokrasi dan peran militer serta keluarga kerajaan. Ia juga mengelola blog dwi bahasa Ugly Truth yang memfokuskan diri pada penyingkapan isu-isu tabu mengenai politik dalam negeri Thailand.

Iqra Anugrah, kandidat doktor Ilmu Politik dan Studi Asia Tenggara dari Northern Illinois University. Saat ini menjadi peneliti tamu di LP3ES Jakarta, pemegang dua gelar master dari Ohio University dan Ritsumeikan Asia Pacific University ini juga menjadi pengampu rubrik politik di Harian IndoPROGRESS. Selain tersebar di berbagai jurnal, tulisan-tulisannya juga menulis menyumbang bab di berbagai buku seperti **Tantangan Jokowi-JK dan Gerakan Rakyat Menghadapi Konservatisme Islam Politik** (2014), **Echanting Asian Social Landscapes** (2014), **Di Balik Sosok Marx** (2015), dan **Bela Islam atau Bela Oligarki: Pertalian Agama, Politik dan Kapitalisme di Indonesia** (2017). Di sela-sela riset disertasi, ia kini ikut mengorganisir Forum Islam Progresif (FIP) di Jakarta, yang merupakan aliansi luas pemuda Muslim radikal untuk membentuk merebaknya konservatisme. Riset disertasinya merupakan upaya untuk mempelajari hubungan antara serikat petani, kelompok-kelompok elit dan irisan kepentingan antar kelompok ini.

Luky Djani, alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menjadi bagian

*dari pemantauan jajak pendapat Timor Leste di tahun 1999. Di tahun 2000-2006, bergabung dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia mendapatkan gelar masternya dari National University of Singapore (NUS) di jurusan Public Policy Program. Di tahun 2008, mendapatkan beasiswa Australian Leadership Award dari AusAID untuk menempuh studi doktoral di Asia Research Center, Murdoch University, Australia. Pulang ke Indonesia selepas lulus di tahun 2011, segera bergabung dengan Transparency International Indonesia sebagai Deputy Sekretaris Jendral. Saat ini menjabat sebagai Direktur Institute for Strategic Initiatives (ISI) yang melakukan riset mengenai praktek-praktek mengintervensi pemilihan kepala daerah dan legislatif di beberapa daerah oleh kelompok gerakan sosial. Kontribusinya tersebar di berbagai buku, termasuk paling anyar **Dilemmas of Populist Transactionalism** (2017) yang ditulisnya bersama Olle Tornquist.*

Muhammad Al-Fayyadl, lulusan jurusan filsafat di Universite Paris VIII: Vincennes Saint Dennis adalah seorang santri Nahdlatul Ulama (NU) yang menulis sejumlah buku seperti **Derrida** (2005), **Teologi Negatif Ibn Arabi: Kritik Metafisika Ketuhanan** (2012), dan **Filsafat Negasi** (2016). Ia juga ikut menyumbang tulisan di dalam buku **Deradikalisasi Islam: Paradigma dan Strategi Islam Kultural** (2010). Bersama sesama aktivis NU yang lain, ia mendirikan Islam Bergerak -situs progresif yang mengusung diskursus anti-kapitalisme dan komunisme dan menjadi editor hariannya.

Muhammad Ridha, adalah Pemimpin Redaksi Left Book Review (LBR) -salah satu seksi di IndoProgress dan anggota Biro Politik Partai Rakyat Pekerja (PRP). Lulusan Murdoch University ini juga mengampu rubrik politik di Harian IndoPPROGRESS walau kini sedang melanjutkan studi doktoralnya di Northwestern University, Chicago. Terbaru, salah satu tulisannya menjadi bagian dalam buku **Urban Revolt: State Power and the Rise of Peoples Movement in the Global South**. Tulisan-tulisannya mengenai jaminan sosial tersebar di berbagai jurnal seiring aktivitasnya sebagai peneliti di Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (INKRISPENA). Ia juga sempat menjadi tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP) Universitas Indonesia dan peneliti di Pusat Kajian Politik (PUSKA-POL) UI.

Samir Amin, ekonom Marxis campuran Mesir-Prancis kelahiran Kairo yang kini menetap di Dakar, Senegal. Ia dikenang sebagai intelektual pertama yang memperkenalkan terma Eurosentrisme di tahun 1988. Satu dari sekian pelajar yang ikut menggagas *Etudiants Anticolonialistes*. Sempat bekerja sebagai penasihat Menteri Perencanaan Mali di Bamako (1960-1963). Di tahun 1970 menjadi Direktur Institut African de Developpement Economique et de Planification (IDEP), jabatan yang disandanginya hingga 10 tahun kemudian sebelum akhirnya menjadi Direktur Third World Forum yang berbasis di Dakar. Di tahun 2009, ia dianugerahi Ibn Rushd Prize for Freedom of Thought. Beberapa karya monumentalnya misalnya adalah **Global History: a View from the South** (2010), **Maldevelopment: Anatomy of Global Failure** (2011), dan **Imperialism and Globalization** (2011).

Sapto Waluyo, merupakan salah satu intelektual terkemuka Partai Keadilan Sosial (PKS) dan sempat menduduki posisi sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS. Ia mendirikan sekaligus menjadi Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform (CfIR). Sempat juga mendirikan Hisbah Center for Reform dan pernah menjadi Staf Khusus Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri.

Ted Sprague, adalah *nomdeguerre* dari Harianto Darwaman. Ia adalah editor utama Militan Indonesia sekaligus merupakan penerjemah utama karya-karya Trotsky dan Trotskyisme ke dalam bahasa Indonesia. Militan Indonesia adalah grup yang menjadi bagian dari jejaring internasional para pengikut Trotsky yang dikenal sebagai International Marxist Tendency (IMT). Bersama Rafiq Nadezhda, ia menerjemahkan **Revolusi Yang Dikhianati** (2010), lalu mengalihbahasakan **Program Transisional: Untuk Revolusi Sosialis dan Tugas Internationale Keempat** (2012), **Revolusi**

Permanen (2013), *dan Nalar yang Memberontak: Filsafat Marxisme dan Sains Modern* (2016). Kini sedang berdomisili di Toronto, Kanada.

Vedi R. Hadiz, adalah ilmuwan sosial terkemuka asal Indonesia yang kini bekerja sebagai Professor di Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne. Sebelumnya menjabat sebagai Professor di Asian Societies and Politics, Asia Research Center, Murdoch University, setelah posisi sebagai Associate Professor di Jurusan Sosiologi, National University of Singapore ditinggalkan. Gelar doktornya direngkuh dari Murdoch University di tahun 1996. Karya-karyanya tersebar di berbagai media nasional dan internasional, baik berupa artikel dalam jurnal, bab buku atau tulisan bersama intelektual-intelektual lain. Penerima Future Fellowship di tahun 2010 ini dikenal sebagai salah satu teoritis terkemuka. Bukunya bersama Richard Robinson, **Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets** (2004) menjadi rujukan luas untuk menganalisa tentang jejaring kekuasaan elit di Indonesia. Bukunya yang terbaru **Islamic Populism in Indonesia and the Middle East** (2016) juga dianggap sebagai salah satu studi paling komprehensif mengenai kebangkitan Islam di dunia.

